



D
I
L
M
I
L
T
I
I
I

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN 2020
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



MOTTO : TEKAD

TANGGAP ENERGIK KONSISTEN ADIL DISIPLIN



Jl. Ir. H. Juanda No. 87



<https://dilmilti3-surabaya.go.id/>



milti.surabaya@dilmil.org



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se Wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 tentang penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan sekaligus bentuk pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2020.

Mengingat adanya pandemi Covid-19, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengatur pelaksanaan tugas dan pemberian layanan publik sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini merupakan upaya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Akhir kata semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna tentang kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya.

Januari 2021
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III



H. L. WANI, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL TNI



Daftar Isi

Kata pengantar	i
Daftar isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
- Profil Peradilan	1
- Visi dan Misi	4
- Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	5
Bab II A Keadaan Perkara di Pengadilan Militer.....	7
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
- Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	8
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	8
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	10
- Jumlah sisa perkara yang diputus	10
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	11
Bab III Sumber Daya Manusia	15
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan.....	15
A. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	15
- Mutasi	20
- Promosi.....	21
- Pensiun.....	23
- Pendidikan dan Pelatihan.....	24
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana, & Teknologi Informasi	126
A. Pengelolaan Keuangan.....	127
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	157



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

C. Pengelolaan Teknologi Informasi	194
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	225
- Akreditasi Penjaminan Mutu	225
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	229
- Inovasi Pelayanan Publik	230
Bab VI Pengawasan.....	307
A. Internal	309
B. Evaluasi	312
Bab VII Penutup.....	314
A. Kesimpulan	314
B. Rekomendasi.....	314





BAB I PENDAHULUAN

A. Profil Peradilan

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (Prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih bersdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan Visi dan Misi sesuai dengan kebijakan yang telah di gariskan oleh Mahkamah Agung RI dalam terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMS/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meliputi - Jawa Timur, Sulawesi, Jayapura, NTT, Maluku dan Bali, yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) Pengadilan Militer yaitu :



- 1) Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkedudukan di Sidoarjo
- 2) Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Madiun
- 3) Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkedudukan di Denpasar
- 4) Pengadilan Militer III-15 Kupang berkedudukan di Kupang
- 5) Pengadilan Militer III-16 Makassar berkedudukan di Makassar
- 6) Pengadilan Militer III-17 Manado berkedudukan di Manado
- 7) Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Ambon
- 8) Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkedudukan di Jayapura

Tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama:
 - a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - 1) Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas;
 - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya berpangkat Mayor ke atas; dan
 - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - b) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding;
- (3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam Daerah hukumnya.

Tugas pokok Pengadilan Militer Tingkat Pertama diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; "Pengadilan Militer



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah:

- Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwaanya ' termasuk tingkat kepangkatan' Kapten ke bawah; dan
- Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer“.

Wilayah Yurisdiksi

No	Satker	Tipe	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Dilmilti III Surabaya	A	Sidoarjo	Jatim Sulawesi Jayapura NTT Bali Maluku
2.	Dilmil III-12 Surabaya	A	Sidoarjo	Surabaya
3.	Dilmil III-13 Madiun	B	Madiun	Madiun
4.	Dilmil III-14 Denpasar	A	Denpasar	Denpasar
5.	Dilmil III-15 Kupang	B	Kupang	Kupang
6.	Dilmil III-16 Makassar	A	Makassar	Sulawesi
7.	Dilmil III-17 Manado	B	Manado	Sulawesi
8.	Dilmil III-18 Ambon	A	Ambon	Maluku
9.	Dilmil III-19 Jayapura	A	Jayapura	Jayapura

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajaran di bawahnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan selaku Pembina Personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2020 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu :

Memeriksa dan memutus pada Tingkat Pertama perkara pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam daerah hukumnya yang di mintakan banding. Menerima dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan Grasi serta Peninjauan Kembali (PK) perkara-perkara yang diajukan oleh Pengadilan Militer yang berada di bawah wewenangnya. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Pelaksanaan tugas yang meliputi bidang Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2020, telah dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada DIPA tahun 2020

B. Visi dan Misi.

Untuk menyatukan persepsi serta mengimplementasikan dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi, dilandasi dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang agung”

MISI

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki motto “ **TEKAD** “, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

T: tangguh,

E : enerjik,

K: konsisten,

A: adil,



D: disiplin.

C. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

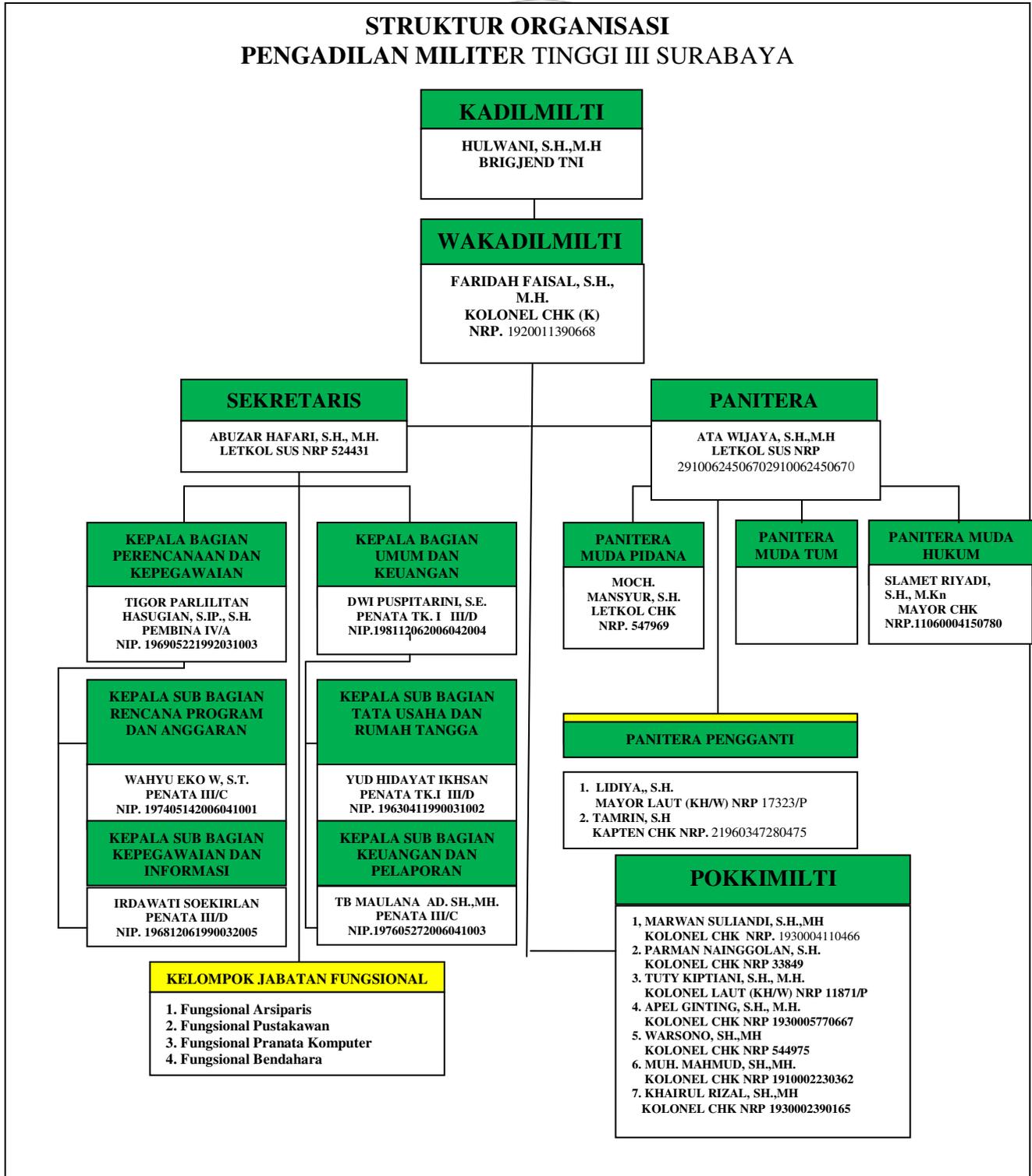
Sejalan dengan program One Roof System (Peradilan Satu Atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2021.



D. Struktur Organisasi



BAB II KEADAAN PERKARA

A Keadaan Perkara Di Pengadilan Militer

Keadaan Perkara Tingkat Pertama.

Keadaan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :

No	Satker	Sisa tahun 2019	Masuk tahun 2020	Jumlah	Putus	Sisa	%
1.	Dilmilti III Surabaya	5	10	15	15	0	100
2.	Dilmil III-12 Surabaya	7	162	169	156	13	93,4
3.	Dilmil III -13 Madiun	2	44	46	43	3	93,5
4.	Dilmil III -14 Denpasar	2	56	58	57	1	98,3
5.	Dilmil III -15 Kupang	1	19	20	20	0	100
6.	Dilmil III -16 Makassar	2	98	100	97	3	97
7.	Dilmil III -17 Manado	0	74	74	72	2	97,3
8.	Dilmil III -18 Ambon	11	216	227	225	2	99,1
9.	Dilmil III -19 Jayapura	3	283	286	283	3	99

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selain menangani perkara Tingkat Pertama juga menangani perkara Tingkat Banding, dengan keadaan perkara Tingkat Banding sebagai berikut :

sisa tahun 2019	0	perkara
perkara di terima selama tahun 2020	65	perkara
Jumlah	65	perkara
perkara diselesaikan pada tahun 2020	65	perkara
sisa tahun 2020	0	perkara
persentase penyelesaian perkara yang putus	100	%

2. Keadaan perkara Tingkat Banding.

Perkara Tingkat Pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2020 sejumlah 15 (lima belas) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut ada yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 5 (lima) perkara. seluruh berkas permohonan upaya hukum banding telah dikirim secara lengkap, dan berkas beserta putusan banding telah diterima kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	Sisa tahun 2019	Perkara yang mengajukan upaya hukum banding tahun 2020	Jumlah	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dilmilti III Surabaya	0	5	5	5	0
2.	Dilmil III-12 Surabaya	5	19	24	22	2
3.	Dilmil III -13 Madiun	2	2	4	4	0
4.	Dilmil III -14 Denpasar	0	2	2	2	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	0	0	0	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	3	10	13	12	1
7.	Dilmil III -17 Manado	3	8	11	10	1
8.	Dilmil III -18 Ambon	0	5	5	3	2
9.	Dilmil III -19 Jayapura	0	21	21	18	3

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.

Perkara Tingkat Pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2020 sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 3 (tiga) perkara, upaya hukum Kasasi tersebut atas Putusan Banding sudah turun dari Pengadilan Tingkat Banding, putusan upaya hukum Kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI dan telah diterima kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Sisa tahun 2019	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Dilmilti III Surabaya	3	3	6	3	3
2.	Dilmil III-12 Surabaya	18	38	56	46	10
3.	Dilmil III -13 Madiun	4	8	12	10	2
4.	Dilmil III -14 Denpasar	3	7	10	7	3
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	2	2	0	2
6.	Dilmil III -16 Makassar	5	13	18	14	4
7.	Dilmil III -17 Manado	1	8	9	9	0
8.	Dilmil III -18 Ambon	2	8	10	7	3
9.	Dilmil III -19 Jayapura	1	6	7	4	3

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Perkara Tingkat Pertama yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2020 sejumlah 15 (lima belas) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun ada 1 (satu) permohonan upaya Hukum Kasasi pada tahun 2018 yang sampai sekarang masih permohonan, karena terpidana belum menyerahkan memori Peninjauan Kembali, sehingga rincian perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Sisa tahun 2019	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK tahun 2020	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Dilmilti III Surabaya	1	0	1	0	1
2.	Dilmil III-12 Surabaya	1	6	7	4	3
3.	Dilmil III -13 Madiun	0	0	0	0	0
4.	Dilmil III -14 Denpasar	0	0	0	0	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	0	0	0	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	1	1	2	1	1
7.	Dilmil III -17 Manado	0	0	0	0	0
8.	Dilmil III -18 Ambon	0	1	1	1	0
9.	Dilmil III -19 Jayapura	5	3	8	7	1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus.

Sisa perkara yaitu perkara yang belum bisa diselesaikan pada tahun berjalan sehingga menjadi beban perkara ditahun berikutnya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya di tahun 2020 memiliki sisa Tahun 2019 dan dapat diselesaikan di tahun 2020 dengan rincian berikut :

No	Satker	Sisa tahun 2019	Putus tahun 2020	Sisa perkara
1.	Dilmilti III Surabaya			
	Tingkat pertama	5	5	0
	Tingkat banding	0	0	0
2.	Dilmil III-12 Surabaya	7	7	0
3.	Dilmil III -13 Madiun	2	2	0
4.	Dilmil III -14 Denpasar	2	2	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	1	1	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	2	2	0
7.	Dilmil III -17 Manado	0	0	0
8.	Dilmil III -18 Ambon	11	11	0
9.	Dilmil III -19 Jayapura	3	3	0

2. Perkara yang diputus tepat waktu.

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Mendasari Surat Edaran tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	< 3 bulan	4 - 5 bulan	6 - 12 bulan	> 12 bulan
1.	Dilmilti III Surabaya				
	Tingkat Pertama	11	4	-	-
	Tingkat Banding	65	-	-	-
2.	Dilmil III-12 Surabaya	146	10	-	-
3.	Dilmil III -13 Madiun	41	2	-	-
4.	Dilmil III -14 Denpasar	57	-	-	-
5.	Dilmil III -15 Kupang	20	-	-	-
6.	Dilmil III -16 Makassar	96	1	-	-
7.	Dilmil III -17 Manado	72	-	-	-
8.	Dilmil III -18 Ambon	225	-	-	-
9.	Dilmil III -19 Jayapura	264	18	1	-

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.

> Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2020 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 15 (lima belas) perkara, dari putusan tersebut baik Terdakwa maupun Oditur Militer yang mengajukan upaya hukum Banding sejumlah 5 (lima) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
1.	Dilmilti III Surabaya	15	5	10
2.	Dilmil III-12 Surabaya	156	19	137
3.	Dilmil III -13 Madiun	43	2	41
4.	Dilmil III -14 Denpasar	57	2	55
5.	Dilmil III -15 Kupang	20	0	20
6.	Dilmil III -16 Makassar	97	10	87
7.	Dilmil III -17 Manado	72	8	64
8.	Dilmil III -18 Ambon	225	5	220
9.	Dilmil III -19 Jayapura	283	21	262

> Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2020 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 15 (lima belas) perkara dan menerima Putusan Banding dari Pengadilan Militer Utama sejumlah 5 (lima) berkas, yang mana sebelumnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima 5 (lima) permohonan upaya hukum Banding pada tahun 2020, dari 5 (lima) perkara Banding yang telah diputus tersebut ada perkara yang mengajukan permohonan upaya Hukum Kasasi sejumlah 4 (empat), sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upayaHukum Banding
1.	Dilmilti III Surabaya	15	5	10
2.	Dilmil III-12 Surabaya	156	19	137
3.	Dilmil III -13 Madiun	43	2	41
4.	Dilmil III -14 Denpasar	57	2	55
5.	Dilmil III -15 Kupang	20	0	20
6.	Dilmil III -16 Makassar	97	10	87
7.	Dilmil III -17 Manado	72	8	64
8.	Dilmil III -18 Ambon	225	5	220
9.	Dilmil III -19 Jayapura	283	21	262

> Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2020 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 15 (lima belas) perkara dan menerima Putusan Banding dari Pengadilan Militer Utama sejumlah 5 (lima) berkas, yang mana sebelumnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima 5 (lima) permohonan upaya hukum Banding pada tahun 2020, dari 5 (lima) perkara Banding yang telah diputus tersebut ada perkara yang mengajukan permohonan upaya hukum Kasasi sejumlah 4 (empat), sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :



No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
1.	Dilmilti III Surabaya	15	4	11
2.	Dilmil III-12 Surabaya	156	38	118
3.	Dilmil III -13 Madiun	43	2	41
4.	Dilmil III -14 Denpasar	57	1	56
5.	Dilmil III -15 Kupang	20	0	20
6.	Dilmil III -16 Makassar	97	14	83
7.	Dilmil III -17 Manado	72	9	63
8.	Dilmil III -18 Ambon	225	1	224
9.	Dilmil III -19 Jayapura	283	14	269

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

A) KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah tersedianya Sumber Daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari 3 jenis status Kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Tahun 2020 SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berjumlah 42 orang dengan rincian 22 orang Militer, 10 orang PNS dan 11 orang PPNPN

SDM di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersusun atas tenaga Teknis dan Non Teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNPN dalam Struktur Organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Data Personel Militer.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Hulwani, SH.,MH Brigjend TNI	Brigadir Jenderal NTNI	Kadilmilti III
2.	Faridah Faisal, S.H.,M.H.	Kolonel CHK (K) NRP 1920011390668	Waka Dilmilti III
3.	FX. Raga Sejati, S.H.,M.H.	Kolonel CHK NRP 545034	Hakim Militer Tinggi
4.	Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.	Kolonel CHK NRP 1910014940863	Hakim Militer Tinggi
5.	Bambang Indrawan, S.H., M.H.	Kolonel CHK NRP 548944	Hakim Militer Tinggi
6.	Esron Sinambela, S.S., S.H.,M.H	Kolonel CHK NRP 11950006980270	Hakim Militer Tinggi
7.	Koerniawaty Sjarif, SH.MH.	Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P	Hakim Militer Tinggi
8.	Abuzar Hafar, S.H.,M.H	Letkol Sus NRP 524431	Sekretaris
9.	Ata Wijaya, S.H.,M.H	Letkol Chk NRP 2910062450670	Panitera
10.	Slamet Riyadi, SH.M.Kn	Mayor Chk NRP 1106000415078	Panmud Hukum
11.	Lidiya, S.H	Mayor Laut(KH/W) NRP 17323/P	Panitera Pengganti
12.	Tamrin, S.H	Kapten Chk NRP 21960347280475	Panitera Pengganti
13.	Adi Sukadar	Pelda NRP 21010160750379	Pengelola Barang Milik Negara
14.	Nanang Candra Trisnianto, S.H.	Serka NRP 21040180940185	Pengelola Barang Milik Negara
15.	Ali Fatkul Rahman	Serka NRP 21060247360585	Pengelola Perkara
16.	Amrustian, SH	Serka NRP 21070475460288	Pengelola Perkara
17.	Yohan Dony Kurniawan, S.H.	Serka NRP 21070475120387	Pengelola Sistem dan Jaringan
18.	Eko Widodo	Serma NRP 21950302550573	Ajudan
19.	Umar Hasan, S.H.	Serma NRP 31940539590572	Ajudan
20.	Budi Harjo Sukoco	Serda NRP 31030326311282	Pemelihara Sarana dan Prasarana
21.	Deddi Pradana .S	Praka NRP 31130165410494	Pengadministrasi Hukum
22.	Kotib	Sertu NRP 31950475050174	Teknisi Sarana dan Prasarana

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS).

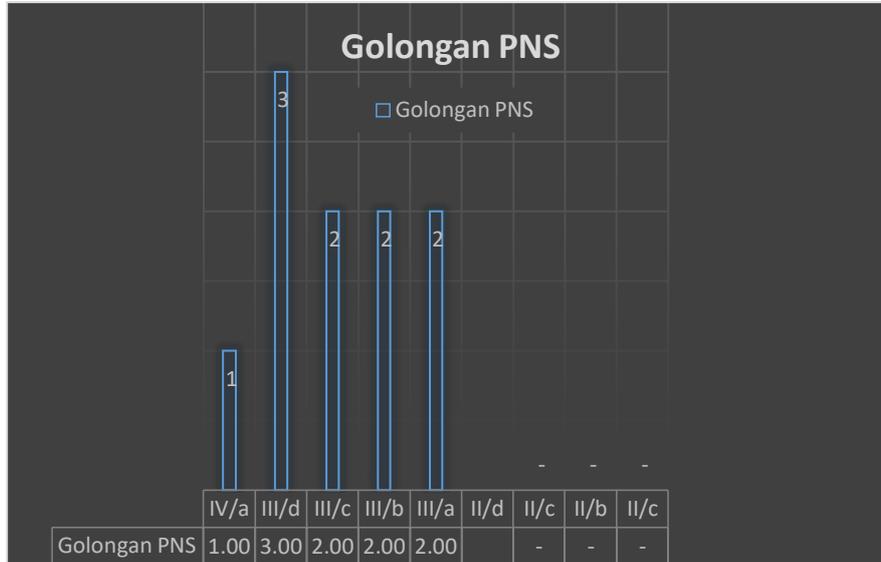
No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H	Pembina IV/a196905221992031003	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
2.	Dwi Puspitarini,S.E	Penata Tk.I III/d NIP198112062006042004	Kabag Umum dan Keuangan
3.	Yud Hidayat Ikhsan	Penata Tk.I III/d NIP 196304011990031002	Kasubbag TU dan Rumah Tangga
4.	Irdawati Soekirlan	Penata Tk.I III/d NIP196812061990032005	Kasubbag Kepegawaian dan TI
5.	Wahyu Eko Wicaksono, ST	Penata III/c NIP 197405142006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
6.	Tubagus Maulana Arif Darma,SH.,MH	Penata III/c NIP 197605272006041003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
7.	Amanda Rosaline Fajar Sari, SH	Penata Muda III/a NIP 199502162019032008	Analisis Perkara Peradilan
8.	Angga Permana Putra ,S.H.	Penata Muda III/a NIP 198509212009041002	Penyusun Laporan Keuangan
9	Mochamad Gufron	Penata Muda Tingkat III/b NIP 196912041997011001	Pengadministrasi Registrasi Perkara
10	Setiadi	Penata Muda Tingkat III/b NIP196212201998031001	Pengadministrasi Hukum

Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Sumila	Pramubakti
2.	Karmayani	Pramubaki
3.	Purwaning Wahyudi	Pramubaki/Driver
4.	Agita Kartika Ayuningtyas , S.H	Pramubaki
5.	Sukiman	Security
6.	Nanang Setiyoko	Security
7.	Amir Hasan	Security
8.	Nugraha Kencana Effendi	Pramubakt/Driver
9.	M. Yusuf Effendi	Pramubakti
10	Faisal Dwikkyy Koco Nugroho	Pramubakti
11	Gilang Pratama	Pramubakti



Pangkat PNS pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

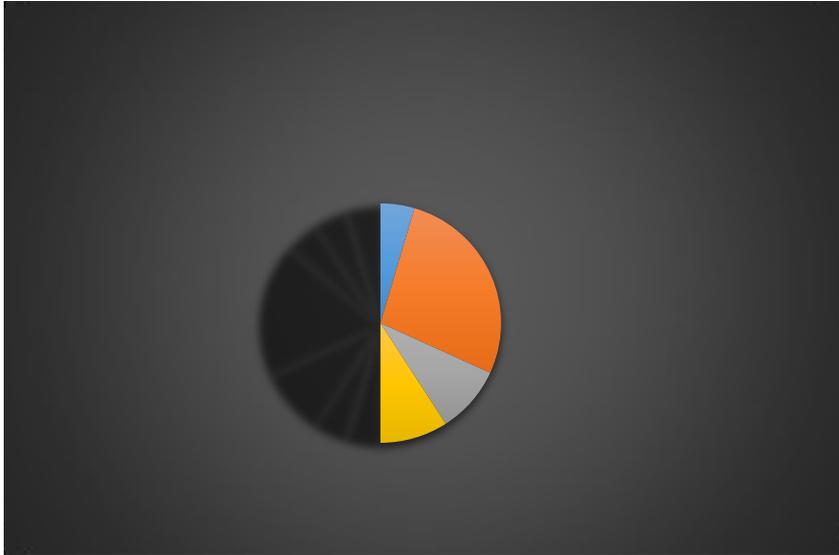


Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



2. Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan.

Pangkat TNI pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



3. Data Pegawai berdasarkan jabatan

Jabatan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

B) Mutasi

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan Pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan

1. Mutasi Masuk

Mutasi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2020 secara keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama, Pangkat, NRP	Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat
1.	Ata Wijaya Liwung, SH, MH. Letkol Chk NRP 2910062450670	Panitera	Sprin Kadilmiltama Nomor Sprin/6801/KP.04.1/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019
2	Tamrin, SH Kapten Chk NRP 21960347280475	Panitera Pengganti	Sprin Kadilmil III-12 Surabaya Nomor Sprin/02/I/2020 tanggal 27 Januari 2020
3	Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor 168/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020
4	Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor 168/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020
5	FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya	Kadilmiltama Nomor 168/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020
6	Koerniawaty Sjarif, SH.M H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor 168/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020
7	Esrn Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor 168/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020
8	Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191000520036	Kadilmilti III Surabaya	surat perintah Kadilmiltama Nomor : 199/KP.04.6 /IV/2020 tanggal 6 April 2020
9	Faridah Faisal, SH., MH Kolonel Chk NRP 1920011390668	Waka Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor : 218/KP.04.6 /V/2020 tanggal 4 Mei 2020
10	Lidiya, S.H. Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P	Panitera Pengganti	surat perintah Kadilmiltama Nomor : 277/KP.04.6 /VI/2020 tanggal 22 Juni 2020



2. Mutasi Keluar

Di tahun 2020 terdapat 6 (enam) orang Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2020

Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Parman Nainggolan, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 133849	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya.ke Dilmilti I Medan	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun 958/Djmt/Kep/SK/10/2019 22-10- 2019	22/01/2020
2	Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930005770667	Pokkimmilti Gol IV Dimilti III Surabaya mutasi Panitera MARI	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun 958/Djmt/Kep/ SK/10/2019 22-10- 2019	1/5/2020
3	Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya. Ke Bawas MARI	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun 958/Djmt/Kep/ SK/10/2019 22-10- 2019	1/4/2020
6	Suhendra, S.H Pelda NRP 21010150930781	Staf Panmud Pidana Dilmilti III Surabaya mutasi ke Dilmil III-12 Surabaya	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : 232/KP.04.5 /V/2020 tanggal 18 Mei 2020	26/5/2020
5	Marwan Suliandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930004110466	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya mutasi ke Dilmilti II Jakarta	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI 450/Sek/Kp.1/SK/VI/2019 21-06-2019	1/12/2020
6	Khairul Rizal , S.H.,M.Hum Kolonel Chk NRP 1930002390165	Pokkimmilti Gol IV Dilmilti III Surabaya mutasi ke Dilmilti II Jakarta	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI 450/Sek/Kp.1/SK/VI/2019 21-06-2019	1/12/2020

C) PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar Organisasi dapat melakukan Regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada



pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan Jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan kebutuhan Pegawai dalam jabatan tertentu.

1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang Pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat Pilihan dan kenaikan pangkat Anumerta. Selama tahun 2020 terdapat 2 orang Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat Regular. Kenaikan pangkat Regular ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969	Letkol Chk	Sprin/182/KP.04.1 /III/2020 tanggal 30 Maret 2020	1/4/2020
2	Suhendra, S.H Serma NRP 21010150930781	Pelda	Sprin/185/KP.04.1 /III/2020 tanggal 30 Maret 2020	1/4/2020
3	Irdawati Soekirlan Penata Gol. III/c NIP 196812061990032005	Penata Tk I Gol./Ruang III/d	29 /KP.I/SK/III/2020 tanggal 30 Maret 2020	1/4/2020
4	Adi Sukadar Serma NRR	Pelda	Kep/303/III/2020 16-Maret 2020	01/10/2020

	21010160750379			
5	Deddy Pradana S Pratu NRP 31130165410494	Praka	Kep/722-33/IX/2020 7 September /2020	01/10/2020

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu Struktur Organisasi dalam tahun 2020 tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

D) PENSIUN

Pensiun berlaku bagi Pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintangara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan Para PNS akan mengakiri masa dinas nya di usia 58 tahun.

Pensiun di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada Tahun 2020 Personil TNI maupun PNS sebanyak 9 (sembilan) orang dengan rincian atas nama :

- 1) PNS Cich Haryati. yang saat ini sudah pensiun Terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2020.
- 2) Mayor Chk Sunardi, yang saat ini sudah pensiun Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020.
- 3) Kolonel Chk Mahmud, S.H., M.H. yang saat ini sudah pensiun Terhitung mulai tanggal 01 April 2020.
- 4) Brigjen TNI Trias Komara, S.H., M.H. yang saat ini sudah pensiun Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2020.
- 5) Kolonel Chk (K) Roza Maimun, S.H., M.H. yang saat ini sudah pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2020.



- 6) Letkol Chk M Mansyur, SH yang saat ini sudah pensiun Terhitung mulai tanggal 01 September 2020.
- 7) PNS Juminem. yang saat ini sudah pensin Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020.
- 8) Kolonel Chk Warsono, S.H., M.H. yang saat ini sudah pensin Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020.
- 9) PNS Setiadi yang saat ini sudah pensiun Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021.

E) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1	Fit and Proper Test calon Pimpinan Pengadilan Militer	Dirjen Badilmiltun	Jakarta 15 -02-2020	- Kolonel Chk Apel Ginting, S.H.,M.H
2	Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru Bicara Pengadila	Litbang Diklat Kumdil Bogor	9 s.d. 21 Maret 2020	- Kolonel Chk Warsono, S.H.,M.H
3	Sidang Pleno Istimewa Tahunan 2019 .	Jakarta	25 s.d. 26 Pebruari 2020,	- Brigjen TNI Hulwabni, S.H.,M.H - Letkol Sus Abuzar Hafari, S.H.,M.H
4	Bimtek SIPP	Dirjen Badilmiltun	11 s.d 13-03-2020	- Serka Amrustian, S.H - Amanda Rosaline Fajar sari, S.H
5	seleksi Assesment Center Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker 11 s.d. 19 Juni 2020	-Kolonel Chk (K) Faridah faisal. S.H.,M.H.
6	Teknik Penyusunan Putusan Pengadilan	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker 13/7/2020	- Kolonel Chk Marwan Suliandi, S.H.,M.H

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020



1	2	3	4	5
7	Pelatihan Plasement Test LIA	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Satker 13/7/2020	- Letkol Chk Ata Wijaya, S.H.,M.H - Kapten Chk Tamrin, S.H.
8	Bintek Perkara Terorisme bagi hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI	15/10/2020	- Kolonel Chk Warsono, S.H.,M.H
9	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf di bidang Pemberkasan dalam rangka tertib Administrasi	Balitbang Diklat Kumdil MARI	15/10/2020	- Serka Ali Fatkul Rahman - PNS Setiadi - PNS M Gufron
10	Kegiatan Pelatihan Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop	Balitbang Diklatkumdil MARI	Satker, 10 Agustus s/d 14 Agustus 2020	- Serka Nanang Candra T, S,
11	Undangan Peresmian Gedung Kantor Pengadilan Terpadu	Pengadilan Militer III-18 Manado	Manado 19/10/2020	- Brigjen TNI Hulwani, S.H.,M.H
12	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf dalam Penyelesaian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 21 s.d 23 Oktober 2020	- Kapten Chk Tamrin, S.H. - PNS Setiadi - PNS M Gufron
13	Undangan Koordinasi dan Konsultasi " Dugaan Pelanggaran HAM/Permasalahan HAM"	Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Surabaya	22 Oktober 2020	- Letkol Chk Ata Wijaya, S.H.,M.H. - Serka Amrustian, S.H
14	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia	Balitbang Kumdil MARI	Tahap 1 6 s.d 13 Nov 2020 Tahap 2, 16 s.d 27 Nov 2020	- Kapten Chk Tamrin, S.H
15	Bimtek Temu Wicara Virtual II	Balitbang Kumdil MARI	Satker 07 s.d 10 September 2020	- Kolonel Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H - Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H



1	2	3	4	5
16	Bintek 'Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	Balitbang Kumdil MARI	Hotel Wyndham Surabaya 30 Nopember s.d 4 Desember 2020	- Kolonel Chk (K) Faridah faisal, S.H.,M.H - Kolonel Chk Bambang Indrawan, S.H.,M.H.
17	Undangan Rakor Ditjen Badilmiltun	Ditjen Badilmiltun	Hotel Grand Mercure Harnoni Jakarta 2 s.d 4 Desember 2020	- Brigjen TNI Hulwani, S.H.,M.H - Letkol Sus Abuzar Hafari, S.H.,M.H - Letkol Chk Ata Wijaya, S.H,M.H

B. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status Kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2020 SDM berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan rincian 23 (dua puluh tiga) orang Militer (termasuk 1 (satu) orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer I-02 Medan), 9 (sembilan) orang PNS (termasuk 1 orang diperbantukan (BP) dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dan 9 (sembilan) orang PTT.

SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga Teknis dan Non Teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :



Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang + 1 Orang BP
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pelaksana Panmud Pidana	3 Orang + 1 Orang BP
		Pelaksana Panmud Hukum	1 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
		Pelaksana Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Pelaksana Subbag Umum dan Keuangan	5 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

A) DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

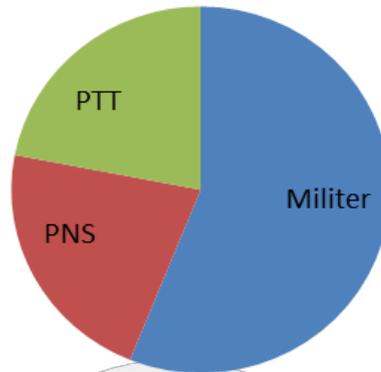
Ditinjau dari status Kepegawaian, Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	23	55,26
2	PNS	9	21,06
3	PTT	9	23,68
Jumlah Total		41	100,00



Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	21	2
2	PNS	2	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		30	11

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	2	3	4
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	3	-
3	Mayor	6	-
4	Kapten	1	-



1	2	3	4
5	Peltu	2	-
6	Pelda	-	-
7	Serma	3	-
8	Serka	1	-
9	Sertu	2	-
10	Kopka	1	-
11	Koptu	1	-
12	Praka	2	-
13	Penata Tk. I	-	1
14	Penata	-	2
15	Penata Muda Tk. I	-	4
16	Penata Muda	-	2
Jumlah Total		23	9

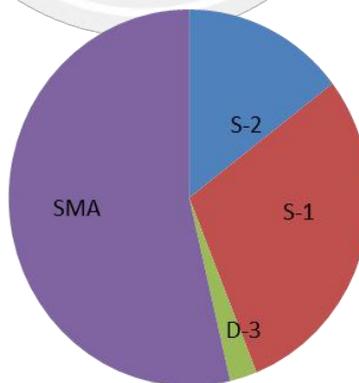
4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	6	-	-	6
2	S-1	7	4	1	12
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	10	4	8	22

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan





Tingkat pendidikan Pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimana sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh Pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	3	1	4	8
2	31 – 40 Tahun	5	2	4	11
3	41 – 50 Tahun	12	6	1	19
4	51 – 58 Tahun	3	-	-	3

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



B) MUTASI

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2020.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475	Panmud Pidana	958/Djmt/Kep/ SK/10/2019 22-10- 2019	22-01- 2020
2	Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP 11080100080282	Pokkimmil Gol VII	296/Djmt/Ratgas/3/2020 11 Maret 2020	13-03-2020
3	Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952	Pokkimmil Gol V	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	22-04-2020
4	Niarti, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 522941	Pokkimmil Gol V	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	24-04-2020
5	Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P	Kepala	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	13-05-2020
6	Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570	Panitera	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12-2020
7	Muhaimin, S.H., M.H. Peltu NRP 21960347690177	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12-2020
8	Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12-2020
9	Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	11-12-2020

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa Pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya



yang mutasi keluar. Selama tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) orang Pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Irwan Idris, S.H. Kapten Chk / 21960348011275	Panmud Pidana	1126/Djmt/Kep/11/2019 29 November 2019	17-01- 2020
2	Ahmad Effendi, S.H.,M.H. Mayor Chk / 11020002860972	Pokkimmil Gol V	296/Djmt/Ratgas/3/2020	04-05- 2020
3	Sugiarto, SH Letkol Chk/ 548431	Kepala	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	13-05- 2020
4	Farma Nihayatul A, S.H. Letkol (K) Chk / 11980035580769	Wakil Kepala	44/KMA/Kep/III/2020 5 Maret 2020	18-05- 2020
5	Suhendra, S.H. Pelda / 21010150930781	Panitera Pengganti Gol IX	44/KMA/Kep/III/2020 11 Maret 2020	26-05- 2020
6	Wahyu Ari Wijaya Praka / 31120174740292	Pelaksana Subbag Kepegawai an	476/SEK/Kp.I/SK/VII/2020 6 Juli 2020	15-09- 2020
7	Rudianto Peltu / 21960347440875	Panitera Pengganti Gol IX	50/Djmt/Kep/ 10/2020 12 Oktober 2020	01-12- 2020

C) PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan Pegawai dalam jabatan tertentu.



1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap Pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang Pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat Reguler, kenaikan pangkat Pilihan dan kenaikan pangkat Anumerta.

Selama tahun 2020 terdapat 6 (enam) orang Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat reguler. Pegawai yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 4(empat) orang personel Militer dan 2 (dua) orang PNS.

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Sugeng Aryanto, S.H. Mayor Chk NRP 11980058680275	Letkol	Kep/303/III/2020 16-03-2020	01-04-2020
2	Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374	Mayor	Kep/303/III/2020 16-03-2020	01-04-2020
3	Mohamad Fauzan Pelda NRP 21960346110176	Peltu	Kep/197-33/III/2020 09-03-2020	01-04-2020
4	Agus Iswanto Serma NRP 21010251261080	Pelda	Kep/197-33/III/2020 09-03-2020	01-04-2020
5	PNS Rijani Widyanti, Penata Gol Ruang III/c	Penata Muda Tk.1 / III/d	Miltama/29/KP.1/III/2020 30-03-2020	01-04-2020
6	Fransisca Angelina Rustiansari, S.H CPNS Penata Muda - III/a	PNS Penata Muda - III/a	03/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 28-02-2020	01-04-2020

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena Pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu Struktur Organisasi, dalam tahun 2020 tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, .



D) PENSUN

Pada tahun 2020 tidak ada Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencapai usia pensiun.

E) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain Diklat, termasuk pula didalamnya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi Pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti Biklat, bimtek atau Sosialisasi. Beberapa Diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.10 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/PMK.02/2019	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 29-01-2020	- Ainur Rofiq, S.E. PNS III/c - Setijo Utomo PNS III/b - Serma Slamet
2	Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/PMK.02/2019	DJPb Prov Jatim	Surabaya, 29-01-2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
3	Sosialisasi langkah-langkah awal TA. 2020	KPPN Surabaya II	Surabaya 29-01-2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, PNS III/c - Ainur Rofiq, SE PNS III/c
4	Fit and Proper Test calon Pimpinan Pengadilan Militer Type A dan B	Dirjen Badilmiltun	Jakarta 15 -02-2020	- Letkol Sus Niarti, SH,MH. - Letkol Chk IGM Suryawan, SH.MH.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	2	3	4	5
5	Fit and Proper Test calon Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi	Dirjen Badilmiltun	Jakarta 27 -02-2020	- Kolonel Laut (KH) Asep Ridwan Hasyim, SH, M.Si, MH
6	Sosialisasi IKPA Tahun 2020	KPPN Surabaya II	Surabaya, 25-02-2020	- Setijo Utomo PNS III/b
7	Sosialisasi PMK Nomor 210/PMK.02/PMK.02/2019	DJPb Prov Jatim	Surabaya, 25-02-2020	Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
8	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 25-02-2020	- Ainur Rofiq, S.E. PNS III/c - Setijo Utomo PNS III/b
9	Bimtek SIPP	Dirjen Badilmiltun	Yogyakarta 11 s.d 13-03-2020	- Sertu Aji Wibayu - Fransisca Angelia Rustiansari, SH. CPNS III/a
10	Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Risiko gelombang I dan II Tahun 2020	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Satker Gel. I 06-05-2020 s.d 07-06-2020. Gel. II. 08-06-2020 s.d. 03-07-2020	- Mayor Chk Khairudin, SH - Mayor Chk Purwadi, SH
11	Workshop jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim di Komisi Yudisial	Komisi Yudisial RI	Satker 1,2 Juli 2020	- Mayor Chk Johannes S Taruk, SH. MH.
12	Pelatihan Webinar Menulis Laporan Efektif dari Tempat Tugas.	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 13, 14 Juli 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
13	Sosialisasi Wajib Pajak Instansi Pemerintah	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara	Satker, 09-07-2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c
14	Pelatihan Online dari tempat tugas English Effective	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 16 s.d 24 -07- 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si PNS III/c - Ainur Rofiq, SE PNS III/c
15	Pelatihan Teknis Fungsional Penanganan Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker Tahap1, 20 s.d. 24 -07-2020 Tahap 2, 27 -07-2020 s.d. 6-08-2020 Tahap 3, 9 s.d. 15-08-2020	- Letkol Chk Sugeng Aryanto, SH



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	2	3	4	5
16	Bimbingan Teknis Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker 10 s.d. 13-08-2020	- Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH. - Mayor Chk Ahmad Effendi, SH, MH.
17	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi Hakim Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Tahap 1, 27-07-2020 s.d, 08-08-2020 Tahap 2, 10 s.d. 28-08-2020 Tahap 3, 07 s.d. 11-09-2020	- Letkol Chk (K) Farma Nihayatul A, SH.
18	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "MEMBANGUN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PANITERA MILITER MENUJU PERADILAN MILITER YANG AGUNG "	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Satker, 24 s.d. 27-08-2020	- Pelda Suhendra, SH
19	Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MARI.	Tahap 1, 28-08-2020 s.d, 03-09-2020 Tahap 2, 07 s.d. 16-09-2020 Tahap 3, 17 s.d. 18-09-2020	- Letkol Chk (K) Farma Nihayatul A, SH. - Letkol Chk IGM Suryawan, SH, MH. - Mayor Chk Ahmad Effendi, SH, MH.
20	Pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	Balitbang Kumdil MARI	Satker - 04 s.d 11 -09-2020	- Letkol CHK (K) Farma Nihayatul A, S.H.
21	Bimtek Hakim Peradilan Militer "Kekuatan alat bukti keterangan Saksi dalam pemeriksaan teleconference"	Dirjen Badilmiltun MARI	Satker 07 s.d 10 September 2020	- Kolonel Chk Sugiarto, SH - Letkol CHK (K) Farma Nihayatul A, S.H.
22	Seleksi Susjab Kimmil	Kodiklat TNI Serpong	23 s.d. 30-08-2020	- Mayor Chk Tatang Sujana K, SH, MH. - Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH, MH. - Mayor Chk Purwadi, SH.
23	Susdjab Kimmil TA. 2020	Kodiklat TNI Serpong	28-08-2020 s,d, 26-11-2020	- Mayor Chk Johannes S. Taruk, SH, MH.
24	Bimtek Panitera "Penguatan User SIPP Kepaniteraan terhadap Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer "	Balitbang Kumdil MARI	Satker 22 -09-2020 s.d. 1-10-2020	- Kapten Chk Irwan Idris, SH - Peltu Moch. Fauzan - Pelda Agus Iswanto



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	2	3	4	5
25	kegiatan Seminar Focus Grup Discussion (FGD)	Balitbang Kumdil MARI	Satker 22 -09- 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Chk Sugeng Aryanto, SH. - Mayor Chk Tatang Sujana, SH. MH. - Mayor Chk Mustofa, SH, MH.
26	Seminar Focus Grup Discussion (FGD), "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Contempt of Court";	Balitbang Kumdil MARI	Satker 24 -09- 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Chk Khairudin, SH - Mayor Chk Purwadi, SH
27	Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan tema "Kedudukan Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Militer "	Balitbang Kumdil MARI	Satker 12 s.d. 15-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol CHK (K) Farma Nihayatul A, S.H. - Mayor Chk Tatang Sujana K, SH, MH.
28	Bimtek ZI bagi Pimpinan "Membangun Integritas dan Profesionalisme Para Tenaga Teknis dan Pelaksana Peradilan Militer dan Peradilan".	Balitbang Kumdil MARI	Satker 6 s.d. 9-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kolonel Chk Sugiarto, SH.
29	Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer seluruh Indonesia	Balitbang Kumdil MARI	Tahap 1, 16 s.d.22 Okt 2020. Tahap 2, 26 Okt s.d. 09 Nov 2020 Tahap 3, 10 s.d. 12 Nov 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol IGM. Made Suryawan, SH, MH.
30	Sosialisasi Direktori Putusan Mahkamah Agung bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding secara Virtual	Balitbang Kumdil MARI	9 Nov 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Fransisca Angelia R, SH. PNS. III/a - Sertu Akhmad Aji Wibayu.
31	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia	Balitbang Kumdil MARI	Tahap 1 6 s.d 13 Nov 2020 Tahap 2, 16 s.d 27 Nov 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Peltu Moch. Fauzan - Pelda Agus Iswanto - Pelda Suhendra, SH
32	Seleksi calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) secara online Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	PKA tgl. 17 Nov 2020 PKP Tgl 19 Nov 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS. III/c. - Setijo Utomo, PNS III/b - Melanti Puspara, SE, PNS III/b - Atim Sumarni, PNS III/b - Ratih Dina Aguatin Pns. III/b



1	2	3	4	5
33	Test Bahasa Inggris bagi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) secara online Tahun 2021	Balitbang Kumdil MARI	PKP Tgl 24 Nov 2020	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS. III/c.
34	Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan Perkara	Balitbang Kumdil MARI	Surabaya, 30 Nov 2020 sd 4 Desember 2020	- Letkol Chk (K) Farma Nihayatul A, SH. - Letkol IGM Suryawan, SH, MH. - Mayor Chk Ahmad Effendi, SH, MH. - Mayor Chk Tatang Sujana K, SH.MH.

B. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudisial.

Pada Tahun Anggaran 2020 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 37 (tiga Puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 22 (dua puluh satu) orang Militer dan 9 (sembilan) orang PNS serta (enam) orang tenaga PPNPN / Honorer.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Riza Fadilah, S.H	Letkol Laut (KH)	13149/P	Kepala
2	F.X Agus Sulistio, S.H	Mayor Chk	11030043601281	Wakil
3	Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.	Mayor Chk	1100020006580974	Hakim
4	Hendro Cahyono, S.H.,M.H	Mayor Chk	11040032130782	Hakim
5	Suparlan, S.H	Mayor Chk	21940096310472	Hakim
6	Kholip, S.H	Kapten Sus	519169	Panitera



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	2	3	4	5
7	Jasman, S.H	Kapten Chk	11110038420787	Sekretaris
8	Sardi	III/d	196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
9	Gatot Suprpto	III/d	196805031991031009	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
10	Suaibatul Islamiah	III/c	196504011989032004	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor
11	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Pengadministrasi Register Perkara
12	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Pengadministrasi Register Perkara
13	Amin	III/b	196712311992031024	Pemelihara Sarana Dan Prasarana
14	Sriyani	III/b	197210041994032001	Pengadministrasi Keuangan
15	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
16	Puguh Pambudi Susilo	Peltu	522415	Panitera Pengganti
17	Achmad Faizal	Pelda	1940155520273	Panitera Pengganti
18	Budi Utomo	Serma	321010116541280	Pengelola Perkara
19	Dodik Sugeng Prasetyo	Serma	531770	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali
20	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Bendahara
21	Febi Ramona	Serka	31940520920274	Pengadministrasi Register Perkara
22	Yatiman	II/c	196706241989031002	Pengadministrasi Umum
23	Mulyono	Serka	31970176050877	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)
24	Yohanes Hartono	Sertu	31960641781076	Pengadministrasi Hukum
25	Adi Prakosa	Sertu	21130071790694	Pengadministrasi Penerimaan
26	Agus Setiawan	Koptu	96984	Teknisi Sarana Prasarana
27	Badruzzaman	Koptu	31000591731079	Pengadministrasi Perpustakaan
28	Tommy Hariyanto	Koptu	99830	Pengadministrasi Persuratan
29	Catur Yulianto	Kopda	529007	Pengadministrasi Teknisi Pemeriksaan dan Perawatan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	2	3	4	5
30	M. Afiq Nurzali	Kopda	31090486560390	Pengadministrasi Penanganan Perkara
31	Rendy A.P,A. Amd	Il/c	199202042019031004	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
32	Susriyani, SH.	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
33	Ali Maskur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
34	Dimas Wahyu Nugroho	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
35	Felicianus Suwanto	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
36.	Dani Nani Nur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
37.	Kadir	PPNPN	-	Staf kepegawaian dan Ortala

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 22 (dua puluh dua) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	2	3
1	HAKIM MILITER	Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, S.H NRP.13149/P
2		Mayor Chk F.X Agus Sulistio, S.H NRP.11030043601281
3		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, S.H. NRP. 11020006580974
4		Mayor Chk Hendro Cahyono, S.H.,M.H NRP 11040032130782
5		Mayor Chk Suparlan, S.H NRP. 21940096310472
6	PANITERA	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	2	3
7	SEKRETARIS	Kapten Chk Jasman, S.H NRP. 11110038420787
8	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654
9		Peltu Puguh Pambudi Susilo NRP. 522415
10		Pelda Ahmad Faisal, NRP. 319401555 20273
11	PROVOST	Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
12		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531 770
13		Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806
14		Serka Febi Ramona NRP. 319405209 20274
15		Sertu Yohanes Hartono, NRP. 3196064 1781076
16		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
17		Sertu Adi Prakosa NRP. 21130071790694
18		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
19		Koptu Badruzzaman, NRP. 310005917 31079
20		Koptu Tomy Hariyanto NRP. 99830
21		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007
22	Kopda M. Afiq. N NRP.31090486560390	

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Ditjen Badilmiltun MARI dan Balitbang Diklat Kumdil MARI maupun Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.



Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan Personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Susriyani, S.H dan Dimas Wahyu Nugroho, Mengikuti pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Tahun Anggaran 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mendukung Program Reformas dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-MIL.02/ST-12/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
2. M. Arif Sumarsono, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974, Mengikuti kegiatan *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi dan Pimpinan Pengadilan Militer Type B sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin-22/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
3. Rendy Ardiha Pradana, A Md, II/c NIP. 199202042019031004 dan Susriyani, S.H mengikuti Bimbingan Teknis SIPP dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/SP- 25 / III /2020 tanggal 04 Maret 2020.
4. Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169 mengikuti pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I Tahun 2020 pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang bekerjasama dengan PPM Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin-45/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.
5. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 untuk mengikuti kegiatan Microlearning Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 ST-55/I-VI/ 2020 tanggal 18 Juni 2020.



6. M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 untuk melaksanakan pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Angkatan XXI bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc Tingkat pertama sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -40/IVI/ 2020 tanggal 24 April 2020.
7. M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXI Bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat Pertama dan Banding seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 Mil 02 / Sprin - 50 / VI / 2019 tanggal 04 Juni 2020 secara online.
8. Riza Fadilah, S.H Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P, Hendro Cahjono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11040032130782, Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169, Jasman, S.,H Kapten Chk NRP. 1110038420787, Gatot Suprpto, III/d NIP. 196805031991031009 dan Achmad Faisal, Pelda NRP. 31940155520273 untuk mengikuti kegiatan untuk Pelatihan Online sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / ST- 57 / VI / 2020 tanggal 30 Juni 2020.
9. Riza Fadilah, S.H Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P, Kholip, S.H Kapten Sus NRP.519169 dan Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP. 522415 mengikuti pelatiha online dari tempat tugas dengan link sebagai berikut : Kompetensi Kehumasan Pengadilan semester II, Webinar Seminar online semester II dan Analisis Beban Kerja Pengadilan Surat Tugas Kadilmil III-13 Nomor W3. MIL.02/ST-60/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
10. F.X Agus Sulistio, S.H Mayor Chk NRP. 11030043601281 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kimmil dengan Tema Kompetensi dan Indepensi Kimmil dalam Menyelsaikan Perkara LGBT di lingkungan Peradilan Mlliter sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Nomor W3 MIL 02 / ST – 62/ VIII / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 secara online.



11. Achmad Faisal, Pelda NRP. 319340155520273 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema “Membangun Integritas dan Profesionalisme Panitera Militer Menuju Peradilan Militer yang Agung” sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Nomor W3 MIL 02 / ST – 66/ VIII / 2020 tanggal 19 Agustus 2020 secara online.
12. F.X Agus Sulistio, S.H Mayor Chk NRP. 11030043601281 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan Tema “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan Melalui Teleconference” Sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.MIL.02/ST-71/IXI/2020 tanggal 2 September 2020.
13. Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169 dan Achmad Faizal, Pelda NRP. 31940155520273 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Panitera dengan Tema “Penguatan User SIPP Kepaniteraan terhadap Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer” sesuai Surat Tugas Kadilmil Nomor W3.Mil.02/ST-75/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

>> **Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial**

Jumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, S.H NRP. 13149/P
2	Waka	Mayor Chk F.X Agus sulistio S.H.,M.H NRP. 11030043601281
3	Panitera	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
4	Sekretaris	Kapten Chk Jasman, S.H NRP. 11110038420787
5	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/d 196404241989031003
6	Kasubbag Umum dan Keuangan	Gatot Suprpto, III/d NIP. 196805031991031009



2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Staf	Suaibatul Islamiah III/c NIP. 196504241989032004
2		Sri Luswati III/b NIP 196803281989032004
3		Sugeng Biyono III/b NIP 196810101991031003
4		Amin III/b NIP 196712311992031024
5.		Sriyani III/b NIP 197210041994032001
6.		Yatiman II/c NIP.196706241989031002

3. PPNPN

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNPN	Susriyani, SH.
2		Ali Maskur
3		Dimas Wahyu Nugroho
4		Felicianus Suwanto
5		Dani Nani Nur
6		Kadir

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudisial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnis yudisial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Jasman, S.H Kapten Chk NRP. 11110038420787 mengikuti Diklapa II Cab TNI AD TA 2020 sesuai Surat Perintah Nomor : W3.Mil.02/Sprin-65/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 dan Hendro Cahyono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11040032130782 sesuai dengan Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun W3 MIL 02 / ST- 70 / VIII / 2020 tanggal 27 Agustus 2020.



3. Riza Fadilah, S.H Letnan Kolonel laut (KH) NRP. 13149/P melaksanakan pelatihan online kebahagiaan Kerja di Pengadilan (Happines at Work) sesuai Surat Tugas Kadilmil Nomor W3.Mil.02/ST-73/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
4. Sugeng Biyono, III/b NIP. 196810101991031003 mengikuti kegiatan Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III Sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.MIL.02/ST-168/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

A) MUTASI

- a. Pindah tempat tugas keluar dari lingkungan Dilmil III-13 Madiun:
 1. Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H Letnan Kolonel Sus NRP. 522940 selaku Kadilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Kadilmil I-04 Palembang berdasarkan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/Kep/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 2. Agustono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 21940080960873 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/Kep/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 3. Kholip, S.H Kapten Sus NRP.519169 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 764/Djmt.02/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pindah tugas menjadi Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
 4. Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP. 522415 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 764/Djmt.02/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pindah tugas menjadi Penitera Pengganti Gol IX Perngadilan Militer III-14 Denpasar.



- b. Pindah tempat tugas masuk ke Dilmil III-13 Madiun.
1. Riza Fadilah, S.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13149/P berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/Kep/III/2020 tentang pelaksanaan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer yaitu dari Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar menjadi Kadilmil III-13 Madiun terhitung mulai tanggal 13 Maret 2020.
 2. F.X Agus Sulistio, S.H Mayor Chk NRP.111030043601281 berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Sprin/70/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang pelaksanaan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer yaitu dari Anggota Pokkimmil Gol. VI Dilmil I-06 Banjarmasin menjadi Wakil kepala pada Pengadilan Militer III-13 Madiun terhitung mulai tanggal 5 Mei 2020.
 3. Badruzzaman, Koptu NRP. 31000591731079 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 584 / SEK / KP.I/SK/VIII/2020 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil / Prajurit TNI Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B) PROMOSI

- a. Promosi Kenaikan Pangkat Personil TNI :
- 1) Kenaikan Pangkat Reguler ada 3 (Tiga) personil TNI yaitu :
 - (1) Achmad Faizal, Pelda, NRP. 31940155520273 naik satu tingkat lebih tinggi dari Serma menjadi Pelda sesuai Keputusan Kasad Nomor Kep/197/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.



- (2) Suparlan, Mayor Chk NRP.21940096310472 naik satu tingkat lebih tinggi dari Kapten menjadi Mayor sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/734/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
- (3) Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP.522415 naik satu tingkat lebih tinggi dari Pelda menjadi Peltu sesuai Kep/290-TIII/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

2) Kenaikan Pangkat Pilihan :

- Tidak ada.

3) Kenaikan Pangkat Pengabdian / Penghargaan:

- Tidak ada.

4) Kenaikan Golongan

- Tidak ada.

b. Promosi Kenaikan Pangkat Personil PNS :

1) Kenaikan Pangkat Reguler tidak ada.

2) Kenaikan pangkat pilihan :

- (1) Sudah terealisasi Kepres/SK/Skep Kenaikan pangkat:
Tidak ada.
- (2) Usul Kenaikan Pilihan per 1 April 2020 : tidak ada.
- (3) Usul Kenaikan Pilihan per 1 Oktober 2020 : tidak ada.
- (4) Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan :
- (5) Sudah terealisasi Kepres / SK / Skep Kenaikan pangkat
: Tidak ada.
- (6) Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan:
Tidak ada.



4). Pengisian Jabatan Struktural.

Selama tahun 2020, ASN Sriyani diajukan jabatan Struktural yaitu jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan namun sampai sekarang tidak terealisasi sesuai surat usulan Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.Mil.02/KP.04./08/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.

C) PENSUN :

- Personil TNI : Tidak ada.
- Personil PNS : Tidak ada

D) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

1. Hendro Cahyono, S.H.,M.H Mayor Chk CHK NRP. 11040032130782 melaksanakan Susjabkimmil TNI Angkatan XX TA 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin-64/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. Jasman S.H Kapten Chk NRP.11110038420787 Melaksanakan Diklapa II Cab TNI AD TA 2020 Perintah Kasad Nomor Sprin/2556/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-Mil02/Sprin-65/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
3. Moch. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Fungsioanal Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Seluruh Indonesia sesuai Surat Surat Pemanggilan Peserta pelatihan oleh Kepala badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Nomor 968/Bld/S/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-Mil02/ST-94/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.



4. Sugeng Biyono, III/b NIP. 196810101991031003 mengikuti kegiatan Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III sesuai Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III tahun 2020 dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645/Bld/S/8/2020 tanggal Agustus 2020 dan surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/139/Sprin/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

C. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), dengan rincian 15 (lima belas) orang Militer, 12 (dua belas) orang PNS dan 9 (sembilan) orang PTT.

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, terutama untuk personel Militer dan PNS, tersusun atas tenaga Teknis dan Non Teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sedangkan untuk PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi. Secara rinci, SDM di Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditunjukkan dalam tabel berikut.



Tabel III.1 Data Pegawai

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
I.	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	2 orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 orang
		Staf Panmud Pidana	2 orang
		Staf Panmud Hukum	1 Orang
II.	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Kepegawaian	2 orang
		Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	3 orang
		Staf Subbag Keuangan	2 orang
		Staf Subbag Umum	5 orang
III.	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	1 Orang
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong
IV.	Tenaga Kontrak	Pramubakti	5 Orang
		Pengemudi	Kosong
		Satpam	4 Orang



A) DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Ditinjau dari status Kepegawaian, Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase(%)
1	Militer	15	41.67
2	PNS	12	33,33
3	PTT	9	25
Jumlah Total		36	100.00

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Militer	14	1
2.	PN	7	5
3.	PTT	8	1
Jumlah		29	7

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :



Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1.	Letnan Kolonel	2	
2.	Mayor	3	
3.	Lettu	1	
4.	Peltu	1	
5.	Pelda	1	
6.	Serma	2	
7.	Serka	1	
8.	Sertu	1	
9.	Kopka	1	
10.	Koptu	1	
10.	Praka	1	
12.	Pembina Tk I		1
13.	Penata Tk I		2
14.	Penata		3
15.	Penata Muda Tk I		4
16.	Penata Muda		1
17.	Pengmud Tk I		1
Jumlah total		15	12

4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terdiri Personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1.	S-2	3	2	-	5
2.	S-1	9	7	2	18
3.	D-3	-	1	-	1



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

4.	SMA	3	2	7	12
Jumlah total		15	12	9	36

Tingkat pendidikan Pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimana sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kpegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	0	1	5	6
2	31 - 40 Tahun	8	4	1	13
3	41 – 50 Tahun	7	3	2	12
4	51 – 58 Tahun	0	4	1	5
Jumlah Total		15	12	9	36

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

B) MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan Pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para Pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang Pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2020 terdapat 6 (enam) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2020.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor & tanggal Surat	TMT
1.	Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171	Kadilmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
2.	Riza Fadilah, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP . 13149/P	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
3.	Rony Suryandoko, S.IP.,S.H., M.Han Letkol Chk NRP 11000045041178	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
4.	Edfan Hendrarto, S.H. Letkol Chk NRP 11000045870579	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

5.	Bagus Partha Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 16762/P	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
6.	Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973	Panmud Pidana	Sprin/680/KP.04.5/XII/2 019	26-12-2019

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa Pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang mutasi keluar. Selama tahun 2020 terdapat 6 (enam) Pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor & tanggal Surat	TMT
1	2	3	4	5
1.	Arwin Makal, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570	Kadilmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
2.	Niarti, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 522941	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
3.	Agustono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940080960873	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
4.	K. G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	13-3-2020
5.	Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681	Panmud Pidana	Sprin/680/KP.04.5/XII/ 2019	26-12- 2019
6.	Saripuddin Sertu NRP 31990588050179	Pengadminis -trasi Keuangan	Sprin/395/KP.04.5/IX/ 2020	16-9-2020



C) PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas Personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap Pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang Pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat Reguler, kenaikan pangkat Pilihan dan kenaikan pangkat Anumerta.

Selama tahun 2020, terdapat 7 (tujuh) orang Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerima kenaikan pangkat, dimana seluruhnya menerima kenaikan pangkat reguler 6 (enam) orang personel Militer dan 1(satu) orang personil PNS. Kenaikan pangkat ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No.	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor & tanggal Surat	TMT
1.	Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681	Panmud	Kep/222/III/2020	1-4-2020
2.	Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP. 21970306830676	Panitera Pengganti	Kep/197-33/III/2020	1-4-2020



3.	Kadek Subrata, S.H. Pelda NRP. 21010240610582	Panitera Pengganti	Kep/197-33/III/2020	1-4-2020
4.	I Nyoman Dharma Setyawan, S.H. Serma NRP 21050263690586	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Kep/197-33/III/2020	1-4-2020
5.	Purwodiyanto, S.H. Serma NRP .21050109590486	Pengolah Data Keberatan dan Banding	Kep/197-33/III/2020	1-4-2020
6.	I Wayan Kusuma Yuda Kopka NRP 31980340130576	Komandan Petugas Keamanan	Kep/197-33/III/2020	1-4-2020
7.	Ketut Suriani, SH NIP 197307261999032003	Analisis Tata Laksana	62/Kp.I/SK/IX/2020	1-10-2020

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena Pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu Struktur Organisasi, dalam tahun 2020 tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, .

D) PENSIUN

Pensiun berlaku bagi Pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun.

Pada tahun 2020 tidak ada Pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang mencapai usia pensiun.

E) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain Diklat, termasuk pula didalamnya Bimbingan Teknis (bimtek) dan Sosialisasi.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai badan peradilan Tingkat Pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat, namun Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan mendukung dan memfasilitasi Pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti Diklat, Bimtek atau Sosialisasi. Beberapa Diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.10 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Susjabkimmil	Mabes TNI	23 Agustus 2020 Di Kodiklat TNI	Mayor Chk Reza Yanuar, S.E., S.H.
2.	Pelatihan online basic video editing	Balitbang	24-28 Agustus 2020	Serma I Nym Dharma S., S.H.
3.	Bimtek Panitera	Kadilmiltama	Online 24-27 Agustus 2020	Pelda I Kd Subrata, S.H.
4.	Suspatera	Mabes TNI	Kodiklat TNI 26 Agustus s.d 25 November 2020	Lettu Chk Gunadi, S.H.
5.	Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer	Balitbang	Online 28 Agustus s.d 18 September 2020	Letkol Sus Niarti, S.H., M.H. dan Mayor Chk Raegen, S.H.
6.	Pelatihan online PKP Gel III	Balitbang	Online 31 Agustus s.d 4 Desember 2020	ASN AA Istri Intan Prabhawati, S.E. dan IGA Ayu Nyoman Giri Sundari, S.E.
7.	Bimtek Hakim Militer	Badilmiltun	Online 7 s.d 10 September 2020	Letkol Chk Arwin Makal, S.H., M.H. dan Mayor Chk Agustono, S.H., M.H.
8.	Bimtek Panitera Militer	Badilmiltun	Online 28 September s.d 1 Oktober 2020	Mayor Chk Reza Yanuar, S.E., S.H. dan Pelda Faried S., S.H.
9.	Bimtek Hakim Militer	Badilmiltun	Online 12 s.d 15 Oktober 2020	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.
10.	Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme	Balitbang	Online 16 Oktober s.d 12 November 2020	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.
11.	Bimtek Panitera Militer	Kadilmiltama	Online 19 s.d 21 Oktober 2020	Peltu Faried Serma Purwo Serka Jana
12.	Pelatihan online bekerja dengan Media	Balitbang	Online 20 s.d 23 Oktober 2020	ASN Katharina
13.	Bimtek Panitera	Kadilmiltama	Online 14 s.d 16 Oktober	Mayor Reza Pelda Kadek



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

14.	Bimtek Panitera	Kadilmiltama	2020 Online 26 s.d 28 Oktober 2020	Subrata Mayor Reza Serma Purwodiyanto PNS Sri Susmawati
15.	Pendidikan Penyetaraan Sesau	Sesau	Bandung 21 Oktober s.d 11 Desember 2020	Letkol Sus Niarti, S.H., M.H.
16.	Pelatihan Online SWOT	Balitbang	Online 12 s.d 14 Oktober 2020	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.
17.	Pelatihan Online SWOT	Balitbang	Online 12 s.d 14 Oktober 2020	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.
18.	Workshop jarak Jauh Peningkatan kapasitas Hakim	Komisi Yudisial	Online 3 s.d 5 November 2020	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.

1	2	3	4	5
19.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti	Balitbang	Online 6 s.d 27 November 2020	Peltu Faried Pelda Kd Subrata
20.	Sosialisasi Direktori Putusan	MARI	Online 9 November 2020	Mayor Reza Serka Jana Nuraga
21	Seminar Focus Group Discussion (FGD)	Puslitbang	Online 5 November 2020	Mayor Reza PNS I Ketut Karda, S.H.
22	Bimtek Panitera Militer	Kadilmiltama	Online 26 s.d 28 Oktober 2020	Mayor Reza Serma Purwodiyanto PNS Sri Susmawati
23	Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan	Dirjen	Online 30 November s.d 4 Desember 2020	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.
24	Temu Wicara Virtual II	Balitbang	Online 1 s.d 3 Desember 2020	Mayor Chk Agustono, S.H., M.H.

D. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Tahun 2020 jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Militer	11
2	ASN	5
3	Honorar	9



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Total	25
-------	----

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-15 Kupang berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan adalah sebagai berikut

1. Berdasarkan Kepangkatan (Militer)

Berdasarkan kepangkatan (Militer) di Pengadilan Militer III-15 Kupang ada beberapa pangkat yang ada, yaitu Letkol sebanyak 1 (satu) orang, Mayor sebanyak 3 (tiga) orang, Kapten sebanyak 1 (satu) orang, Lettu sebanyak 1 (satu) orang, Peltu sebanyak 1 (satu) orang, Serka sebanyak 1 (satu) orang, Sertu sebanyak 1 (satu) orang, Serda sebanyak 1 (satu) orang dan Kopda sebanyak 1 (satu) orang.

Jadi total anggota Militer di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebanyak 11 (sebelas) orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pkt	Letko	Mayor	Kpten	Lettu	Serka	Sertu	Serda	Kopda	Total
JML.	1	3	1	1	1	1	1	1	11

2. Berdasarkan Golongan (PNS)

Berdasarkan golongan di Pengadilan Militer III-15 Kupang ada beberapa golongan yang ada, yaitu III/d sebanyak 1 (satu) orang, III/c sebanyak 1 (satu) orang, III/a sebanyak 3 (tiga) orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gol.	III/d	III/c	III/a	Total
-	1	1	3	7



3. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan di Pengadilan Militer III-15 Kupang ada beberapa tingkat pendidikan yang ada, yaitu S2 sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 10 (sepuluh) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 3 (tiga) orang.

Jadi total anggota berdasarkan pendidikan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebanyak 19 (sembilan belas) orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pendidikan	S2	S1	D3	SMA	TOAL
	2	10	1	3	16

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-15 Kupang sesuai Jabatan masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini:

- Pejabat Struktural

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan
1	Masykur, S.T.,S.H.,M.H.	Letkol Chk/ 11970020230871	Kadilmil
2	Abdu Gani, S.Si., S.H.	Mayor Chk / 11040004250977	Waka Dilmil
3	Asep Hendra A., S.H.	Mayor Chk / 21950078651073	Panitera
4	Andre Jaguar, S.H.	Letda Chk/ 11140028580589	Panmud Hukum
5.	-	-	Panmud Pidana
6.	-	-	Sekretaris
7	Diana R. Laiskodat	ASN III/d 19690131199103200	Kasubag Umum dan Keuangan
8	Saulus Tomeluk	ASN III/c 19640927199 1031004	Kasubag IT dan Pelaporan
9	Delmi B Sabloit, A.Md	ASN III/a 198301262009042001	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- Hakim Militer

No	Nama	Pangkat/NRP	Matra
1	2	3	4
1.	Masykur, S.T.,S.H.,M.H.	Letkol Chk/ 11970020230871	Angkatan Udara
2.	Abdu Gani, S.Si., S.H.	Mayor Chk / 11040004250977	Angkatan Darat
3.	Arief Rachman, S.E., S.H.	Mayor Chk / 11040005990378	Angkatan Darat
4	Samsul Arifin, S.H.	Kapten Chk / 21960369130576	Angkatan Darat

- Staf/Fungsional Umum

- H
o
n
o
r
er

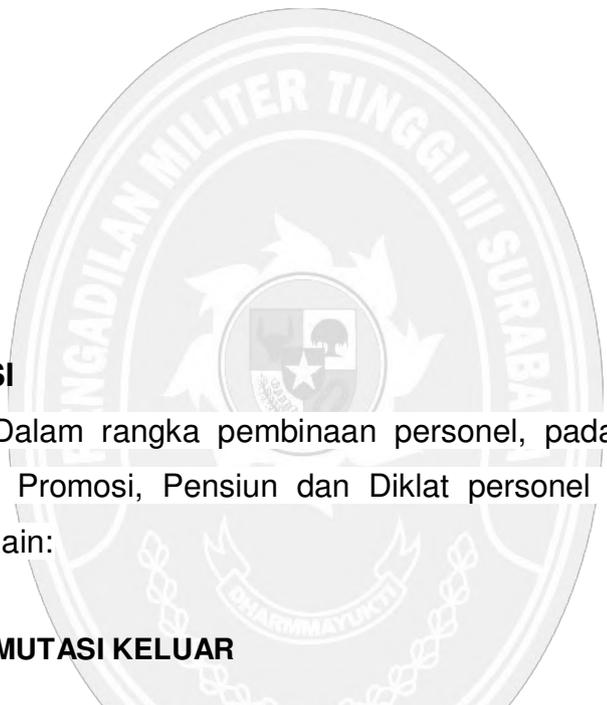
No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan
1	2	3	4
1	Ahmad Imanuddin, S.A.P	ASN III/a 198610212020031004	Analisis Pemberdayaan Manusia Aparatur
2	Marloyati Lado, S.H.	ASN II/c 198710082009122003	Fungsional Umum / Kepegawaian
2	Hendra Dianto, SH	Serka / 31000726061278	Staf Panmud Pidana
3	Hasbi Pasolo, SH	Sertu/ 31000726061278	Staf Panmud Hukum
4	Daud Ena	Serda/ 640525	Staf Umum dan Keuangan
5	Norberto Manek Alo, SH	Kopda/ 31071468740188	Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

No	Nama	Jabatan	Diperbantukan
1	2	3	4
1	Benyamin Giri	Pengemudi	Di Kepaniteraan
2	Desi A. Hingmadi, SH	Pramubakti	Di Umum dan Keuangan
3	Mariance Huwae, SH	Pramubakti	Di Kepaniteraan
4	Jidon A. Balla	Pramubakti	Di IT
5	Jermias J. Bessie	Pramubakti	Di Umum dan Keuangan
6	Marthen Wila Do	Security	Di Umum dan Keuangan
7	Bupelsi E. Tabun	Security	Di Umum dan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

			Keuangan
8	Trymoon Tome	Security	Di Umum dan Keuangan
9	Muchlis A. Achmad	Security	Di Umum dan Keuangan



A) MUTASI

Dalam rangka pembinaan personel, pada tahun 2020 terjadi Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat personel Dilmil III-15 Kupang antara lain:

1. MUTASI KELUAR

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor Skep	TMT	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Letnan Kolonel Sus Mustofa, SH.,MH	Kadilmil III-15 Kupang	Kadilmil I-7 Balikpapan	296/Djmt/Ratgas /3/2020	5-3-2020	Mutasi keluar
2	Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH	Wakadilmil III-15 Kupang	Pokkimmil III-12 Surabaya	296/Djmt/Ratgas /3/2020	5-3-2020	Mutasi keluar
3	Mayor Chk Indra Gunawan, SH.,MH	Pokkimmil III-15 Kupang	Pokkimmil I-4 Palembang	296/Djmt/Ratgas /3/2020	5-3-2020	Mutasi keluar
4	Letda Chk Gunadi, SH	Panmud Hukum	Dilmil III-14 Denpasar	Sprin/680/KP.04. 5/XII/2019	26-12-2019	Mutasi keluar



2. MUTASI MASUK

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor Skep	TMT	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Letnan Kolonel Chk Masykur, ST.,SH.,MH	Pokkimmil II-9 Bandung	Kadilmil III-15 Kupang	296/Djmt/Ratgas/3/2020	5-3-2020	Mutasi masuk
2	Mayor Chk Abdul Gani, SSi., SH	Pokkimmil II-10 Semarang	Wakadilmil III-15 Kupang	296/Djmt/Ratgas/3/2020	5-3-2020	Mutasi masuk
3	Lettu Chk Andre Jaguar, SH	Panmud Hukum	Dilmil III-15 Kupang	Sprin/680/KP.04.5/XII/2019	26-12-2019	Mutasi masuk
4	Peltu Muhaimin, SH., MH	Panitera Pengganti	Dilmil III-15 Kupang	50/DJMT/Kep/10/2020	12-10-2020	Mutasi masuk

B) ROMOSI

1. Kenaikan pangkat atas nama ASN Agustina Hawu, S.E dari Penata Tk. I III/d menjadi Pembina IV/a
2. Kenaikan pangkat atas nama ASN Diana R. Laiskodat dari Penata III/c menjadi Penata Tk. I III/d
3. Kenaikan pangkat atas nama ASN Marloyati Lado, S.H. dari Pengatur II/c menjadi Penata Muda III/a

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini :

No	Nama	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Nomor Skep	TMT
1.	Agustina Hawu, S.E.	Penata Tk. I III/d	Pembina IVa	137/SEK/KP.I/SK/III/2020	1-4-2020
2.	Diana R. Laiskodat	Penata III/c	Penata Tk. I III/d	29/Kp.I/SK/III/2020	1-4-2020
3.	Marloyati Lado, S.H.	Pengatur II/c	Penata Muda III/a	29/Kp.I/SK/III/2020	1-4-2020

**B)
ENS
IUN**

Pada tahun 2020 pada Pengadilan Militer III-15 Kupang terdapat 1 (satu) anggota yang pensiun yaitu ASN Agustina Hawu, dan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

2 (dua) anggota yang meninggal yaitu ASN Paulus A. N. Lopu, Kopka Pedro Ximenes.

C) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tahun 2020 pada Pengadilan Militer III-15 Kupang ada beberapa anggota yang mengikuti Diklat, diantaranya

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Nomor Skep	TMT
1	2	3	4	5	6
1	PNS Marloyati Lado, S.H	Bendahara	Bimtek Perpajakan	W3.Mil04/11/Sprin/III/2020	04/3/2020
2	Mayor Chk Asep Hendra, S.H	Panitera	Bimtek Manajemen Resiko	W3.Mil04/19/Sprin/V/2020	05/5/2020
3	Mayor Chk Abdul Gani, S.Si.,S.H.	Waka	Bimtek Kompetensi dan Indepedensi Hakim Militer dalam Menyelesaikan Perkara LGBT	W3.Mil04/32/Sprin/VIII/2020	07/8/2020
4	Letkol Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H.	Kadilmil	Bimtek Funsional Tata Usaha Militer bagi Hakim Militer Seluruh Indonesia	W3.Mil04/35/Sprin/VII/2020	27/8/2020
5	Kapten Chk Samsul Arifin, S.H.	Hakim	Bimtek Teknis Hakim” Kekuatan Alat Bukti keterangan Saksi.	W3.Mil.04/38/Sprin/VIII/2020	31/8/2020
6	Letkol Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H.	Kadilmil	Bimtek Zona Integritas	W3.Mil04/44/Sprin/X/2020	05/10/2020
7	Letkol Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H.	Kadilmil	Bimtek Hakim “Kedudukan Barang Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Militer	W3.Mil.04/45/Sprin/X/2020	12/10/2020
8	Letkol Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H. Mayor Chk Abdul Gani, S.Si.,S.H. Mayor Chk Arief Rachman,	Kadilmil Waka Hakim Hakim	Bimtek dan Administrasi Yudisial Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	W3.Mil.04/46/Sprin/X/2020	04/9/2020



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

	S.E.,S.H. Kapten Chk Samsul Arifin, S.H.				
9	Mayor Chk Arief Rachma, S.E.,S.H	Hakim	Bimtek Perkara Terorisme bagi Hakim lingkungan Umum dan Militer	W3.Mil.04/49/Spri n/X/2020	21/9/2020 0
10	Serka Hendra Dianto, S.H.	Pengelola h Perkara Peradilan	Bimtek Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf dibidang Pemberkasan	W3.Mil.04/51/Spri n/XII/2020	08/12/2020 20
11	Letkol Chk Masykur, S.T.,S.H.,M.H. Mayor Chk Arief Rachman, S.E.,S.H. Mayor Chk asepe Hendra, S.H. Kapten Chk Samsul Arifin, S.H.	Kadilmil Waka Panitera Hakim	Bimtek Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI di Kupang.	W3.Mil.04/60/Spri n/XI/2020	10/11/2020 20
12	Mayor Chk Abdul Gani, S.Si.,S.H. Mayor Chk Arif Rachman S.E.,S.H Kapten Chk Samsul Arifin, S.H	Waka Hakim Hakim	Bimtek Pernyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	W3.Mil.04/61/Spri n/XI/2020	27/11/2020 20
13	Mayor Chk Abdul Gani, S.Si., S.H dan Kapten Chk Samsul Arifin, S.H.	Waka Hakim	Bimtek Jarak jauh Peningkatan Kapasitas Hakim (lanjutan) di Lingkungan Peradilan Militer	W3.Mil.04/63/Spri n/XII/2020	8/12/2020 0

E. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tahun 2020 berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status Kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), dengan rincian 16 (enam belas) orang personel Militer, 12 (dua belas) orang personel PNS dan 8 (delapan) orang PPNNP.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-16 Makassar diklasifikasikan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf. Sedangkan untuk PPNPN belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNPN dalam struktur organisasi. Secara rinci, SDM di Pengadilan Militer III-16 Makassar ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel III.1. Data Klasifikasi Pegawai

NO	KLASIFIKASI	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3	4
I	Struktural	Kepala	1
		Wakil Kepala	1
		Panitera	1
		Sekretaris	1
		Panitera Muda Pidana	1
		Panitera Muda Hukum	0
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1
		Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1
		II	Fungsional
Panitera Pengganti	2		
III	Staf	Analisis Perkara Peradilan Pidana	1
		Analisis Perkara Peradilan Hukum	1
		Pengelola Perkara Pidana	1
		Pengelola Perkara	1
		Pengelola Berkas Peninjauan Kembali	1
		Pengolah Data Keberatan dan Banding	1
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1
		Analisis Humas	1
		Penyusun Laporan Keuangan	1
		Analisis SDM Aparatur	1



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

		Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1
		Pengadministrasi Persuratan	1
		Bendahara	1
		Pengelola Barang Milik negara	1
		Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan Dan Perawatan Kendaraan Bermotor	1
		Pranata Barang dan Jasa	1
		Teknisi Sarana dan Prasarana	0
		Pengadministrasi Perpustakaan	0
		Pranata Kearsipan	0
IV	Tenaga Kontrak	Pramubakti	2
		Pengemudi	2

A) DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Ditinjau dari status Kepegawaian, Kegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Militer	17	45,94
2.	PNS	12	32,43
3.	PPNPN	8	21,62
Jumlah		37	100



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Militer	10	7
2.	PNS	6	6
3.	PPNPN	7	1
Jumlah		23	14

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4. Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1.	Letnan Kolonel	2	
2.	Mayor	3	
3.	Kapten	1	
4.	Lettu	1	
5.	Letda	1	
6.	Peltu	1	
7.	Pelda	1	
8.	Serma	1	
9.	Serka	5	
10.	Kopda	1	
11.	Penata Tk I		7
12.	Penata		1
13.	Penata Muda Tk I		1
	Penata Muda		3
Jumlah		17	12



4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar yang terdiri personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	2	1	-	3
2.	S-1	7	10	2	18
3.	D-3	-	-	-	-
4.	SMA	8	1	6	15
Jumlah		17	12	8	36

Tingkat pendidikan Pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimana sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sebagai berikut :



Tabel III.6. Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	20 – 30 Tahun	0	1	4	5
2.	31 – 40 Tahun	11	3	2	15
3.	41 – 50 Tahun	5	5	1	11
4.	51 – 58 Tahun	1	3	1	5
Jumlah		17	12	8	36

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

B) MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan Pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para Pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang Pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2020 terdapat 6 (enam) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar selama tahun 2020.



Tabel III.7. Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor Surat	TMT
1	2	3	4	5
1.	Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H NRP 11010047011279	Kadilmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	5-3-2020
2.	Letnan Kolonel Chk L. M. Hutabarat, S.H., M.H. NRP 11980001820468	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	5-3-2020
3.	Mayor Chk Kuswara, S.H., M.H. NRP 2910133990468	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	5-3-2020
4.	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. NRP 541692	Panitera	50/Djmt/Kep/10/ 2020	23-10-2020
5.	Serda Chumaidi NRP 31060417870186	Ba Kodam XVI/Ptm untuk Kumdam XIV/Ptm	Sprin Dirkom TNI AD Sprin/1109/X/2020	12-10-2020
6.	Sertu Sumardi NRP 31960173740276	Pelaksana	584/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020	13-3-2020

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa Pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar yang mutasi keluar. Selama tahun 2020 terdapat 2 (dua) Pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor Surat	TMT
1.	Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H., M.H. NRP 13134/P	Wakadilmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/ 2020	5-3-2020



2.	Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H. NRP 2910134720371	Pokkimmil	SK KMA No 44/KMA/Kep/III/2020	5-3-2020
3.	Letnan Satu Chk (k) Sari Rahayu, S.H. NRP 21000147090780	Panitera Muda Pidana	50/Djmt/Kep/10/2020	23-10-2020

C) PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan kebutuhan Pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap Pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang Pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat Reguler, kenaikan pangkat Pilihan dan kenaikan pangkat Anumerta.

Selama tahun 2020, terdapat 6 (enam) orang Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerima kenaikan pangkat, dimana seluruhnya menerima kenaikan pangkat reguler. 6 (enam) orang personel Militer dan 1 (satu) orang personil PNS. Kenaikan pangkat ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data Pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor Surat	TMT
1.	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. NRP 541692	Panitera Muda Pidana	Kep/77-TIII/III/2020	1-4-2020
2.	Serma Riyanto NRP 21050147870784	Pranata Barang dan Jasa	Kep/197-33/III/2020	1-4-2020
3.	Serda Chumaidi NRP 31060417870186	Pengadministrasi Perpustakaan	Kep/386-33/V/2020	18-5-2020
4.	Letnan Dua Chk (K) Fitriyani Nasir NRP 21050318561184	Pranata Kearsipan	61/TNI/TAHUN 2020	27-7-2020
5.	Martinus Uma Rantesalu NIP 196201121987031008	Staf Panmud Pidana	01255/13001/A2/12/19	1-1-2020
6.	Bagiyo, S.H. NIP 196603151992031002	Penyusun Laporan Keuangan	62/KP.I/SK/IX/2020	25-09-2020

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena Pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Selama tahun 2020, terdapat 4 (empat) orang Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerima kenaikan jabatan, Kenaikan jabatan dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tersebut. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor Surat	TMT
1.	Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H. NRP 11980005390269	Wakadilmil	Kadilmil	SK KMA No. 44/KMA/SK/III/2020	5-3-2020
2.	Dhanang Sri Anunggita, S.Sos NIP 98402192019031005	CPNS	PNS	04/SEK/PNS.0 4.1/ SK/II/2020 nomor urut 75	28-2-2020
3.	Dede Febrizal Rachman, S.H. NIP 198902022019031003	CPNS	PNS	04/SEK/PNS.0 4.1/SK/II/2020 nomor urut 74	28-2-2020
4.	Ashhab Triono, S.E. NIP 199207192019031003	CPNS	PNS	05/SEK/PNS.0 4.1/SK/II/2020 nomor urut 33	28-2-2020



D) PENSIUN

Pensiun berlaku bagi Pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS.

Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedangkan bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun.

Pada tahun 2020 personel Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah memasuki usia pensiun ada 2 (dua) orang terdiri dari personel Militer dan PNS.

Tabel III.11 Daftar Pegawai Pensiun

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Nomor Surat	TMT
1.	Martinus Uma Rantesalu NIP 196201121987031008	Staf Panmud Pidana	01255/13001/A2/12 /2019	31-1-2020
2.	Letkol Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532	Pokkimmil	Kep/606/VII/2020	23-7-2020

E). PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain Diklat, termasuk pula didalamnya Bimbingan Teknis Bbimtek) dan Sosialisasi.

Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat, namun Pengadilan Militer III-16 Makassar akan mendukung dan memfasilitasi Pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti Diklat, Bimtek atau Sosialisasi. Beberapa Diklat yang telah diikuti oleh personel Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Tabel III.12 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Tempat/Waktu	Peserta
DIKLAT TEKNIS			
1	2	3	4
1.	Kompetensi dan Independensi Hakim Militer dalam Menyelesaikan Perkara Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Lingkungan Peradilan Militer	Online 10-13 Agustus 2020	Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H., M.H.
2.	Pelatihan Teknis Narkotika bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer di Seluruh Indonesia	Online 19 Agustus – 10 September 2020	Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
3.	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer	Online 24-27 Agustus 2020	Pelda Nurman
4.	Pelatihan Online teknis fungsional Tata Usaha Militer bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia	Online 28 Agustus – 18 September 2020	Letnan Kolonel Chk Adeng, S.Ag., S.H.
5.	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer	Online 28 September - 01 Oktober 2020	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H., Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. dan Peltu (K) Erna Dwi Astuti
6.	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan tema “Mewujudkan Integritas Panitera di Lingkungan Peradilan Militer yang Profesional dengan Memegang Teguh Kode Etik”	Online 14 Oktober - 16 Oktober 2020	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H., Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H.
7.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf di Bidang Pemberkas dalam Rangka Tertib Administrasi	Online 19 - 21 Oktober 2020	Peltu (K) Erna Dwi Astuti, Pelda Nurman, Dede Febrizal Rachman, S.H., Kopda Y. Daud Louw.
8.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf dalam Penyelesaian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	Online 21 s.d. 23 Oktober 2020	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Serka Andi Andri Yudha, Ramlah Madjid, S.H.,
9.	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan tema “Penguatan Kompetensi Panitera dan Staf di Lingkungan Peradilan Militer dalam Penyelesaian Upaya Hukum”	Online 26 s.d. 28 Oktober 2020	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Serka Samsuddin, S.H., Dede Febrizal Rachman, S.H.,
10.	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti	Online 06 s.d 27 November 2020	Peltu (K) Erna Dwi Astuti, Pelda Nurman
11.	Pelatihan Teknis Fungsional Penyesuaian Persepsi Pembuatan	Hotel Wyndham Surabaya	Letnan Kolonel Laut (KH) Desman



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

	Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	30 November s.d. 4 Desember 2020	Wijaya, S.H., M.H., Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
--	---	----------------------------------	--

1	2	3	4
DIKLAT NON TEKNIS			
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i>	Kampus Balitbang Diklat Kumdil MA RI 10 s.d. 21 Maret 2020	Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
2.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara bagi Administrator di Lingkungan Peradilan Militer	Hotel Grand Zuri Malioboro, Yogyakarta 11 s.d. 13 Maret 2020	Serka Samsuddin, S.H.
3.	Pelatihan <i>Change Leadership</i>	Online 30 Maret s.d. 24 April 2020	Muhammad Arfah Afendi, S.E., M.M.
4.	Pelatihan <i>Creative Thinking Technique</i>	13 April s.d. 8 Mei 2020 11 Desember 2020	Muhammad Arfah Afendi, S.E., M.M.
5.	Pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I Tahun 2020	Online 6 Mei s.d. 7 Juni 2020	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H.
6.	Pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang II Tahun 2020	Online 8 Juni s.d. 3 Juli 2020	Kapten Sus Andi Dala Uleng, S.H.
7.	Pelatihan webinar menulis laporan efektif dari tempat tugas.	Online 10 Juli 2020	Muhammad Arfah Afendi, S.E., M.M.
8.	Pelatihan online Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan I, II, III tahun 2020	17 Juli s.d. 13 Agustus 2020	Dhanang Sri Anunggita, S.Sos.
9.	Pelatihan online teknik menyusun abstraksi putusan pengadilan (<i>executive summary</i>)	23 s.d. 24 Juli 2020	Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H.
10.	Pelatihan online <i>English Effective Presentation</i> Gel. III Tahap II	Online 03 s.d. 11 Agustus 2020	Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H., M.H.
11.	Pelatihan online menulis laporan efektif bagi kesekretariatan <i>batch 2</i> tahun 2020	Online 10 s.d. 14 Agustus 2020	Muhammad Arfah Afendi, S.E., M.M.
12.	Mengikuti pelatihan online video Editing kelas 01 s.d. 03 tahun 2020	Online 24 - 28 Agustus 2020	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
13.	Pelatihan online Kepemimpinan Pengawas Gel. III tahun 2020	Online 31 Agustus s.d. 4 Desember 2020	Sukmawaty Rasjid, S.Sos
14.	Pelatihan online Kepemimpinan	Online	Muhammad Arfah



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

	Administrator Angkatan I dan II	31 Agustus s.d. 27 November 2020	Afendi, S.E., M.M.
15.	Pelatihan Online Basic Video Production Kelas 01 s.d. Kelas 02	Online 28 September s.d. 02 Oktober 2020	Hamiah, S.Sos.
16.	Seminar FGD dengan tema "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang <i>Contempt of Court</i> "	Online 22 Oktober 2020	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H.

F. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

A) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Dalam Tahun 2020 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-17 Manado sebanyak 23 (dua puluh) orang, yang terdiri dari 8 (delapan) orang Perwira, 3 (tiga) orang Bintara, dan 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara ditambah dengan 9 (sembilan) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Adapun Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagai berikut :

- a. Kepala : Dwi Yudo Utomo, S.H., Letkol Chk NRP. 607952
- b. Wakil Kepala : Bagus Parta Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH)
NRP.16762/P
- c. Panitera : Ali S. Pasila, S.H., Kapten Chk NRP. 11110035290985
- d. Sekretaris : Hengki Afandi, S.H.
Mayor Chk NRP. 11040016470180
- e. Panmud Pidana : Adrianus, S.H. Lettu Chk NRP. 21960347511275 (BP. dari Dilmil III-18 Ambon).
- f. Kimmil : 1. Dwi Yudo Utomo, S.H., Letkol Chk NRP. 607952
2. Bagus Parta Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH)
NRP.16762/P
3. Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 1106000613681
4. Primafika Sofyan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11070085400786



5. Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP. 533192
6. Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 18883/P

- g. Panmud Hukum : Kosong
h. Panitera Pengganti : Kosong

B) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sangat besar pengaruhnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer III-17 Manado

untuk melaksanakan administrasi umum yang terkait dengan kepegawaian, umum dan keuangan.

Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, Pengadilan Militer III-17 Manado pada Tahun 2020 mengirimkan Pegawai untuk mengikuti pendidikan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain di daerah bidang KeuanganJasaBarang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Manado dan KPPN Manado serta memberikan kesempatan kepada Staf/ASN untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi diluar jam dinas dengan biaya sendiri.

Adapun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai berikut :

a. Personil Militer :

- 1) Serda Rodi Salmon, NRP. 31040378600482, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kesekretariatan.
- 2) Serda Rusdi Rahman, NRP. 31040355421285, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kepaniteraan.
- 3) Serda Abdullah Rahayamtel, NRP 31040389260583, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kesekretariatan.

b. Aparatur Sipil Negara (ASN) :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 1) Meldi M. A. S Seon S.Pi., Penata III/c NIP. 19740514 2002 12 1001 (Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan).
- 2) Nasir, Penata Muda Tk.I III/b NIP. 196805101997011001 (Pelaksana)
- 3) Dharmawati Rahayu, S.E., Penata Muda III/a NIP.19870814 2011 01 2015 (Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana).

Adapun Tenaga Kontrak (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)) pada Pengadilan Militer III-17 Manado tahun 2020 berjumlah 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tenaga Pramubakti 4 (empat) orang yaitu :
 - 1) Rini Nur Cahyani, Amd.
 - 2) Dewi Duran
 - 3) Ervina R. Damima
 - 4) Ifandi Septiadi, Amd.
- b. Tenaga Pengemudi 2 (dua) orang yaitu :
 - 1) Ahmad Mahadjani
 - 2) Jacky Ibrani Kentey
- c. Tenaga Security 2 (dua) orang yaitu :
 - 1) Deavis Billi Chandra Aling
 - 2) Fahmi Rahanyamtel
- d. Tenaga Pramusaji 1 (satu) orang yaitu : An. Isah Susanti.

Dari uraian di atas, maka jumlah seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|----------------------|
| a. | Personil TNI | : | 12 (dua belas) orang |
| b. | Aparatur Sipil Negara | : | 3 (tiga) orang |
| c. | Sopir | : | 2 (dua) orang |
| d. | Pramubakti | : | 4 (empat) orang |



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- e. Security : 2 (dua) orang
- f. Pramusaji : 1 (satu) orang

C) Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan kepangkatan/golongan / pendidikan

I. Berdasarkan kepangkatan Komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah sebagai berikut :

Kolonel : Kosong

Letnan Kolonel : 1 (satu) orang An. Dwi Yudo Utomo, S.H., NRP. 607952 sebagai Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;

Mayor : 5 (lima) orang atas nama :

1. Mayor Bagus Parta Wijaya, S.H., M.H., NRP. 16762/P sebagai Wakil Kepala
2. Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H., NRP. 1106000613681 sebaga Pokkimmil
3. Mayor Chk Hengki Afandi, S.H. NRP. 11040016470180 sebagai Sekretaris.
4. Mayor Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP.533192 sebaga Pokkimmil
5. Mayor Chk Primafika Sofyan, S.H. NRP. 11070085400786 sebaga Pokkimmil

Kapten : 2 (dua) orang atas nama :

1. Kapten Laut (KH) Prana Kurnia Wibowo,S.H. NRP. 18883/P sebaga Pokkimmil
2. Kapten Chk Ali S. Pasila, S.H. NRP. 11110035290985 sebagai Panmud Pidana.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Letnan Satu : 1 (satu) orang An. Adrianus NRP.
21960347511275 sebagai Panitera Muda Pidana
/Panitera Pengganti (BP dari Dilmil III-18 Ambon)

Letnan Dua : Kosong
Peltu : Kosong
Pelda : Kosong
Serma : Kosong
Serka : Kosong
Sertu : Kosong
Serda : 3 (tiga) orang atas nama :

1. Serda Rodi Salmon, NRP. 31040378600482, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kesekretariatan.
2. Serda Rusdi Rahman, NRP. 31040355421285, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kepaniteraan.
3. Serda Abdullah Rahayamtel, NRP 310403892 60583, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kesekretariatan.

II. Berdasarkan golongan Komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah sebagai berikut :

PNS Golongan III/c : 1 (satu) orang An. PNS. Meldi M. A. S Seon, S.Pi. sebagai Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.

PNS Golongan III/b : 1 (satu) orang atas nama PNS. Nasir sebagai Pelaksana kepaniteraan.

PNS Golongan III/a : 1 (satu) orang atas nama PNS. Dharmawati Rahayu, S.E.sebagai Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

III. Berdasarkan pendidikan Komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah sebagai berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Strata 2 (Master) : 3 (tiga) orang atas nama :

1. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., NRP. 16762/P sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H., NRP. 1106000613681 sebaga Pokkimmil
3. Mayor Chk Hengki Afandi, S.H., M.H. NRP. 11040016470180;

Strata 1 (Sarjana) : 8 (delapan) orang atas nama :

1. Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., NRP. 607952;
2. Kapten Chk Primafika Sofyan, S.H. NRP. 11070085400786;
3. Kapten Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP.533192;
4. Kapten Laut (KH) Prana Kurnia Wibowo, S.H. NRP. 18883/P;
5. Kapten Chk Sugandi, S.H. NRP. 21950303621075,
6. Kapten Chk Ali S. Pasila, S.H. NRP. 11110035290985;
7. Penata Gol. III/c Meldi M. A. S Seon, S.Pi.
8. Penata Muda Gol. III/a Dharmawati Rahayu, S.E.

Diploma 3 (D3) : 2 (dua) orang atas nama :

1. Rini Nur Cahyani, Amd. (PPNPN)
2. Ifandi Septiadi, Amd. (PPNPN)

Sekolah Menengah Atas

(SMA) : 11 (sebelas) orang atas nama :

1. PNS. Nasir
2. Serda Rodi Salmon, NRP. 31040378600482, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kesekretariatan.



3. Serda Rusdi Rahman, NRP. 31040355421-285, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kepaniteraan.
4. Serda Abdullah Rahayamtel, NRP 310403892 60583, sebagai Bintara Dilmil III-17 Manado Staf Kesekretariatan.
5. Dewi Duran
6. Jacky Ibrani Kentey
7. Deavis Billi Chandra Aling
8. Ervina R. Damima
9. Ahmad Mahadjani
10. Isah Susanti
11. Fahmi Rahanyamtel

D) Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

a. Mutasi

Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 anggota Pengadilan Militer III-17 Manado yang mengalami mutasi adalah sebagai berikut :

1. Mayor Chk Dendi Sutioso Suryo Saputro, S.H. NRP. 21940113631072 berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Sprin/661/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Kembali melaksanakan tugas pokok dan jabatan sebagai anggota Pokkimmil Gol.VI Dilmil III-19 Jayapura.
2. Letnan Kolonel Chk Sultan, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/KEP/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, dimutasikan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

sebagai Kepala Pengadilan Militer tipe A pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

3. Mayor Chk Abdul Halim, S.H., M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/KEP/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dimutasikan sebagai Anggota Pokkimmil Gol.V pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

4. ASN Steven Stanley Anggoman, S.H., Penata Gol. III/c NIP. 1969 09 15 1995 03 1004 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/Kp.I/SK/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; sebagai Analis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

5. Kapten Chk Sugandi, S.H., NRP. 21950303621075, Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor 764/Djmt.2/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan Kepaniteraan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama Panitera Dilmil III-17 Manado dan Jabatan baru Panitera Dilmil I-07 Balikpapan.

b. Promosi

Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 anggota Pengadilan Militer III-17 Manado yang dipromosikan adalah :

1. Letnan Kolonel Chk Sultan, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/KEP/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pemberhentian



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

dari dan Pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, dimutasikan sebagai Kepala Pengadilan Militer tipe A pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

2. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. NRP. 16762/P berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/ KMA/KEP/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama sebagai Anggota Pokkimmil Gol.VI Dilmil III-14 Denpasar, jabatan baru sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Kapten Sus Aulisa Dandel, S.H., NRP. 533192 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor : 296/ Djmt/Ratgas/3/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama sebagai Anggota Pokkimmil Gol. VII Pengadilan Militer III-17 Manado, jabatan baru sebagai Anggota Pokkimmil Gol.VI Pengadilan Militer III-17 Manado.

4. Kapten Chk Primafika Sofyan, S.H., NRP. 11070085400786 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor : 296/ Djmt/ Ratgas/ 3/ 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama sebagai Anggota Pokkimmil Gol. VII Pengadilan Militer III-17 Manado, jabatan baru sebagai Anggota Pokkimmil Gol.VI Pengadilan Militer III-17 Manado.

5. Kapten Laut (KH) Prana Kurnia Wibowo, S.H., NRP. 18883/P berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor : 296/ Djmt/ Ratgas/ 3/ 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

sebagai Anggota Pokkimmil Gol. VII Pengadilan Militer III-17 Manado, jabatan baru sebagai Anggota Pokkimmil Gol.VI Pengadilan Militer III-17 Manado.

6. ASN Dharmawati Rahayu, S.E., Penata Muda Gol. III/a NIP. 198708142011012015 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 473/SEK/Kp.I/SK/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Promosi dan Mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; dari Jabatan Bendahara pada Pengadilan Militer III-17 Manado Type B diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Militer III-17 Manado Type B.

7. Kapten Chk Sugandi, S.H., NRP. 21950303621075, Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor 764/Djmt.2/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan Kepaniteraan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama Panitera Dilmil III-17 Manado type B dan Jabatan baru Panitera Dilmil I-07 Balikpapan type A.

8. Kapten Chk Ali Sakti Pasila, S.H., NRP. 11110035290985, Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor 764/Djmt.2/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan Kepaniteraan pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, jabatan lama Panitera Muda Pidana Dilmil III-17 Manado dan Jabatan baru Panitera Dilmil III-17 Manado.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

c. Pensiun

Bahwa selama Tahun 2020 di Pengadilan Militer III-17 Manado ada Pegawai ataupun anggota TNI yang memasuki masa pensiun. Adapun anggota Pengadilan Militer III-17 Manado yang Pensiun adalah atas nama ASN. Iriane Rosye Saleh, S.E., yang saat ini sudah pensiun, dan terhitung tanggal 1 September 2020 sudah diberikan hak untuk pensiun.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2020 untuk pembinaan tenaga teknis dan non teknis maka personil Pengadilan Militer III-17 Manado telah mengikuti berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. ASN. Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda Gol. III/a NIP. 198708142011012015, berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-17 Manado tanggal 28 Januari 2020 mengikuti Acara Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga yang berkualitas Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Januari 2020 Jam 08.30 Wita s/d selesai bertempat di Aula KPPN Manado.
2. Letnan Kolonel Chk, Sultan, S.H., NRP. 11980017760771, Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado; Mayor Chk Hengki Afandi, S.H., M.H., NRP. 11040016470180, Sekretaris Pengadilan Militer III-17 Manado; Kapten Chk Sugandi, S.H., NRP. 20950303621075, Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Milliter Utama Nomor Sprin/ 58/ I/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembinaan Kepala, Panitera dan Sekretaris di Lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 jam 07.30 sampai dengan selesai bertempat di Ruang Sidang Dilmiltama.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

3. Letnan Kolonel Chk, Sultan, S.H., NRP. 11980017760771, Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI

Nomor 176/ Djmt/ Ratgas/ 2/ 2020 tanggal 12 Februari 2020 telah mengikuti kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan / Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Type A tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Februari 2020.

4. Kapten Laut (KH) Prana Kurnia Wibowo, S.H., berdasarkan Surat Telegram Kasal Nomor 072/DIK/0220 tanggal waktu penunjukan 0210.1522 tentang lulus seleksi dan ditunjuk untuk mengikuti Diklapa TNI AL Angkatan XXIX TA. 2020, dan berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-17 Manado Nomor W3.Mil06/97/KP.01.2/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang mengikuti Diklapa TNI AL Angkatan XXIX TA. 2020, yang dimulai pada tanggal 12 Februari 2020 selama 7 (tujuh) bulan.

5. Mayor Chk Subiyatno, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kadilmilti III Surabaya Nomor W3.Mil/38/Sprin/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pemanggilan Serial Pelatihan (Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan English Effective Presentation) tahun 2020.

6. Serda Abdullah Rahanyamtel NRP. 3104038920583, Pelaksana kesekretariatan Dilmil III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor W3.Mil06/130/KU.01/III/2020 tentang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan BAR IP yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado pada hari



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Senin tanggal 9 Maret 2020, jam 09.00 Wita s/d selesai bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Lantai VI Jalan Betesda Nomor 6-8 Manado.

7. Serda Rodi Salmon NRP. 31040378600482, Pelaksana kesekretariatan Dilmil III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor W3.Mil06/137/KP.01.1/III/2020 tentang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis SIPP yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Maret 2020 di Hotel Grand Zuri Malioboro Jl. P. Mangkubumi No.18 Gowongan, Jetis Kota Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilmiltun sesuai Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 211/Djmt/KEP/2/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi administrator di Lingkungan Peradilan Militer tahun anggaran 2020.

8. Kapten Chk Sugandi, S.H., NRP. 21950303621075, Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado; Kapten Chk Ali Saksi Pasila, S.H., NRP.11110035290985, Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-17 Manado; Serda Rusdi Rahman NRP. 31040389260583 Pelaksana Kepaniteraan Dilmil III-17 Manado dan Serda Abdullah Rahanyamtel NRP. 3104038920583, Pelaksana kesekretariatan Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor W3.Mil06/167/KU.01/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Menghadiri Penelitian Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti di wilayah Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, Jam 13.00 Wita s/d 17.00 Wita di Swiss Bell Hotel VI Jalan Bethesda Nomor 6-8 Manado sesuai Surat Kepala Puslitbang



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor 186/Bid.2/Lit/S/2/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Permohonan Penugasan Peserta FGD.

9. Kapten Chk Sugandi, S.H., NRP. 21950303621075, Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/73/Sprin/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Manajemen Resiko Gel. I dan II TA. 2020.

10. ASN. Meldi M.A.S Seon, S.Pi., berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/107/Sprint/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online dari tempat tugas telah mengikuti Englis Effective Presentation Gelombang III Tahap I Kelas 19 s/d 36 tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 24 Juli 2020 melalui Zoom Meeting.

11. Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Miltama/ Sprin/339/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang kegiatan TNA (*Training Needs Assesment*) Lingkungan Peradilan Militer Kerjasama dengan Mahkamah Agung RI dengan Studiencentrum Rechtspleging (SSR) seluruh Indonesia TA. 2020, yang dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Jam 13.30 s/d 16.30 Wib melalui Zoom Meeting.

12. Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/118/ Sprin/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online dari tempat tugas telah



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

mengikuti English Effective Presentation Gelombang III Tahap II Kelas 1 s/d 16 tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 11 Agustus 2020 melalui Zoom Meeting.

13. Mayor Chk Subiyatno, S.H., berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/124/Sprin/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Pemecahan Masalah yang Kompleks dan Pengambilan Keputusan dari tempat Tugas tahun 2020 telah mengikuti Pelatihan Online Pemecahan Masalah yang Kompleks dan Pengambilan Keputusan, yang dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 07 Agustus 2020 di Satker masing-masing.

14. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., NRP.16762/P berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Miltama/Sprin/356/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 telah mengikuti Bimbiingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan tema “Kompetensi dan Independensi Hakim Militer dalam menyelesaikan Perkara Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di lingkungan Peradilan Militer”, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus s/d Kamis tanggal 13 Agustus 2020 melalui Zoom Meeting di tempat tugas masing-masing

15. Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/129/ Sprin/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online dari tempat tugas telah mengikuti Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan Tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 15 Agustus 2020 melalui Zoom Meeting.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

16. Mayor Chk Hengky Afandi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor W3.Mil06 / 388/ PP.00.4 / VIII / 2020 tanggal 14 Agustus 2020

telah mengikuti Seleksi Susjabkimmil dan Susjabormil pada tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan selesai di Kodiklat TNI Serpong dan dinyatakan Lulus, dan sudah melaksanakan pendidikan sampai dengan selesai pada tanggal.

17. Kapten Chk Sugandi, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Spri/369/PP.01.3/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang mengikuti Diklapa II Cab. TNI AD Ta. 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d 15 Desember 2020.

18. Kapten Chk Ali Sakti Pasila, S.H., NRP. 11110035290985, Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor Sprin/372/PP.01.3/ VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 telah mengikuti Suspatera TA.2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 di Kodiklat TNI Serpong, sampai dengan selesai pada tanggal.

19. Kapten Chk Primafika Sofyan, S.H., NRP. 11070085400786 berdasarkan Surat Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor 1057/ Djmt/ B/ 8/ 2020 tanggal 27 Agustus 2020 telah mengikuti Pelatihan teknis Fungsional Tindak Pidana Narkotika yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s/d 9 September 2020 dan 10 September 2020.

20. Mayor Laut (KH) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. NRP. 16762, Waka Dilmil III-17 Manado dan Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H. NRP.11060006130681, Anggota Pokkimmil Golongan VI Dilmil III-17 Manado berdasarkan Surat Perintah



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Kadilmiltama Nomor Miltama/ Sprin/377/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 telah mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia yang dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : tahap 1 tanggal 28 Agustus s/d 3 September 2020 : pretest dan mempelajari materi melalui Wiki (bahan bacaan) dan mengerjakan pop quiz; tahap 2 tanggal 7 September s/d 16 September 2020 : Penyampaian materi oleh pengajar dan hanya jawab system online class dan mengerjakan pop quiz; dan tahap 3 tanggal 17 September s/d 18 September 2020: bedah kasus/diskusi/membuat putusan dan ujian akhir, selesai.

21. Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H. NRP.11060006130681, Anggota Pokkimmil Golongan VI Dilmil III-17 Manado berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 824/Bld/S/9/2020 tanggal 3 September 2020 telah mengikuti Pelatihan Online Transformasi Bisnis Proses Pengadilan dari tempat tugas tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin s/d Kamis, tanggal 7 s/d 10 September 2020 melalui Zoom Meeting.

22. An.Ifandi Septiadi, Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan, PPNPN Dilmil III-17 Manado berdasarkan Surat Kadilmilti III Surabaya Nomor W3.Mil/160/Sprin/IX/2020 tanggal 24 September 2020 telah mengikuti Pelatihan online Basic Editing With Adobe Photoshop kelas 05 dari tempat tugas tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September s/d 02 Oktober 2020, jam 13.00 s/d 16.00 Wib dari Satker masing-masing.

23. Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., NRP.607952, Kadilmil III-17 Manado berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 939/Bld/S/9/2020 tanggal 30 September 2020 telah mengikuti Pelatihan Online membangun Kemitraan Komunikasi



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pengadilan dari tempat tugas tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 9 Oktober 2020.

24. Mayor Sus Aulisa Dandel, S.H. NRP.533192, Anggota Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-17 Manado; Mayor Ckh Subiyatno, S.H., M.H. NRP.11060006130681, Anggota Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-17 Manado; Kapten Laut (KH) Prana Kurnia Wibowo, S.H. NRP. 18883/P, Anggota Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-17 Manado, berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 1116/Bld/S/11/2020 tanggal 26 November 2020 telah mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 s/d tanggal 04 Desember 2020 di Hotel Wyndham Surabaya Jln. Basuki Rahman No. 67-73 Embong Kaliasin Kec. Genteng, kota Surabaya, Jawa Timur.

G. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

A) KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2020 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status pegawai, yaitu 15 (lima belas) orang personel Militer, 14 (empat belas) orang PNS dan 9 (sembilan) orang PPNP.

Tabel III.1 Data Personel Militer.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Sultan, S.H.	Letnan Kolonel Chk/	Kadilmil



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

2.	M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.	11980017760771 Letnan Kolonel Sus /524420	Wakadilmil
3.	Dedy Darmawan, S.H., M.H	Letnan Kolonel Chk/ 11990006941271	Hakim Militer
4.	Suradi Sungkawatmojo, S.H.	Letnan Kolonel Chk/ 2910013780370	Hakim Militer
5.	Muhamad Saleh, S.H.	Mayor Chk/ 1101000144067	Hakim Militer
6.	Hadi Prayitno, S.H., M.M	Mayor Sus/530397	Hakim Militer (BP di Bawas MA RI)
7.	Jasdar, S.H.	Mayor Chk/ 11030004260776	Hakim Militer
8.	Arif Kusnandar, S.H.	Mayor Chk/ 11030028510981	Hakim Militer
9.	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Mayor Chk/ 2194013570972	Panitera
10.	Farid Iskandar, S.H., M.H	Mayor Chk/ 11060001420579	Sekretaris
11.	Ayik Triandi Asmara, S.H.	Kapten Chk/ 21990110790279	Panitera Hukum
12.	Adrianus, S.H.	Lettu Chk/ 21960347511275	Panmud Pidana (BP Dilmil Manado)
13.	Riska Dori, S.H.	Letda Chk/ 21010058540582	Panitera Pengganti
14.	Hendra Yanto, S.H.	Serka/21080776901187	Pengelola Perkara
15.	Fauziah Astuti	Serda (K)/21150240990169	Pengadministrasian hukum (BP di Dilmiltama)

Tabel III.2 Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS).

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Asis, S.Kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
2.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata Tk.I III/d 197001251990032001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3.	Hendri D. Muskitta, S.H	Penata Tk. I III/d / 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H	Penata Tk.III/d 198111012005022002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5.	Rina D.J. Watimury, S.H.	Penata III/c / 197304012006042001	Analisis Akuntabilitas Aparatur
6.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Analisis Perkara Peradilan
7.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Pengadministrasian Registrasi Perkara
8.	Stany Rraprap, S.H.	Penata Muda III/b / 19871202006042001	Penyusun Laporan Keuangan



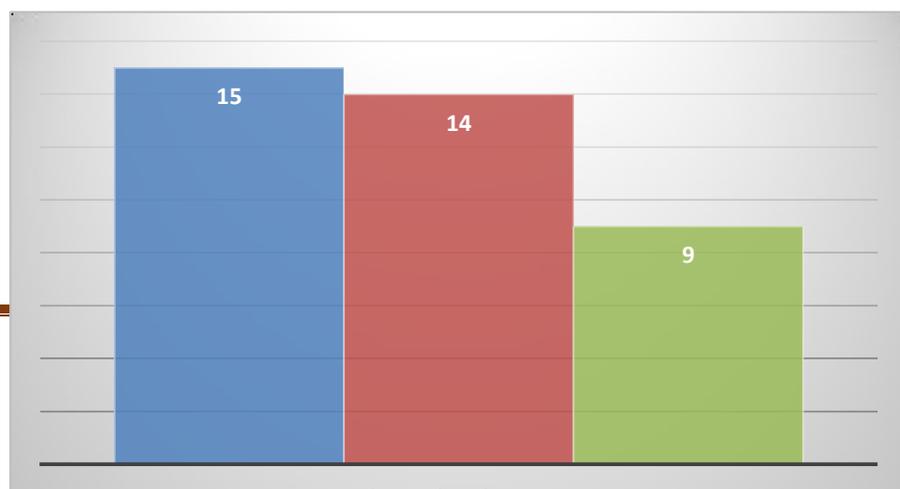
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

9.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda III/b / 199005182009041001	Analisis Perkara Peradilan
10.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara
11.	Fiere G. Harindah	Penata Muda III/a / 197804042006041003	Pengadministrasi Kepegawaian
12.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda III/a 198807242019031005	Analisis SDM Aparatur
13.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda III/a 199205302019031005	Analisis Perkara Peradilan
14.	Alvian Septiandhanu, S.IAN	Penata Muda III/a 199509232019031005	Analisis Kepegawaian Pertama

Tabel III.3 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Fredy Mahulette	Pramubhakti
2.	Alfred Werinussa, S.E	Pengemudi
3.	Jecky Divong Siregar	Pramubhakti
4.	Arpan	Security
5.	Muhamad Alpisal	Pramubhakti
6.	Johanis Bakker, S. Sos	Security
7.	Akmal, S.H	Security
8.	Hitler Hutaaruk	Security
9.	Geovano Pasahari	Pramubhakti

Grafik Personel Dilmil III-18 Ambon





2. Data Pegawai berdasarkan jabatan

Tabel III.4 Data Pegawai berdasarkan jabatan.

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
3	Pokkimmil	6 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Hukum	1 Orang
7	Panmud Pidana	1 Orang
8	Panitera Pengganti	1 Orang
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Staf Panmud Hukum	2 Orang
13	Staf Panmud Pidana	4 Orang
14	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	3 Orang
15	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
16	Staf Subbag Umum dan Keuangan	2 Orang

3. Data Pegawai berdasarkan kepangkatan.

Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 4 (empat) orang berpangkat Letnan Kolonel, 6 (enam) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Satu, 1 (satu) orang berpangkat



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

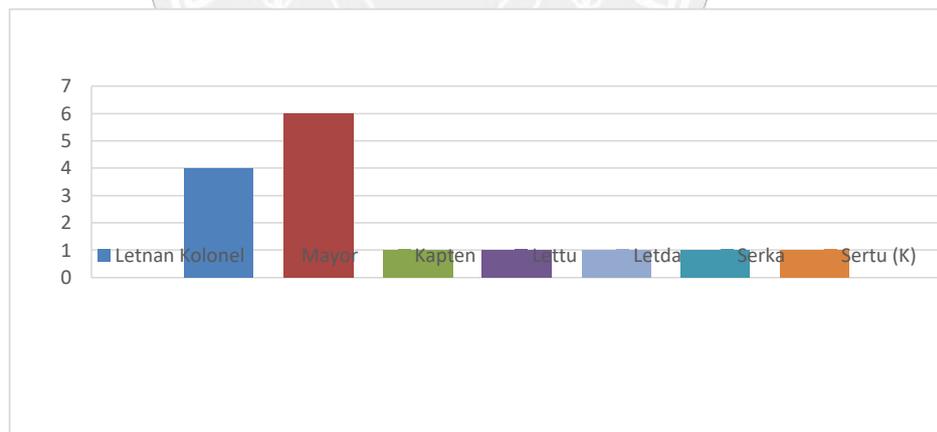
Letnan Dua, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Kepala, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Satu (K).

Untuk PNS terdiri dari 4 (empat) orang berpangkat Penata Tk.I III/d, 1 (satu) orang berpangkat Penata III/c, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda Tk.I III/b, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda III/a, 1 (satu) orang berpangkat Pengatur TK.I II/d, Sedangkan untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan

Tabel III.5. Data Pegawai berdasarkan Pangkat

Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Letnan Kolonel	4 orang	
2	Mayor	6 orang	1 Orang BP di Bawas MA RI
3	Kapten	1 orang	
4	Letnan Satu	1 orang	BP di Dilmil Manado
5	Letnan Dua	1 orang	
6	Sersan Kepala	1 orang	
7	Sersan Satu (K)	1 orang	BP di Dilmilitama
Jumlah		15 orang	



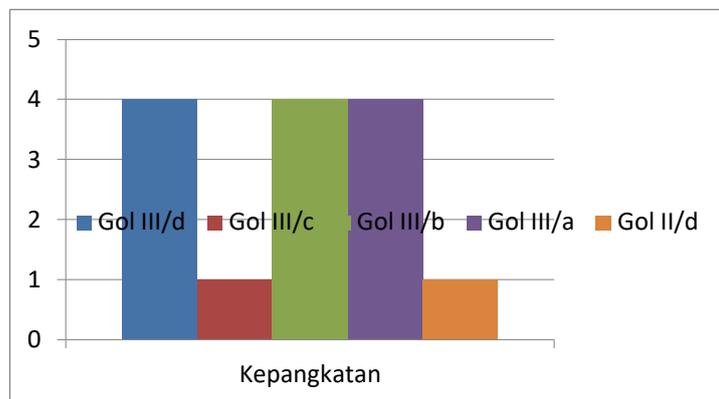
PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	4	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

2	Penata	1	
3	Penata Muda Tk.I	4	
4	Penata Muda	4	
5	Pengatur Tk.I	1	
Jumlah		14	



4. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.

Tingkat pendidikan dari seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PPNPN
1.	S-2	3	-	-
2.	S-1	11	12	4
3.	SMA	1	2	5
Jumlah		15	14	9

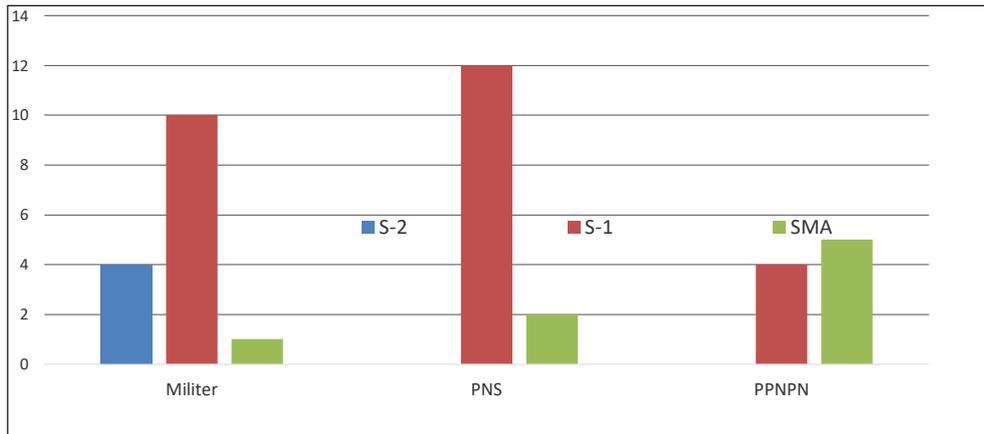
Tingkat pendidikan Pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimana sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Grafik Data Pegawai berdasarkan pendidikan.



B) MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan Pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

1. Mutasi Masuk.

Adanya mutasi masuk beberapa Pegawai ke lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan adanya kebutuhan pengisian jabatan yang kosong dan juga untuk menambah Sumber Daya Manusia. Selama tahun 2020 terdapat 4 (empat) pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.7 Data Mutasi Masuk Pegawai.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Sultan, S.H. Letkol Chk/11980017760771	Kadilmil	Sprin/169/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	12-5-2020
2.	M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus / 524420	Wakadilmil	Sprin/170/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	04-06-2020
3.	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk / 2194013570972	Panitera	Sprin/459/Kp.04.5/X/2020 23 Oktober 2020	14-12-2020
4.	Riska Dori, S.H. Letda Chk /21010058540582	Panitera Pengganti	Sprin/459/Kp.04.5/X/2020 23 Oktober 2020	

2. Mutasi Keluar.

Dalam tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain.

Tabel III.8 Data Mutasi keluar Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1	2	3	4	5
1.	Moch. Suyanto, S.H., M.H Kolonel Chk / 544973	Kadilmil	Sprin/169/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	21-4-2020
2.	Desman Wijaya, S.H., M.H Letkol Laut (KH)/13134/P	Hakim Militer	Sprin/170/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	14-4-2020
3.	Zulkopli, S.h., M.H. Mayor Chk/ 1100002741279	Panitera Pengganti	Sprin/459/Kp.04.5/X/2020 23 Oktober 2020	21-12-2020
4.	Heri Serda/31050404830185	Pelaksana pada Dilmiltama	Sprin/305/KP.04.6/IX/2020 16 September 2020	19-08-2020

C) PROMOSI.

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Dilingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adanya promosi dalam kenaikan pangkat dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal ini kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap Pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat Regular, kenaikan pangkat Pilihan dan kenaikan pangkat Anumerta.

Selama tahun 2020 terdapat 8 (delapan) orang Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerima kenaikan pangkat, Secara rinci diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai.

No.	Nama/Nrp/Nip	Pangkat/Golongan baru	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Dedi Darmawan, S.H., M.H 11990006941271	Letkol Chk	Sprin/182/KP.04. I/III/2020 30 Maret 2020	01-04-2020
2.	Ayik Triandi Asmara, S.H. 21990110790279	Kapten Chk	Sprin/184/KP.04. I/III/2020 30 Maret 2020	01-04-2020
3.	Fauziah Astuti, 21150240990196	Sertu (K)	Sprin/185/KP.04. I.III/2020 30 Maret 2020	01-04-2020
4.	Stany Raprap, S.H. 19871202006042001	Penata Muda TK.I /III/b	30/KP.I/SK/III/2020 30 Maret 2020	01-04-2020
5.	Rio Matauseja, S.H. 19900518200941001	Penata Muda TK.I /III/b	30/KP.I/SK/III/2020 30 Maret 2020	01-04-2020
6.	Suradi Sungkowatmojo, S.H. 2010013780370	Letkol Chk	Sprin/407/KP.04.I/IX /2020 25 September 2020	01-10-2020
7.	Hendri D. Muskitta, S.H. 197602231998032002	Penata TK. I III/d	36/KP.1/SK/IX/2020 26 September 2020	01-10-2020



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

8.	Rina D.J. Wattimury, S.H. 197304012006042001	Penata III/c	62/KP.1/SK/IX/2020 26 September 2020	01-01-2020
----	---	--------------	---	------------

2. Kenaikan Jabatan.

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena Pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu Struktur Organisasi.

Tabel III.10 Daftar Kenaikan jabatan Pegawai.

No.	Nama/ Pangkat/Golongan/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1	2	3	4	5
1.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H Penata Tk.III/d 198111012005022002	Pelaksana	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	12-06-2020
2.	Rina D.J. Watimury, S.H. Penata III/c / 197304012006042001	Staf PTIP	Analisis Akuntabilitas Aparatur	12-06-2020
3.	Musa J. Maaturwey, S.H. Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Staf Kepaniteraan	Analisis Perkara Peradilan	12-06-2020
4.	Richardo Thenu Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Staf Kepaniteraan	Pengadministrasi Registrasi Perkara	12-06-2020
5.	Stany Rraprap, S.H. Penata Muda III/b / 19871202006042001	Staf Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan	12-06-2020
6.	Rio Matauseja, S.H. Penata Muda III/b / 199005182009041001	Staf Kepaniteraan	Analisis Perkara Peradilan	12-06-2020
7.	Nova Prihastuti, S.H. Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara	Bendahara	12-06-2020
8.	Fiere G. Harindah Penata Muda III/a / 197804042006041003	Staf Kepegawaian dan Ortala	Pengadministrasi Kepegawaian	12-06-2020
9.	Arfyan Wigga Juladha, S.H. Penata Muda III/a 198807242019031005	Staf PTIP	Analisis SDM Aparatur	12-06-2020



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

10.	Muhammad Imam, S. S.H Penata Muda III/a 199205302019031005	Staf Kepaniteraan	Analisis Perkara Peradilan	12-06-2020
11.	Alvian Septiandhanu, S. IAN Penata Muda III/a 199509232019031005	Staf Kepegawaian dan Ortala	Analisis Kepegawaian Pertama	12-06-2020

D) Pensiun.

Pensiun berlaku bagi Pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintangara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun.

Dalam tahun 2020 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencapai usia pensiun.

E) Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM Mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain Diklat, termasuk pula di dalamnya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi.

Sebelum terjadinya pandemic COVID-19, studio pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemic COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga kegiatan Diklat sepenuhnya menggunakan pembelajaran berbasis e-learning.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui zoom meeting sebagai media untuk berbagai keperluan.

Guna mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 maka sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 semua kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi tanpa harus tatap muka yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun maupun Dilmilti III Surabaya dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai badan Peradilan Tingkat Pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat, namun Pengadilan Militer III-18 Ambon terus mendukung dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawainya yang akan mengikuti Diklat, Bimtek atau Sosialisasi yang dilaksanakan secara online.

Beberapa kegiatan Diklat, Bimtek dan Sosialisasi yang telah diikuti adalah:

Tabel III.11 Daftar Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Pegawai.

No.	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Pembinaan Kepala, Panitera dan Sekretaris	Dilmiltama	Ruang sidang Dilmiltama Jakarta Timur, 03 Februari 2020	- Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H (Kadilmil III-18 Ambon) - Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H (Panitera) - Mayor Chk Farid Iskandar S.H.,M.H (Sekretaris).
2.	Kegiatan Pelatihan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).	Kampus Balitbang Diklatkumdil MA RI	Bogor, 09 Februari 2020 s.d. 26 Februari 2020.	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H. (Panitera).
3.	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penelitian dengan judul Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti	Santika Premiere Ambon	Ambon, 12 Februari 2020	- Lettu Chk Adrianus, S.H. (Panmud Pidana) - Lettu Ayik Triandi Asmara, S.H.,



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

4.	Kegiatan Fit And Proper Test Calon Pimpimam Pengadilan Tipe A	Mahkamah Agung RI	Jakarta, 15 Februari s.d 18 Februari 2020.	Letkol Laut (KH) Desman Wijaya, S.H.,M.H (Pokkimmil Gol.V)
5.	Keiatan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunanan	Mahkamah Agung RI	Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), 27 Februari 2020.	Kolonel Chk Mochk Suyanto, S.H., M.H (Kadilmil).
6.	Kegiatan Seleksi Pemain Tenis PTWP tahun 2020	Mahkamah Agung RI	Jakarta, 13 Maret 2020	- Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H - Mayor Chk Jasdar, S.H., M.H
7.	Kegiatan Bimtek SIPP	Ditjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta, 11 Maret s.d 13 Maret 2020.	Muhamamad Alpisal (PPNPN)
8.	Kegiatan Pelatihan Mentoring Leader (Leader as Coach) bagi Ketua/Kepala Pengadilan dan Pelatihan English Effective Presentation.	Mahkamah Agung RI	Bogor, 15 Maret s.d 27 Maret 2020	Kolonel Chk Moch Suyanto, S.H., M.H (Kadilmil).
9.	Kegiatan Pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 6 Mei 2020	Mayor Chk Zulkopli, S.H.,MH
10.	Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Ditjen Badilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 8 Juni s.d 18 Juni 2020	Letnan Kolonel Chk Sultan, S.H. (Kadilmil).
11.	Kegiatan Pelaksanaan Virtual Profile Assesment	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 29-30 Juni 2020	Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H
12.	Kegiatan Pelatihan Online Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan I, II dan III tahun 2020.	Balitbang Diklatkumdil MA RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 17 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020	Avian Septiandhanu, S. IAN
13.	Kegiatan Pelatihan Online English Effective Presentation Gelombang III Tahap I Kelas 9 s.d 36 Tahun 2020.	Balitbang Diklatkumdil MA RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 16 Juli s/d 24 Juli 2020.	- Asis S, Kom., S.H. (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala. - Nova Kartika Sari, Spd., S.H. pengelola Kepegawaian dan Ortala.
14.	Kegiatan Pelatihan Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop	Balitbang Diklatkumdil MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 10 Agustus s/d 14 Agustus 2020	- Kapten Chk Ayik T.A, S.H (Panmud Hukum) - Muhamad Imam, S., S.H



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

				(Analisis Perkara Peradilan).
15.	Kegiatan Seleksi Susjabkimmil TA. 2020	Panglima TNI	Kodiklat TNI Serpong, 23 Agustus 2020	- Mayor Chk Muhamad Saleh, S.H. (Pokkimmil Gol.VI) - Mayor Chk Arif Kusnandar, S.H. (Pokkimmil Gol VI) - Mayor Ck Zulkopli, S.H.,MH (Panitera)
16.	Kegiatan Pelatihan Online Basic Vidie Editing Kelas	Balitbang Diklatkumdil MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 14 September s/d 18 September 2020.	Aryan Wigga Juladha, S.H.
17.	Pelaksanaan Ujian Dinas (e-Exam) tahun 2020 periode kedua	Biro Kepegawaian BUA MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 24 September 2020.	- Asis, S.Kom, S.H. (Kasubbag Kepegawaian & Ortala) - Fiere Gouberven Harindah (Pengadministrasian Kepegawaian)
18.	Pelaksanaan Bimtek Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Penguatan User SIPP Kepaniteraan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Peradilan Militer".	Ditjenbadilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 28 September 2020 s/d 01 Oktober 2020.	- Mayor Chk Zulkopli, S.H.,MH (Panitera) - Lettu Chk Adrianus S.H. (Panmud Pidana)
19.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan Tema "Kedudukan Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Militer"	Ditjenbadilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 12 Oktober 2020 s/d 15 Oktober 2020.	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H (Pokkimmil Go.VI)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

20.	Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 12 Oktober 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Letkol Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. (Wakadilmil) - Letkol Chk Dedi Darmawan, S.H., M.H Pokkimmil Gol. V) - Letkol Ck Suradi Sungkawatmojo, S.H. (Pokkimmil Gol.V) - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H (Pokkimmil Go.VI) - Mayor Chk Jasdar, S.H.,M.H Pokkimmil Gol.VI) - Mayor Chk Zulkopli, S.H.,M.H (Panitera) - Mayor Chk Farid Iskandar, S.H.,M.H (Sekretaris)
21.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Mewujudkan Integritas Panitera di Lingkungan Peradilan Militer Yang Profesional Dengan Memegang Teguh Kode Etik".	Dilmiltama	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 14 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Chk Zulkopli, S.H.,MH (Panitera) - Lettu Chk Adrianus S.H. (Panmud Pidana)
22.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf di Bidang Pemberkasas Dalam Rangka Tertib Administrasi.	Dilmiltama	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 19 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Rio Matauseja, S.H. (Analisis Perkara Peradilan) - Muhammad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan)
23.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Penguatan Kompetensi Panitera dan Staf di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Upaya Hukum"	Dilmiltama	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 26 Oktober 2020 s/d 28 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Lettu Chk Adrianus S.H. (Panmud Pidana) - Serka Hendra Yanto, S.H. Pengelola Perkara - Rio Matauseja, S.H. (Analisis Perkara Peradilan) - Muhammad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan)
24.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme Umum dan Militer seluruh Indonesia	Balitbang Diklatkumdil	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 16 Oktober 2020 s/d 12 November 2020	Letkol Chk Dedy Darmawan, S.H.,M.H (Pokkimmil Gol.V).
25.	Pelaksanaan Sosialisasi Direktori Putusan V.3	Ditjen Badilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 9 November 2020	- Kapten Ayik Triandi Asmara, S.H. (Panmud Hukum)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

				- Muhammad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan)
26.	Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 11 November 2020	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Letkol Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. (Wakadilmil) - Letkol Chk Dedi Darmawan, S.H., M.H Pokkimmil Gol. V) - Letkol Ck Suradi Sungkawatmojo, S.H. (Pokkimmil Gol.V) - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H (Pokkimmil Go.VI) - Mayor Chk Jasdar, S.H.,M.H Pokkimmil Gol.VI) - Mayor Chk Zulkopli, S.H.,M.H (Panitera) - Mayor Chk Farid Iskandar, S.H.,M.H (Sekretaris)
27.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer	Balitbang Diklat Kumdil	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 31 Agustus s/d 18 September 2020	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Letkol Chk Dedy Darmawan, S.H.,M.H (Pokkimmil Gol.V).

H. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

A) KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN.

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tahun 2020 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu Personel Militer (Prajurit TNI) yang Organik maupun Bantuan Personil, PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang Organik maupun Bantuan Personil dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Berdasarkan Struktur Organisasi, dapat dilihat bahwa SDM di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, terutama untuk personel militer dan PNS,



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------



tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi lagi dalam bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Sedangkan untuk Status Personil yang masih merupakan Bantuan Personil dari Kodam setempat dan PPNPN belum termasuk ke dalam susunan Struktur Organisasi, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNPN dalam struktur organisasi, walaupun adanya Bantuan Personil ini begitu juga dengan PPNPN menunjang kinerja dan tugas pokok Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Secara rinci, SDM di Pengadilan Militer III-19 Jayapura ditunjukkan dalam tabel berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

I	Teknis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	Kosong
		Pokkimmil	5 Orang
		Panitera	- Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panitera Pengganti	1 Orang
		Pelaksana Panmud Pidana	3 Orang
		Pelaksana Panmud Hukum	1 Orang
		Jumlah Teknis 15 Orang	
II	Non Teknis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Pelaksana Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Pelaksana Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
		Pelaksana Subbag Keuangan	1 Orang
		Pelaksana Subbag Umum	Kosong
		Jumlah Non Teknis 8 Orang	
III	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong
<ul style="list-style-type: none"> • Organik adalah Sumber Daya Manusia yang masuk dalam Struktur Organisasi. • Bantuan Personil dari Kodam setempat sejumlah 1 orang dengan status TNI • PPNPN dengan jumlah 3 Orang. Bantuan Personil dari Kodam setempat dan PPNPN tidak masuk dalam Struktur Organisasi.			

1. Sebaran Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Ditinjau dari status Kepegawaian, Kegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. Sedangkan Bantuan Personil dari Kodam setempat sewaktu-waktu dapat ditarik dari Satuannya, sehingga hanya bersifat sementara. Pada Tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah 3 orang BP yang berasal dari Kodam setempat, namun terakhir pada pertengahan Oktober 2020 sudah ditarik oleh Satuan asalnya, sehingga jumlah personil berkurang menjadi 25 orang dari yang sebelumnya berjumlah 28 orang.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Status Kepegawaian Organik	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	13	52
2	PNS	8	32
3	CPNS	-	-
4	PPNPN	3	12
5	BP (Militer)	1	4
Jumlah Total		25	100
1	Militer	13	52
2	PNS	8	32
3	CPNS	-	-
4	PPNPN	3	12
5	BP (Militer)	1	4
Jumlah Total		25	100

T

Tabel III.3

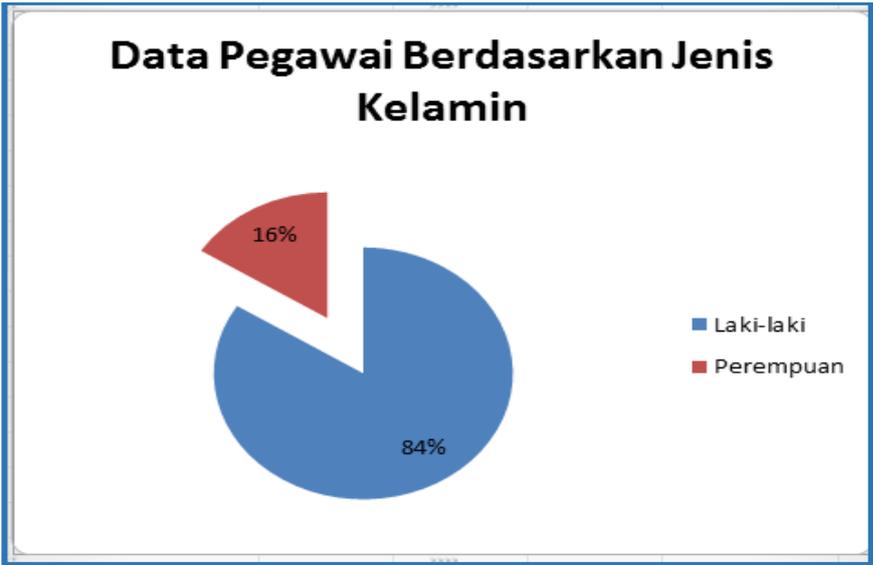
Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Organik

2. Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	13	0
2	PNS	6	2
3	CPNS	-	-
4	PPNPN	1	2
5	BP (Militer)	1	0
Jumlah Total		21	4
Prosentase		84	16



a. Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

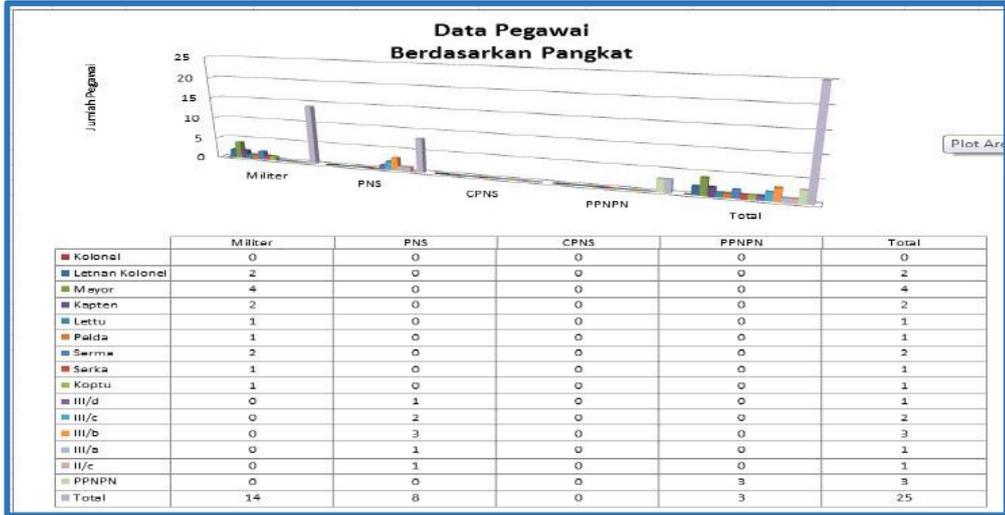
Sebaran Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			
		Militer	PNS	CPNS	PPNPN
1	Kolonel	-	-	-	-
2	Letnan Kolonel	2	-	-	-
3	Mayor	4	-	-	-
4	Kapten	2	-	-	-
5	Lettu	1	-	-	-
6	Pelda	1	-	-	-
7	Serma	2	-	-	-
8	Serka	1	-	-	-
9	Koptu	1	-	-	-
10	III/d	-	1	-	-
11	III/c	-	2	-	-
12	III/b	-	3	-	-
13	III/a	-	1	-	-
14	II/c	-	1	-	-
15	PPNPN	-	-	-	3
Jumlah Total		14	8	-	3



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

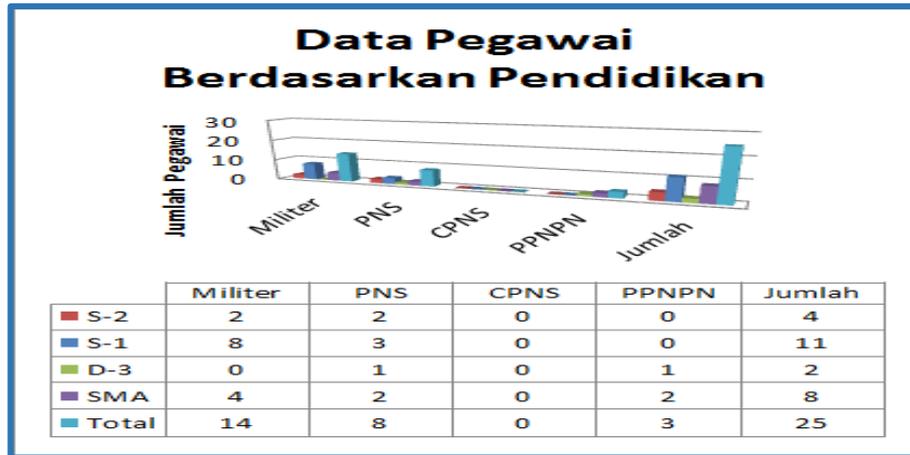


b. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan dari seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang terdiri personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah
		Militer	PNS	CPNS	PPNPN	
1	S-2	2	2	-	-	4
2	S-1	8	3	-	-	11
3	D-3	-	1	-	1	2
4	SMA	4 (1 BP)	2	-	2	8
Total		14	8	-	3	25



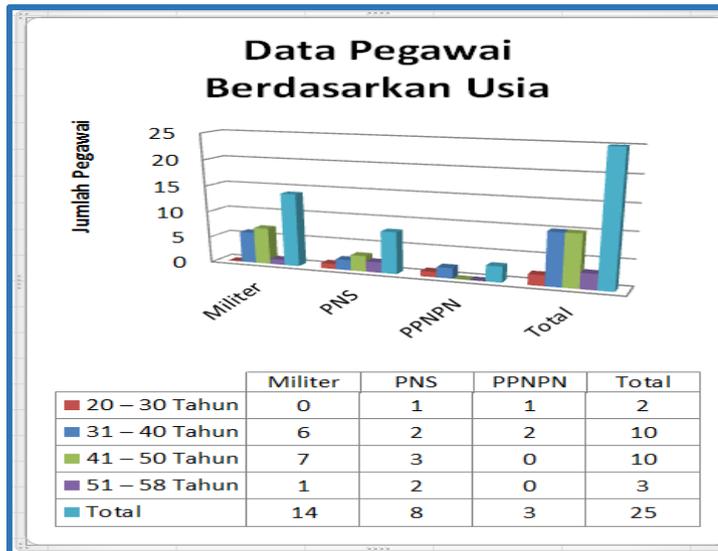
Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

c. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel III.7 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	-	1	1	2
2	31 – 40 Tahun	6 (1 BP)	2	2	10
3	41 – 50 Tahun	7	3	-	10
4	51 – 58 Tahun	1	2	-	3
Total		14	8	3	25



Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

B) MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan Pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjadalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para Pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang Pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. Mutasi Keluar

Dalam tahun 2020 terdapat 6 (enam) Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk penempatan atas jabatan tertentu di organisasi lain. Tabel berikut menguraikan tentang



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama tahun 2020.

Tabel III.8 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Irwan Idris, SH. Kapten chk	Panmud Pidana Mutasi ke Dilmil III-12 Surabaya	W3. Mil. 08/Sprin/12/KP.04.6/1/2 020 Tanggal 16.01.2020	16.01.2020
2	M. Idris, SH. Letnan Kolonel Sus 524413	Anggota Pokkimmil Gol. V Mutasi ke Dilmil II- 09 Bandung	W3. Mil. 08/Sprin/43/KP.04.6/4/2 020 Tanggal 09.04.2020	13.04.2020
3	Erwin Kristiyono, SH. Letnan Kolonel Sus 527136	Anggota Pokkimmil Gol. V Mutasi ke Dilmil II-09 Bandung	W3. Mil. 08/Sprin/42/KP.04.6/4/2 020 Tanggal 09.04.2020	13.04.2020
4	Sugiarto, SH. Kolonel Chk 548431	Kadilmil III-19 Jayapura Mutasi ke Dilmil III-12 Surabaya	W3. Mil. 08/Sprin/54/KP.04.6/5/2 020 Tanggal 08.05.2020	11.05.2020
5	Dearby Tatulus Peginusa, SH. Mayor Chk 11030011271278	Panitera Dilmil III-19 Jayapura Mutasi ke Dilmilti III- Surabaya	W3. Mil. 08/Sprin/ /KP.04.6/12/2020 Tanggal 28.12.2020	29.12.2020
6	Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, SH. Mayor Chk 21940113631072	Anggota Pokkimmil Gol. V Mutasi ke Dilmil II-09 Bandung	W3. Mil. 08/Sprin/ /KP.04.6/12/2020 Tanggal 28.12.2020	29.12.2020

2. Mutasi Masuk

Adanya mutasi masuk beberapa Pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang mutasi keluar. Selama tahun 2020 terdapat 4 (empat) Pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama tahun 2020 yaitu :

Tabel III.9 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus 519172	Panmud Pidana	SK Dirjen Badilmiltun No. 1126/Djmt/Kep/11/2019 tgl. 29/11/2019	02.01.2020



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

2	Prima Ledy Yudoyono, S.T Han., S.H.	Panmud Hukum	SK Kadilmil II-08 Jakarta No. W2-Mil01/09/Sprin/I/ 2020 tgl. 29/01/2020	31.01.2020
3	Muhamad Khazim, SH Letnan Kolonel Chk 627529	Kadilmil III-19 Jayapura	296/Djmt/Ratgas/3/2020 Tanggal 11.03.2020	15.05.2020
4	Arif Sudibya, SH Mayor Chk 110100363808780000	Anggota Pokkimmil Gol V	SK Pengadilan Militer Utama No. Sprin/170/KP.04.6/III/2020 tgl. 13/03/2020	30.04.2020

C) PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cukup untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap Pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat Reguler, kenaikan pangkat Pilihan dan kenaikan pangkat Anumerta. Selama tahun 2020, terdapat 4 (empat) orang Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerima kenaikan pangkat, dimana seluruhnya menerima kenaikan pangkat Reguler. Dan 4 (keempat) orang personil tersebut adalah Militer. Kenaikan pangkat Reguler ini diterima karena Personel dan tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.10

Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Irson Jaya, SH 21050275730484	Dari Serka menjadi Serma	SK Kadilmiltama No. Sprin/185/KP.04.1/III/2020 tgl. 30/03/2020	01.04.2020
2	Boy Irianto Jaya 21050275990286	Dari Serka menjadi Serma	SK Kadilmiltama No. Sprin/185/KP.04.1/III/2020 tgl. 30/03/2020	01.04.2020
3	Budi Santosa, S.H., M.H. 519172	Dari Lettu Sus menjadi Kapten Sus	Kep/285-TIII/IX/2020 tgl. 16.09.2020	01.10.2020
4	Gatot Endro Darminto, 31970156580975	Dari sertu menjadi Serka	Kep/722-33/IX/2020 tgl. 07.09.2020	01.10.2020

2. Kenaikan Jabatan

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena Pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu Struktur Organisasi. Ada 2 orang personil yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dalam tahun 2020

Tabel III.11 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Budi Santosa, S.H., M.H. 519172	dari Panmud Pidana menjadi Panitera	W3. Mil. 08/Sprin/ /KP.04.6/12/2020 Tanggal 29.12.2020	29.12.2020
2	Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, SH	dari Anggota Pokkimmil Golongan VI menjadi Golongan V	296/Djmt/Ratgas/3/2020 Tanggal 11.03.2020	02.04.2020



D) PENSUN

Pensiun berlaku bagi Pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun. Sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun atau Personil tersebut meninggal dunia.

Di tahun 2020 ini ada Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang mencapai usia pensiun, dikarenakan meninggal dunia karena terkena Covid 19, sehingga per tgl 23 Juni 2020 di ajukan pensiun Anumerta dengan pangkat terakhir Penata/III.C an. Habibur Rohman, SH Pangkat Penata Muda TK.I NIP. 19731026 1998 03 1002.

Pada tahun 2021 akan ada Pegawai yang Pensiun yaitu Kasubbag. Umum dan Keuangan an. Djemi Inuhan Penata TK. I NIP. 19630919 1991 03 1003. Informasi ini disampaikan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagian personil kepada Pimpinan atas.

E) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain Diklat, termasuk pula didalamnya Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai badan Peradilan Tingkat Pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Diklat, namun Pengadilan Militer III-19 Jayapura akan mendukung dan memfasilitasi Pegawaiinya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti Diklat, Bimtek atau Sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.12 Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Akurasi Data SAIBA dan SIMAK-BMN	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	Jayapura / 7 Januari 2020 s.d. 11 Januari 2020	1. Lilik Ernawati, S.E., M.Ak. 2. Jerly Stevi Kowal,



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

				S.E.
2	Pembinaan Kepala, Panitera dan Sekretaris di Lingkungan Peradilan Militer	Pengadilan Militer Utama	Jakarta / 3 Februari 2020	1. Kolonel Chk Sugiarto, S.H. 2. Mayor Chk Dearby T. Peginusa, S.H. 3. Kapten Chk Iskandar, SH., MH.
3	Pelatihan Calon Hakim Arbitase	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Jayapura / 20 Februari 2020	1. Letkol Chk R.Ach Agus P Wijoyo, S.H. 2. Mayor Chk Dendi Sutyoso S S, S.H. 3. Mayor Laut (KH) M. Zainal Abidin, S.H.
4	Pelatihan Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen TA 2020 dan Pelatihan English Effective Presentation	Pusdiklat Menpim MA RI	Bogor / 16 Februari s.d. 26 Februari 2020	Lilik Ernawati, S.E.
5	Pelatihan Sertifikasi Hakim Juru Bicara Pengadilan dan Pelatihan English Effective Presentation	Pusdiklat Menpim MA RI	Bogor / 10 Maret s.d. 21 Maret 2020	Letkol Sus M. Idris, SH
6	Bimbingan Teknis SIPP Bagi Administrator di Lingkungan Peradilan Militer	Ditjen Badilmiltun	Yogyakarta / 11 Maret s.d. 13 Maret 2020	1. Serka Boy Irianto Jaya 2. Herdian Syahfrudin, A.Md.T.
7	Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara	Kementerian Keuangan RI	Maret 2020	1. Suzi M ButarButar, SE., M.Si. 2. Lilik Ernawati, SE., M.Ak
8	Pelatihan Creative Thinking Technique secara Online TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	April 2020	Suzi M ButarButar, S.E., M.Si.
9	Digital Learning Manajemen Keuangan Negara TA 2020	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	April 2020	Jerly Stevi J Kowal, S.E.
10	Pelatihan Online Manajemen Resiko	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	6 Mei s.d. 7 Juni 2020	Mayor Chk Dearby T Peginusa, S.H.
11	Pelatihan Online English Effective Presentation TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	22 s.d. 30 Juni 2020	Suzi M ButarButar, S.E., M.Si.
12	E-learning Pengantar Manajemen Keuangan Negara TA 2020	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	29 Juni s.d. 3 Juli 2020	1. Suzi M ButarButar, S.E., M.Si 2. Lilik Ernawati, S.E., M.Ak. 3. Jerly Stevi J Kowal, S.E.
13	Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim	Komisi Yudisial	1 s.d. 2 Juli 2020	Mayor Chk Dendi Sutyoso S S, S.H.
14	Webinar Menulis Laporan Efektif	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	13 s.d. 14 Juli 2020	Suzi M ButarButar, SE., M.Si
15	Akurasi Data SAIBA dan SIMAK-BMN	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	Jayapura / 15 Juli 2020	1. Lilik Ernawati, S.E., M.Ak. 2. Jerly Stevi Kowal,



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

				S.E.
16	Pelatihan Online Seminar Pola Pikir Pertumbuhan	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	20 Juli 2020	Kapten Chk Iskandar, S.H., M.H.
17	Pelatihan Online dari Tempat Tugas English Effective Presentation Gelombang III Tahap I Kelas 19 s.d. 36 TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	16 s.d. 24 Juli 2020	1. Lettu Chk Prima Ledy Y, ST.Han, SH 2. Jerly Stevi J Kowal, SE
18	Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer	Ditjen Badilmiltun MA RI	10 s.d. 13 Agustus 2020	Mayor Chk Arif Sudibya, SH
19	Pelatihan Online dari Tempat Tugas Menulis Laporan Efektif bagi Sekretariat	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	10 s.d. 14 Agustus 2020	Suzi M ButarButar, S.E., M.Si.
20	Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan dari Tempat Tugas TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	10 s.d. 15 Agustus 2020	Letkol Chk M. Khazim, S.H.
21	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2021	Dilmilti III Surabaya	12 Agustus 2020	1. Kapten Chk Iskandar, SH., MH. 2. Djemi Inuhan 3. Lilik Ernawati, S.E., M.Ak. 4. Jerly Stevi J Kowal, S.E.
22	Bimbingan Teknis Panitera di Lingkungan Peradilan Militer	Ditjen Badilmiltun MA RI	24 s.d. 27 Agustus 2020	1. Lettu Sus Budi Santosa, SH., MH. 2. Lettu Chk Prima Ledy Y, ST.Han., SH.
23	E-Learning Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Angkatan IV TA 2020	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	Agustus 2020	Suzi M ButarButar, S.E., M.Si.
24	Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	31 Agustus s.d. 4 Desember 2020	Lilik Ernawati, S.E., M.Ak.
25	Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer Bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	28 Agustus s.d. 18 September 2020	1. Letkol Chk M. Khazim, SH 2. Mayor Chk Dendi Sutyoso S S, SH.
26	Kursus Jabatan Hakim Militer TNI TA 2020	Kodiklat TNI	Agustus 2020 s.d. November 2020	1. Letkol Chk R. Ach. Agus P Wijoyo, SH 2. Mayor Chk Arif Sudibya, SH 3. Mayor Chk Rhubi Iswandi T, SH 4. Mayor Chk Tabah Prasetya, SH
27	Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer	Ditjen Badilmiltun MA RI	7 s.d. 10 September 2020	Mayor Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH.
28	Pelatihan Online Basic Image Editing With Adobe Photoshop TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	14 s.d. 18 September 2020	Herdian Syahfrudin, A.Md.T.
29	Bimbingan Teknis Panitera	Ditjen Badilmiltun MA RI	28 September 2020	1. Mayor Chk



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

	Peradilan Militer		s.d. 1 Oktober 2020	Dearby T Peginusa, S.H. 2. Lettu Sus Budi Santosa, SH., MH.
30	Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan dari Tempat Tugas TA 2020	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	5 s.d. 9 Oktober 2020	Letkol Chk M. Khazim, SH.
31	Bimbingan Teknis Zona Integritas Bagi Para Pimpinan dan Pelaksana Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Ditjen Badilmiltun MA RI	6 s.d. 9 Oktober 2020	Letkol Chk M. Khazim, SH.
32	Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer	Dilmiltama	14 s.d. 16 Oktober 2020	1. Mayor Chk Dearby T Peginusa, SH. 2. Kapten Sus Budi Santosa, SH., MH. 3. Pelda Bah Wahyu Jatmiko
33	Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim	Komisi Yudisial	25 s.d. 26 November 2020	1. Mayor Chk Dendi Sutyoso S S, SH. 2. Mayor Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH.
34	Pelatihan Teknis Fungsional Penyamaan Persepsi Pembuatan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	30 November s.d. 4 Desember 2020	1. Letkol Chk R. Ach. Agus P Wijoyo, SH 2. Mayor Chk Arif Sudibya, SH 3. Mayor Chk Rhubi Iswandi T, SH 4. Mayor Chk Tabah Prasetya, SH



**BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN
PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan keuangan negara, pengelola keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kasub Keuangan dan Pelaporan, namun secara khusus telah dibentuk pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung jawab kegiatan yang dijabat oleh kKasub Rencana Program dan Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPD yang dijabat oleh Kasub keuangan dan pelaporan, bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta staf Pengelola Keuangan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Tahun anggaran 2020 sesuai DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mencairkan dana sebagai berikut:

1. **DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)**

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) nomor: SP DIPA-005.01.2.663300/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp 6.569.169.000,-(enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 10 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp 6.083.591.000,- (enam miliar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri dari: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp 6.083.591.000,- (enam milyar delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari:

a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi, terdiri dari:

1) Layanan dukungan manajemen satker sebesar Rp 99.220.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

2) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp 4.337.482.000,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

3) Layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 1.398.539.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), terdiri dari:

> Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI (layanan sarana dan prasarana internal) sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
pagu	Rp. 8.228748.000,-	100 %
realisasi	Rp. 8.072.512.326,-	98.10 %
sisa	156.235.674,-	01.90 %

dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98.10 %.

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : SPDIPA-005.05.2.663301/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp 255.450.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali, yang terdiri dari:

➤ Program peningkatan manajemen peradilan, sebesar Rp 255.450.000,-(dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu yang terdiri dari :

- 1). Belanja pengiriman surat
dinas pos pusat Rp. 44.950.000,-
- 2). Belanja bahan Rp. 11.852.000,-
- 3). Belanja jasa profesi Rp. 100.000,-
- 4). Belanja barang persediaan
barang konsumsi Rp. 18.000.000,-
- 5). Belanja perjalanan transport
dalam kota Rp. 2.205.000,-

Layanan dukungan penyelesaian perkara

- belanja perjalanan biasa binwas Rp. 9.400.000,-
- Sidang diluar gedung pengadilan - hakim terbang
- belanja perjalanan biasa sidang Rp.168.970.000,-,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
pagu	Rp. 255.450.000,-	100 %
realisasi	250.534.600,-	98.08 %
siswa	4915.400,-	01.92 %

dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98.08 %

B. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi pagu belanja pegawai. Pagu awal belanja pegawai berjumlah Rp. 6.615.167.000,- (enam milyar enam ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 2.825.167.000,-



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

(dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya penyesuaian pagu minus belanja pegawai. Setelah melalui revisi, maka pagu DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 4.315.574.000 (empat milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.1 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah	
51	Belanja Pegawai	Rp.	2.825.167.000
52	Belanja Barang	Rp.	1.465.407.000
53	Belanja Modal	Rp.	25.000.000
Jumlah		Rp.	4.315.574.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4
Januari	Rp. 204.325.497	Rp. 83.863.459	Rp. 0
Februari	Rp. 210.430.507	Rp. 76.342.257	Rp. 0
Maret	Rp. 211.315.895	Rp. 76.557.573	Rp. 0

1	2	3	4
April	Rp. 210.259.651	Rp. 142.065.319	Rp. 0
Mei	Rp. 369.931.359	Rp. 79.830.000	Rp. 0
Juni	Rp. 174.746.937	Rp. 112.280.160	Rp. 25.000.000
Juli	Rp. 203.088.827	Rp. 225.891.679	Rp. 0
Agustus	Rp. 412.099.473	Rp. 102.527.696	Rp. 0
September	Rp. 201.795.757	Rp. 76.123.200	Rp. 0
Oktober	Rp. 183.975.749	Rp. 144.038.434	Rp. 0
November	Rp. 183.642.748	Rp. 59.229.178	Rp. 0
Desember	Rp. 174.380.424	Rp. 158.133.843	Rp. 0
Jumlah	Rp. 2.739.992.824	Rp. 1.336.882.798	Rp. 25.000.000



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.315.574.000	100
Realisasi	Rp. 4.101.875.622	95,05
Sisa	Rp. 213.698.378	4,95

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 95,05 %

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Kuasa Pengguan Anggaran (KPA). Dari DIPA 05 tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 0	Rp. 20.180.000
Maret	Rp. 2.001.575	Rp. 0
April	Rp. 0	Rp. 0
Mei	Rp. 0	Rp. 0
Juni	Rp. 0	Rp. 0
Juli	Rp. 3.071.475	Rp. 0
Agustus	Rp. 0	Rp. 0
September	Rp. 0	Rp. 20.180.000
Oktober	Rp. 2.503.575	Rp. 0
November	Rp. 0	Rp. 20.180.000
Desember	Rp. 11.238.150	Rp. 0
Jumlah	Rp. 18.814.775	Rp. 60.540.000



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 85.284.000	100
Realisasi	Rp. 79.354.775	93,05
Sisa	Rp. 5.929.225	6,95

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 93,05 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya. Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2020, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.145.000
2	Pelanggaran	Rp. 95.000
3	Denda Kejahatan	Rp. 1.101.000.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 1.480.000
Jumlah Total		Rp 1.103.720.000

C. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.830.869.302 atau mencapai 99.36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.849.194.000

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6
1.	2.849.194.000	2.830.869.302	(6)	99.36	18.324.698

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- 1) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.
- 2) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0. –

b. Revisi DIPA

- 1) Revisi DIPA kesatu yaitu terkait Revisi Halaman III DIPA, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/14/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 2) Revisi DIPA kedua yaitu terkait penambahan Akun penanganan Covid-19, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/60/IX/2020 tanggal 02 September 2020.
- 3) Revisi DIPA ketiga yaitu terkait penambahan Akun penanganan Covid-19, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/61/IX/2020 tanggal 08 September 2020.
- 4) Revisi DIPA keempat oleh Eselon I terkait pengambilan / pengurangan Anggaran DIPA 01 yang tidak terserap sampai dengan Desember 2020 tanggal 02 Oktober 2020.
- 5) Revisi DIPA kelima yaitu terkait kekurangan Anggaran pada Pagu Listrik, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/74/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- 1) Koreksi Data/Pembetulan SPM (Nihil)
- 2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020 yang telah di setor melalui BRI sejumlah Rp. 10.678.400,- pada tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan NTB Nomor 201229536692 dan NTPN Nomor 2EBC148VUA708JB0.

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 47.926.000,- atau mencapai 92.91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	51.585.000	47.926.000	92.91	3.659.000

D. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki 2 (dua) DIPA yaitu dari Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dan DIPA BUA Mahkamah Agung RI terdiri dari :

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA- 005.01.2.663335/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 ini mengalami 8 (delapan) kali revisi, yaitu

1. Revisi pertama yaitu revisi pagu anggaran, pergeseran antar Akun belanja pegawai dan belanja barang dengan pagu awal sejumlah Rp. 5.642.296.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya penambahan pagu anggaran pada belanja pegawai pada pembulatan dan penambahan dan pengurangan pagu anggaran pada belanja barang.
2. Revisi kedua yaitu untuk revisi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan revisi halaman III DIPA. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
3. Revisi ketiga yaitu revisi pagu anggaran dengan pagu sejumlah Rp. 5.642.296.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Revisi pergeseran antar akun pada belanja Operasional dan Pemeliharaan kantor dan adanya tambahan akun Penanganan Pandemi Covid 19.

4. Revisi keempat yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp 5.642.296.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), menjadi sejumlah Rp. 5.608.906.000,- (lima milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA dimana dirasa masih ada lebih di pagu anggaran belanja Operasional di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang selanjutnya pagu lebih ini dialihkan ke Pengadilan lain yang masih kekurangan pagu anggaran di belanja pegawai.

5. Revisi kelima yaitu Pergeseran antar akun belanja modal dengan jumlah pagu sebesar Rp. 5.608.906.000,- (lima milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Dan juga revisi halaman III DIPA yang dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.

6. Revisi keenam yaitu untuk merevisi pagu anggaran, dari pagu sebesar sejumlah Rp. 5.608.906.000,- (lima milyar enam ratus tiga delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.588.906.000 (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA untuk menutup pagu minus pada belanja pegawai.

7. Revisi ketujuh yaitu revisi pagu anggaran, pergeseran antar akun belanja barang dan belanja modal, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan belanja modal serta tidak merubah Pagu Anggaran.

8. Revisi kedelapan yaitu revisi pagu anggaran, pergeseran antar akun belanja barang , Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan tidak merubah Pagu Anggaran

Setelah melalui 8 (delapan) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-14 Denpasar di tahun 2020 menjadi sejumlah Rp. 3.588.906.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.1 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.292.811.000,-
52	Belanja barang & non Operasional	Rp. 1.121.095.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 175.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		Modal
	Pegawai	Barang	
Januari	Rp. 152.795.353,-	Rp. 66.131.105,-	0,-
Februari	Rp. 161.136.460,-	Rp. 112.390.182,-	Rp. 26.482.000,-
Maret	Rp. 159.401.460,-	Rp. 99.592.249,-	0,-
April	Rp. 160.708.460,-	Rp. 95.757.643,-	0,-
Mei	Rp. 349.504.538,-	Rp. 67.669.426,-	Rp. 137.796.000,-
Juni	Rp. 183.464.605,-	Rp. 65.357.023,-	0,-
Juli	Rp. 167.407.821,-	Rp. 98.347.970,-	0,-
Agustus	Rp. 312.441.011,-	Rp. 88.206.088,-	Rp. 10.450.000,-



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

September	Rp. 148.568.148,-	Rp. 67.566.552,-	0,-
Oktober	Rp. 149.299.491,-	Rp. 64.911.195,-	0,-

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 3.588.906.000,-	100
Realisasi	Rp. 3.494.987.527,-	97,38
Sisa	Rp. 93.918.473,-	2,62

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 97,38 %

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk perubahan pejabat Kuasa Penguan Anggaran (KPA).

Dari DIPA 05 di tahun 2020, Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 61.097.000,- (Enam puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Realisasi DIPA Dirjen pada bulan Januari 2020 sebesar Rp 33.183.200,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) terdapat pengembalian untuk belanja Jaldis sidang diluar Gedung dengan akun 524111 sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). Sehingga realisasi pagu pada bulan february 2020 sebesar Rp. 33.177.200,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA 05

Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA 05

Belanja	Belanja Barang	
	Belanja Barangan Persediaan dan Jasa Pos	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp 0,-	Rp 33.183.200,-
Pebruari	Rp 353.400,-	Rp 0,-
Maret	Rp 400.000,-	Rp 0,-
April	Rp 197.700,-	Rp 0,-
Mei	Rp 200.000,-	Rp 0,-
Juni	Rp 200.000,-	Rp 0,-
Juli	Rp 328.000,-	Rp 21.880.000,-
Agustus	Rp 21.880.000,-	Rp 0,-
September	Rp 400.000,-	Rp 0,-
Oktober	Rp 195.000,-	Rp 0,-
Nopember	Rp 536.000,-	Rp 0,-
Desember	Rp 327.000,-	Rp 0,-
Jumlah	Rp 3.535.100,-	Rp 55.057.200,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu Realisasi	Rp. 61.097.000,-	100
Sisa	Rp. 58.592.300,-	95,90
	Rp. 2.504.700,-	4,10



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 95,90 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-14 Denpasar.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2020 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1.	Kejahatan	Rp. 355.000,-
2	Pelanggaran	Rp. 152.500,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 502.000.000,-
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 1.150.000,-
Jumlah total		Rp. 503.657.500,-

E. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) Nomor: SP DIPA-005.01.2.663342/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp4.760.265.000,-(Empat miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan telah mengalami revisi sebanyak 2 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp 2.817.865.000,- (Dua



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp 2.792.865.000,- (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, terdiri dari:
 - 1) Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp1.676.256.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - 2) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) sebesar Rp1.116.609.000,- (Satu miliar seratus enam belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

2. **DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)**

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) Nomor : SP DIPA-005.05.2.663343/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp80.172.000,- (Delapan puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan tidak mengalami Revisi atau perubahan, yang terdiri dari:

1. Pencatatan Register Perkara, yang terdiri dari:
 - Pegadaan dan Penjilidan berkas perkara sebesar RP.80.000,-
 - ATK Perkara sebesar Rp. 2.250.000,-
2. Penetapan Hari Sidang (Pengiriman Rensid) sebesar Rp. 240.000,-



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

3. Pemeriksaan disidang pengadilan sebesar Rp. 6.075.000,- terdiri dari :
 - Konsumsi persidangan sebesar Rp. 4.375.000,-
 - Honorarium saksi ahli sebesar Rp. 900.000.-
 - Pemeriksaan barang bukti diluar ruang sidang sebesar Rp. 800.000,-
4. Minutasi/ Upaya Hukum sebesar Rp. 1.365.000,- terdiri dari Pengadaan dan penjilidan berkas perkara Rp. 1.365.000,-
5. Penerimaan Petikan Salinan Putusan kepada oditur, terdakwa, Ankum, Papera, dan POM sebesar Rp. 3.900.000, terdiri dari :
 - Pengiriman Petikan Putusan sebesar Rp. 3.900.000,-
6. Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan sebesar Rp.300.000,-
7. Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama sebesar Rp 840.000,-
8. Penanganan perkara Banding, Kasasi, PK, dan Grasi di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 390.000,-
9. Perkara Pengadilan Militer yang diselesaikan melalui sidang di luar pengadilan sebesar Rp 64.012.000,-

F. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

Pada DIPA 01 telah dilakukan revisi sebanyak 5 (Lima) kali seiring dengan perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian revisi DIPA 01 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel IV.1. Revisi DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Tanggal	Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)	Jumlah (Rp)
----	--------	---------	--------------	-------------	------------	-------------



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1	DIPA awal	12-11-2019	6.313.297.000	1.081.116.000	25.000.000	7.430.213.000
2	Revisi 1	15-02-2020	6.313.297.000	1.081.116.000	25.000.000	7.430.213.000
3	Revisi 2	03-07-2020	6.313.297.000	1.081.116.000	25.000.000	7.419.413.000
4	Revisi 3	02-09-2020	6.313.297.000	1.081.116.000	25.000.000	7.419.413.000
5	Revisi 4	02-10-2020	2.812.297.000	1.081.116.000	25.000.000	3.918.413.000
6	Revisi 5	14-12-2020	2.812.297.000	1.081.116.000	25.000.000	3.918.413.000

1. Revisi Ke-1 Tanggal 15 Februari 2020 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
2. Revisi ke-2 Tanggal 3 Juli 2020 Tentang pengurangan belanja sewa rumah dinas hakim sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA dimana dirasa masih ada kelebihan anggaran di pagu belanja sewa rumah dinas hakim yang selanjutnya pagu lebih ini dialihkan ke Pengadilan lain yang masih kekurangan pagu anggaran tersebut.
3. Revisi ke-3 tanggal 2 September 2020 tentang POK yaitu pergeseran antar akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak merubah Pagu Anggaran.
4. Revisi ke-4 tanggal 2 Oktober 2020 tentang pengurangan belanja pegawai sebesar Rp. 3.501.000.000. dari pagu sebelumnya Rp. 7.430.213.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 3.918.413.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA untuk mengambil kelebihan pagu belanja pegawai untuk dialihkan ke Pengadilan lain.
5. Revisi ke-5 tanggal 14 Desember 2020 tentang POK yaitu pergeseran antar akun belanja pegawai untuk menutupi pagu minus dan akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak merubah Pagu Anggaran.

Setelah melalui 5 (lima) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 2020 menjadi sebesar 3.918.413.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga belas ribu



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

rupiah) dari pagu awal sebesar Rp. 7.430.213.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Pagu anggaran ini

terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV.2. Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.812.297.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.081.116.000
53	Belanja Modal	Rp. 25.000.000
Jumlah		Rp. 3.918.413.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3. Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)
Januari	179.894.074	15.134.000	0
Pebruari	126.819.946	75.766.830	0
Maret	182.983.665	183.143.058	0
April	189.287.678	40.225.000	0
Mei	361.529.240	94.961.100	0
Juni	177.109.536	73.508.800	0
Juli	183.018.142	71.110.900	25.000.000



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Agustus	337.446.233	71.110.900	0
September	172.732.851	68.507.700	0
Oktober	153.521.406	104.506.397	0
Nopember	152.609.449	68.184.450	0
Desember	155.165.918	140.134.000	0
Jumlah	2.430.735.480	1.006.735.983	25.000.000

sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4. Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Pagu	Rp. 3.918.413.000	100
Realisasi	Rp. 3.462.471.463	88.36
Sisa	Rp. 455.941.670	11.64

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2020 adalah sebesar 88,36% atau Rp. 3.462.471.463,- (Tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Penyerapan anggaran hanya sebesar 88,36% dikarenakan terdapat kelebihan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 381.561.653,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Kelebihan alokasi anggaran belanja pegawai terbesar terdapat pada akun belanja tunjangan fungsional PNS. Belanja barang yang tidak terserap sebanyak Rp. 89.505.017,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh belas rupiah) diantaranya pada akun belanja sewa rumah dinas hakim dan belanja sewa internet.

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663357/2020 tanggal 12 November 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 05 dilakukan revisi sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan dikeluarkannya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

petikan pada tanggal 18 November 2020 dengan perubahan POK (revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap) dan Hal III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB).

Dari DIPA 05 di tahun 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 115.930.000 (Seratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5. Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	
	Belanja Barang Persediaan dan Jasa Pos	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Pebruari	Rp. 1.794.000	Rp. 28.094.800
Maret	Rp. 1.645.000	Rp. 0
April	Rp. 1.952.400	Rp. 0
Mei	Rp. 1.541.900	Rp. 0
Juni	Rp. 1.940.000	Rp. 0
Juli	Rp. 1.000.000	Rp. 0
Agustus	Rp. 1.796.900	Rp. 0
September	Rp. 2.000.000	Rp. 25.850.000
Oktober	Rp. 1.995.000	Rp. 0
November	Rp. 1.716.000	Rp. 36.835.200
Desember	Rp. 4.980.900	Rp. 0
Jumlah	Rp. 22.362.100	Rp. 89.780.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6. Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
--------	-------------	----------------



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pagu	115.930.000	100
Realisasi	112.142.100	96,73
Sisa	3.787.900	3,27

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 96,73 % atau sebesar Rp. 112.142.100,- (seratus dua belas juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara karena pengelolaan biaya perkara dikelola oleh Oditurat Militer.

G. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) Nomor :
005.01.2.663360/2020 tanggal 12-11-2019 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai :

Pagu awal : Rp. 1.839.474.000,-
(Satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Realisasi : Rp. 1.791.965.039,-
(Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah)

Sisa : Rp. 47.508.961,-
(Empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

b. Belanja Barang :

Pagu awal	:	Rp. 1.210.506.000,- (Satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus enam ribu rupiah)
Realisasi	:	Rp. 1.153.979.047, (Satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah)
Sisa	:	Rp. 56.526.953,- (Lima puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)

c. Belanja Modal :

Pagu awal	:	Rp. 200.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah)
Realisasi	:	Rp. 199.967.000,- (Dua puluh enam juta rupiah)
Sisa	:	Rp. 33.000,- (nol rupiah)

DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05) : 005.05.2.663360/2020
tanggal 12-11-2019

- Pagu	:	Rp. 86.360.000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Realisasi	:	Rp. 85.383.850,- (Delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- Sisa	:	Rp. 976.150,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah)



H. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

1. DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).

Bahwa pada DIPA 01 dari BUA Nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2020 tanggal Desember 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 ini mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi pertama yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu awal sejumlah Rp. 4.714.253.000,- (Empat milyar tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.133.253.000,- (Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
Revisi pagu ini disebabkan adanya pengurangan belanja barang listrik.
- b. Revisi kedua yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp. 4.133.253.000,- (Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.451.150.000,-(Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
Revisi pagu ini disebabkan adanya tambahan akun untuk belanja pegawai.
- c. Revisi ketiga yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp. 4.451.150.000,-(Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.451.150.000,-(Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) .
Revisi pagu ini disebabkan adanya tambahan akun untuk pegawai gaji pokok dan tunjangan suami istri/ akun belanja tunjangan anak PNS.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Setelah melalui 3 (tiga) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 menjadi sejumlah Rp. 4.451.150.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah aset serta belanja pembangunan kantor. Rincian masing-masing pagu belanja tertera pada table berikut:

Tabel IV.1 Data Pagu Anggaran DIPA dari BUA (01).

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.122.351.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 1.303.799.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 25.000.000,-
Jumlah		Rp. 4.451.150.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01).

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4
Januari	215.297.996,-	125.574.699,-	0
Februari	216.323.996,-	119.462.963,-	0
Maret	215.548.996,-	65.788.758,-	24.960.000,-
April	217.569.996,-	79.848.417,-	0
Mei	382.509.749,-	79.840.125,-	0



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Juni	232.553.872,-	146.413.065,-	0
Juli	224.981.523,-	99.198.181,-	0
Agustus	437.470.323,-	64.799.990,-	0
September	223.248.523,-	67.962.125,-	0
Oktober	226.597.523,-	91.924.708,-	0
November	224.246.963,-	30.217.000,-	0
Desember	225.602.602,-	141.878.184	0

sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Realisasi anggaran DIPA dari BUA (01).

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	Rp. 4.451.150.000,-	100%
Realisasi	Rp. 4.179.638.277,-	93.90 %
Sisa	Rp. 271.511.723,-	6.10 %

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

Dipa 05 dari Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2020 tanggal 05 Desember 2019.

Dari DIPA 05 di tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.150.459.000,- (Seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan biaya perjalanan dinas sidang keliling.

Tabel IV.4 Data Pagu Anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Barang	Rp. 150.459.000,-
Jumlah		Rp. 150.459.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Tabel IV.5 Pengelolaan DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Bulan	Jumlah Belanja Barang	Belanja Sidang Keliling
1	2	3
Januari	Rp. 1.685.000,-	0
Februari	Rp. 1.685.000,-	0
Maret	Rp. 1.685.000,-	0
April	Rp. 1.685.000,-	0
Mei	Rp. 1.685.000,-	0
Juni	Rp. 1.685.000,-	0
Juli	Rp. 1.685.000,-	0
Agustus	Rp. 1.685.000,-	Rp. 43.498.000,-
September	Rp. 1.685.000,-	0
Oktober	Rp. 1.685.000,-	Rp. 29.968.000,-
November	Rp. 1.685.000,-	Rp. 56.259.000,-
Desember	Rp. Nihil	0
Jumlah	Rp. 18.535.000,-	Rp. 129.725.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Realisasi anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	Rp. 150.459.000,-	100%
Realisasi	Rp. 148.260.000,-	98.54 %
Sisa	Rp. 2.199.600,-	1.46 %

3. Keuangan dari Perkara.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2020 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Jumlah biaya perkara

No.	Perkara	Jumlah Rp.
1.	Kejahatan	Rp. 1.275.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 715.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 0
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 11.600.000,-
Jumlah		Rp. 13.590.000,-

I. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-19 Jayapura memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BUA (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor DIPA-005.01.2.663381/2020 Tanggal 05 Desember 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 ini mengalami 5 (tiga) kali revisi, yaitu :

1. Revisi pertama yaitu untuk revisi Belanja Modal pada tanggal 29 April 2020.
2. Revisi kedua yaitu untuk revisi Belanja Operasional pada tanggal 02 Juli 2020.
3. Revisi ketiga yaitu untuk merevisi Belanja Pegawai dan Belanja Operasional pada tanggal 31 Agustus 2020.
4. Revisi keempat yaitu untuk merevisi Belanja Pegawai pada tanggal 02 Oktober 2020.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

5. Revisi kelima yaitu untuk merevisi Belanja Operasional pada tanggal 12 November 2020.

Dalam tahun 2020, dari DIPA 01 Pengadilan Militer III-19 Jayapura mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 3.962.734.000,-, (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.1 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.916.374.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.021.360.000
53	Belanja Modal	Rp. 25.000.000
Jumlah		Rp. 3.962.734.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 221.339.654	Rp. 29.860.000	Rp.
Februari	Rp. 223.138.654	Rp. 109.577.600	Rp.
Maret	Rp. 221.276.654	Rp. 261.156.760	Rp.
April	Rp. 216.272.654	Rp. 20.626.800	Rp.
Mei	Rp. 418.304.837	Rp. 40.515.000	Rp.
Juni	Rp. 217.977.767	Rp. 116.745.000	Rp.
Juli	Rp. 196.812.451	Rp. 97.375.000	Rp.
Agustus	Rp. 381.759.366	Rp. 24.875.000	Rp. 25.000.000
September	Rp. 208.640.778	Rp. 72.567.800	Rp.



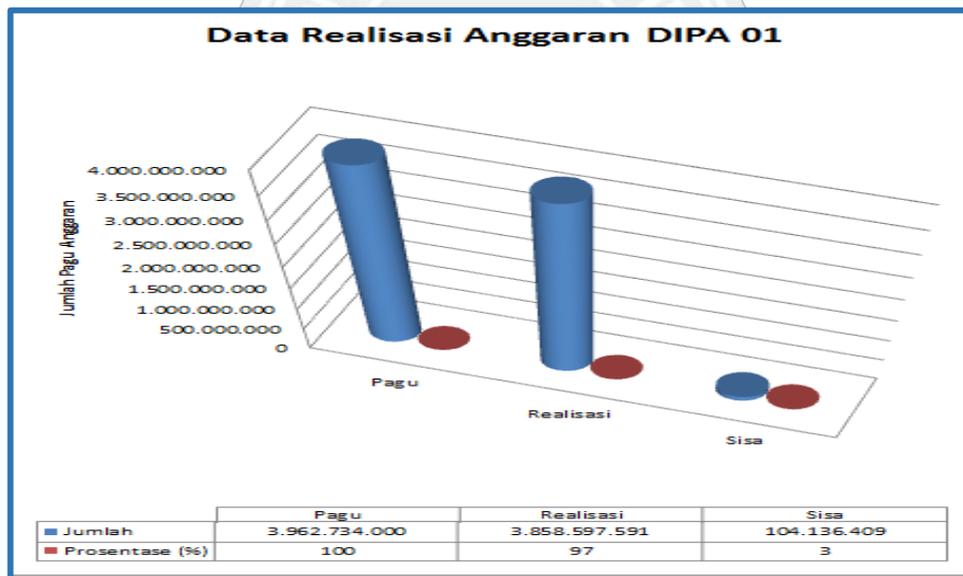
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Oktober	Rp.	17.885.194	Rp.	85.567.800	Rp.
November	Rp.	354.452.952	Rp.	59.395.000	Rp.
Desember	Rp.	176.354.170	Rp.	61.120.700	Rp.
Jumlah	Rp.	2.854.215.131	Rp.	979.382.460	Rp. 25.000.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp, 3.962.734.000	100%
Realisasi	Rp, 3.858.597.591	97%
Sisa	Rp, 104.136.409	3%



Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar **97%**.

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor DIPA-005.05.2.663382/2020 Tanggal 05 Desember 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 05.

Dari DIPA 05 di tahun 2020, Pengadilan Militer III-19 Jayapura mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 249.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

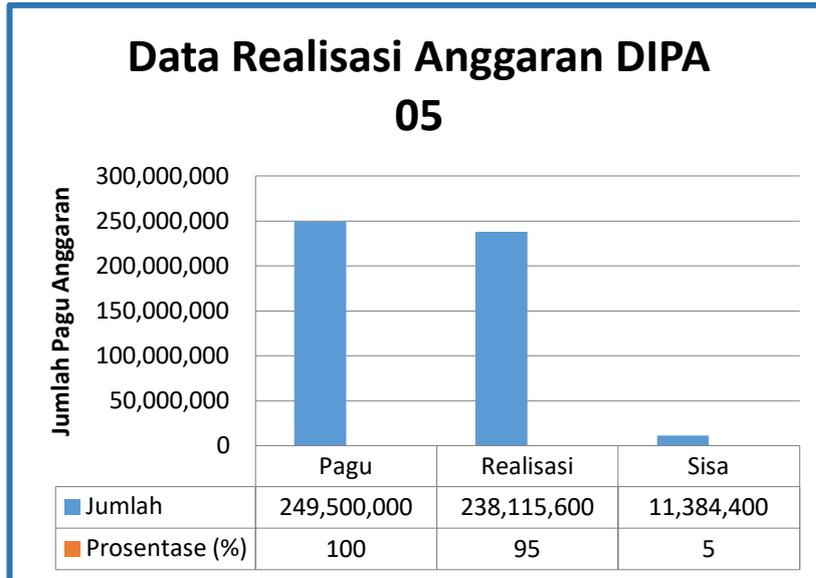
Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Jumlah Belanja Barang	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 5.000.000	Rp.
Februari	Rp. 5.000.000	Rp.
Maret	Rp. 10.000.000	Rp. 50.425.600
April	Rp.	Rp.
Mei	Rp. 5.000.000	Rp.
Juni	Rp. 5.000.000	Rp.
Juli	Rp. 5.000.000	Rp.
Agustus	Rp. 5.000.000	Rp.
September	Rp. 4.600.000	Rp. 60.000.000
Oktober	Rp. 1.520.600	Rp. 69.574.400
November	Rp.	Rp.
Desember	Rp. 11.995.000	Rp.
Jumlah	Rp. 58.115.600	Rp. 180.000.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 5 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 249.500.000	100,00%
Realisasi	Rp. 238.115.600	95%
Sisa	Rp. 11.384.400	5%



Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar **95%**.

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-20 Jayapura.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

A. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Di tahun anggaran 2020, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang diperuntukkan bagi hakim sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp 25.000.000,- dan terserap Rp. 22.727.273,- (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan pengadaan AC Split sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

pagu anggaran sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terserap seluruhnya.

2. Sarana Dan Prasarana yang Dimiliki

a) Tanah dan gedung kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berlokasi di Jalan. Ir. H. Juanda no. 87 sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu di tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 dengan total nilai aset sebesar Rp. 6.267.714.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdiri di atas tanah seluas 11.986 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), dimana di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Status kepemilikan tanah lokasi gedung Pengadilan-Pengadilan di atas berdasarkan Sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel Daftar Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit	Rp. 3.697.749.000,-

b) Peralatan dan mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dibedakan menjadi :

1) kendaraan dinas



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 2) alat pengolah data dan komunikasi
- 3) inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam tahun 2020 yaitu :

- a) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 8 (delapan) unit, dimana 3 (tiga) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan, 2 (dua) unit merupakan transfer masuk dari Mahkamah Agung RI dan 3 (tiga) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI, sedangkan kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit yang semua perolehannya merupakan hasil pembelian melalui pengadaan.

Tabel Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
1	Randis R-4	Toyota Camry	2018	1 unit	digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2	Randis R-4	Toyota Fortuner	2018	1 unit	digunakan untuk operasional jabatan Wakil Kepala
3	Randis R-4	Toyota Corolla Altis	2008	1 unit	digunakan untuk operasional Hakim Tinggi
4	Randis R-4	Toyota Corolla Altis	2006	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
5	Randis R-4	Toyota Vios	2009	1 unit	digunakan untuk operasional Hakim Tinggi
6	Randis R-4	Toyota Kijang Innova	2009	1 unit	digunakan untuk operasional Kepaniteraan
7	Randis R-4	Toyota New Avanza	2011	1 unit	digunakan untuk operasional Kesekretariatan
8	Randis R-4	Toyota Hiace	2020	1 unit	digunakan untuk operasional Kesekretariatan
9	Randis R-2	Honda Supra Fit	2006	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
10	Randis R-2	Honda GL Max 125	2006	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
11	Randis R-2	Honda Mega Pro CW	2007	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
12	Randis R-2	Honda Mega Pro CW	2008	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
13	Randis R-2	Honda Blade	2011	1 unit	digunakan untuk operasional kantor

sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Tabel Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai	
1.	Kendaraan dinas roda 4	5	unit	Rp.	1.143.726.500,-
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	unit	Rp.	82.767.000,-
Total nilai				Rp.	1.226.493.500,-

b) Alat pengolah data dan komunikasi

Tabel Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai	
1.	PC Unit	27	unit	Rp.	256.398.113
2.	Laptop	17	unit	Rp.	183.640.976
3.	Note Book	8	unit	Rp.	136.352.500
4.	CPU	4	unit	Rp.	59.400.000
5.	Monitor	1	unit	Rp.	4.500.000
6.	Printer	41	unit	Rp.	111.267.540
7.	Scanner	3	unit	Rp.	19.818.698
8.	External/Portable Harddisk	1	unit	Rp.	1.500.000
9.	Server	2	unit	Rp.	182.399.250
10.	Router	1	unit	Rp.	8.899.000
11.	Hub	3	unit	Rp.	30.000.000
12.	Modem	1	unit	Rp.	3.960.000
13.	Rak server	2	unit	Rp.	18.314.590
nilai total				Rp.	1.016.450.667

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun, upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01, pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.500 m² senilai Rp. 280.700.000,- (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya seluas 120 m² senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya senilai Rp. 322.125.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).



4. Penghapusan Sarana dan Prasarana

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah dan nilai barangnya, serta sudah dilakukan penghapusan pada tahun 2019.

Di tahun 2020 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

B. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Di Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi berupa laptop yang diperuntukkan bagi Kepaniteraan sejumlah 2 (dua) unit dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari pagu tersebut, seluruhnya terserap sehingga realisasi belanja mencapai 100%.

2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki

a) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 11.986 m² (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi). Di atas tanah ini berdiri pula gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Status kepemilikan tanah lokasi gedung pengadilan-pengadilan di atas berdasarkan sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.



b) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2020 yaitu :

1. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedangkan kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel IV.7 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.8 Daftar Kendaraan Dinas



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000,-
3.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Sewa
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000,-
Total Nilai				Rp. 438.850.000,-

2. Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel IV.9 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Scanner	5	Unit	Rp. 24.683.350,-
2.	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp. 24.915.000,-
3.	Facsimile	2	Unit	Rp. 7.100.000,-
4.	PC	29	Unit	Rp. 398.105.300,-
5.	Laptop	23	Unit	Rp. 365.639.550,-
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Set	Rp. 97.900.000,-
7.	Printer	17	Unit	Rp. 55.165.100,-
8.	Server	1	Unit	Rp. 39.650.000,-
9.	Router	1	Unit	Rp. 9.955.000,-
Nilai Total				Rp. 1.023.113.300,-

3. Inventaris Kantor Lainnya

Tabel IV.10 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2	Unit	Rp. 990.000,-
2.	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit	Rp. 2.200.000,-
4.	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9.900.000,-
5.	Mesin Fotocopy	2	Unit	Rp. 93.598.350,-
6.	Lemari Besi/Metal	13	Unit	Rp. 61.951.300,-
7.	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 53.210.660,-
8.	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp. 34.627.000,-
9.	Brandkas	1	Unit	Rp. 4.000.000,-
10.	Cash Box	1	Unit	Rp. 990.000,-
11.	Papan Visual	33	Unit	Rp. 6.050.550,-
12.	Movitex Board	1	Unit	Rp. 17.630.000,-
13.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp. 3.115.000,-
14.	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp. 1.479.500,-
15.	Mesin Laminating	1	Unit	Rp. 2.129.050,-
16.	Meja Kerja Kayu	69	Unit	Rp. 127.273.540,-
17.	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp. 9.620.000,-
18.	Alat Perekam Suara	6	Unit	Rp. 11.979.000,-
19.	Kursi Besi/Metal	28	Unit	Rp. 57.809.000,-
20.	Kursi Kayu	15	Unit	Rp. 48.245.910,-
21.	Sice	5	Unit	Rp. 34.895.000,-
22.	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp. 58.755.730,-
23.	Meja Rapat	2	Unit	Rp. 23.679.500,-
24.	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp. 1.630.000,-



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

25.	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1.382.700,-
26.	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13.640.330,-
27.	Partisi	4	Unit	Rp.	67.123.980,-
28.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Rp.	3.342.900,-
29.	Mesin Pemetong Rumput	4	Unit	Rp.	14.928.000,-
30.	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19.772.500,-
31.	Lemari Es	3	Unit	Rp.	13.447.500,-
32.	A.C. Split	34	Unit	Rp.	207.373.100,-
33.	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9.500.500,-
34.	Televisi	5	Unit	Rp.	39.897.000,-
35.	Sound System	1	Unit	Rp.	39.999.300,-
36.	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	7,246,000,-
37.	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	2,970,000,-
38.	Dispenser	7	Unit	Rp.	11,371,300,-
39.	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	849,200,-
40.	Lambang Instansi	2	Unit	Rp.	5,632,214,-
41.	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14,905,000,-
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Unit	Rp.	41.375.600,-
43.	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5,447,200,-
44.	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4,950,000,-
45.	Mesin Pemetong Biasa	1	Unit	Rp.	2,948,000,-
46.	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9,872,500,-
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp.	4,950,000,-
48.	Genset	1	Unit	Rp.	198,969,000,-
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp.	13,745,000,-
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp.	16,310,000,-
51.	ATR	1	Unit	Rp.	26,994,550,-
52.	CCTV	1	Unit	Rp.	19,965,000,-
53.	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	19,712,000,-
54.	Mesin Poles	2	Unit	Rp.	49,896,000,-
Nilai Total				Rp.	1.555.775.464,-

c) Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 109.198.000,- (Seratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).



d) PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2020 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

C. PENGADILAN MILITR III-13 MADIUN

Pengelolaan Sarana Dan Prasana

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)

1. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Waka Dilmil
2.	Mini Bus	2011	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

II.	Jenis kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Caraka Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor
5.	Honda GL Max II	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Operasional Kantor

2. Rumah Dinas

Dilmil III-13 Madiun belum memiliki Rumah Dinas.

3. Bangunan Gedung Tempat Kerja

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Gedung Kantor	2013	Baik	-	-	
2.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2015	Baik	-	-	

4. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perlehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Battery Charge	2013	1	1	-	-	
2.	Scanner (Universal Tester)	2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017	6	6	-	-	
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1	-	-	
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2	-	-	
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	2	-	-	
6.	Lemari Besi Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018.	25	25	-	-	
7.	Lemari Kayu	2011, 2015, 2016, 2017	14	13	-	1	
8.	Rak Besi	2013	1	1	-	-	
9.	Filing Cabinet Besi	2006, 2007, 2008	9	9	-	-	
10.	Brandkas	2006	1	1	-	-	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1	-	-	
12.	Tabung Pemadam Api	2018	2	2	-	-	
13.	CCTV – Camera Control Television System	2017	1	1	-	-	
14.	Papan Visual/ Papan Nama	2010	6	6	-	-	
15.	Alat Penghancur Kertas	2007, 2009, 2010	4	2	-	2	
16.	LCD Projector/ Infocus	2008	1	1	-	-	
17.	Alat Perekam suara	2011	1	1	-	-	
18.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018	53	29	24	-	
19.	Kursi Besi/Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018	193	190	-	3	
20.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-	
21.	Sice/ Sofa	2008, 2013, 2017	7	7	-	-	
22.	Meja Rapat	2010, 2015	6	6	-	-	
23.	Meja Komputer	2007, 2009, 2010	16	16	-	-	
24.	Meja Resepsionis	2013	1	1	-	-	
25.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4	-	-	
26.	Partisi	2015	3	3	-	-	
27.	Publik Astari (pembatas antrian)	2010, 2015	3	3	-	-	
28.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	2010	2	2	-	-	
29.	Mesin Potong Rumput	2008, 2009, 2010	4	4	-	-	
30.	Lemari Es	2011	2	2	-	-	
31.	A.c. Sentral	2013	2	2	-	-	
32.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017	21	21	-	-	
33.	Televisi	2007, 2011, 2017	4	4	-	-	
34.	Sound System	2007, 2008	2	2	-	-	
35.	Lambang Garuda Pancasila	2010	1	1	-	-	
36.	Tiang Bendera	2010	2	2	-	-	
37.	Dispenser	2007, 2011	5	5	-	-	
38.	Mimbar/Podium	2010	1	1	-	-	
39.	Lambang Instansi	2011	1	1	-	-	
40.	Handy Cam	2008	1	1	-	-	
41.	Gordyin/ Kray	2013	20	20	-	-	
42.	Kabel Roll	2017	1	1	-	-	
43.	Panggung	2010	1	1	-	-	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

44.	Microphone/ Wireless Mic	2017	6	6	-	-	
45.	Microphone/ boom Stand	2017	6	6	-	-	
46.	Audio Master Control Unit	2017	1	1	-	-	
47.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2008, 2011, 2013, 2015, 2017	22	8	-	14	
48.	Microphone Cable	2017	6	6	-	-	
49.	Camera Digital	2011	1	1	-	-	
50.	Connectors	2013	1	1	-	-	
51.	Broadband Amlifier	2013	1	1	-	-	
52.	Pesawat Telephone	2013	10	10	-	-	
53.	Facsimile	2007	1	1	-	-	
54.	Finger Printer Time Attandance	2013, 2017	2	2	-	-	
55.	Genset	2013	1	1	-	-	
56.	Kursi Dorong	2018	1	1	-	-	
57.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2018	4	4	-	-	
58.	Internet	2009, 2010	2	2	-	-	
59.	P.c Unit	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017,2019, 2020	32	28	-	4	
60.	Lap Top	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018,2019	22	18	3	1	
61.	CPU (peralatan Personal Komputer)	2013	1	1	-	-	
62.	Monitor (Dell LCD)	2009	1	1	-	-	
63.	Printer (peralatan personal komputer)	2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017	22	20	-	2	
64.	Peralatan personal komputer lainnya (Pfelink Psw 161)	2009	1	1	-	-	
65.	Server	2009, 2013, 2015	4	3	-	1	
66.	Router	2013, 2016	2	2	-	-	
67.	Rak Server	2013	1	1	-	-	
68.	Kabel UTP	2013, 2017	2	2	-	-	
69.	Switch (TP link WR743ND)	2013	12	12	-	-	

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang Prima terhadap para Pencari Keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah membangun Mushola “Al-Ikhlas” dengan biaya pengadaannya berasal dari swadaya para Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.



D. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

1. Pengadaan Sarana Dan Prasana

Di Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolahan data dan komunikasi berupa PC Komputer yang diperuntukkan bagi Panitera sejumlah 2 (dua) unit, Renovasi ruang tahanan dan belanja Modal (Loker 1 Unit dan Meja kerja 3 Unit) dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dari pagu tersebut, terserap sebesar Rp. 174.728.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga realisasi belanja mencapai 99,84%.

2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki

A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar berlokasi di Yos Sudarso No. 1 Denpasar, dengan tanah seluas 1.365 m². Renovasi gedung kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 150.208.000,- (seratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah), sehingga realisasi mencapai 99,89 %. Gedung kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdiri di atas tanah seluas 1.365 m² (seribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi lokasi gedung pengadilan di atas berdasarkan sertifikat atas nama Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

B. Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolahan data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tahun 2020 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (dua unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas Tabel IV.7 Daftar Rincian Kendaraan Dinas :



Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.8 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Rp. 333.565.000,-
2	Kendaraan Dinas roda 2	5 Unit	Rp 79.806.000
Total Nilai			Rp 413.371.000,-

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi



Tabel IV.9 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Scanner	1 Unit	Rp. 7.480.000,-
2	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Unit	Rp. 24.915.000,-
3.	Facsimile	2 Unit	Rp. 3.300.000,-
4.	PC	21 Unit	Rp. 225.190.950,-
5.	Laptop	17 Unit	Rp. 245.042.500,-
6.	Komputer Jaringan lainnya	1 Unit	Rp. 17.840.000,-
7.	Printer	9 Unit	Rp. 43.034.000,-
8.	Server	3 Unit	Rp. 119.125.000,-
9.	Router	3 Unit	Rp. 12.918.750,-
10	Internet	1 Unit	Rp. 57.170.000,-
Nilai Total			Rp. 756.016.200,-

3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel IV.10 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Meja Kerja kayu	39 Unit	Rp. 131.647.000,-
2	Tiang Bendera	2 Unit	Rp. 500.000,-
3	Palu Sidang	1 Unit	Rp. 168.000,-
4	Lambang Instansi	1 Unit	Rp. 3.769.920,-
5	UPS	5 Unit	Rp. 27.292.000,-
6	Rak Server	1 Unit	Rp. 9.866.590,-
7	Software Komputer	8 Unit	Rp. 78.210.000,-
8	Lemari Besi Metal	17 Unit	Rp. 65.392.000,-
9	Lemari Kayu	3 Unit	Rp. 20.900.000,-
10	Filing Kabinet Besi	11 Unit	Rp. 16.845.000,-
11	Brandkas	1 Unit	Rp. 3.975.000,-
12	Buffet	1 Unit	Rp. 4.500.000,-
13	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Rp. 1.700.000,-
14	Mesin Absensi	1 Unit	Rp. 14.500.000,-



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

15	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Rp. 10.150.000,-
16	Kursi Besi/Metal	71 Unit	Rp. 103.387.200,-
17	Kursi Kayu	6 Unit	Rp. 17.050.000,-
18	Sice	3 Unit	Rp. 41.790.000,-
19	Meja Rapat	1 Unit	Rp. 11.800.000,-
20	Meja Komputer	4 Unit	Rp. 2.360.000,-
21	Meja Telepon	2 Unit	Rp. 3.425.000,-
22	Meja Makan Kayu	1 Unit	Rp. 5.000.000,-
23	Jam Elektronik	2 Unit	Rp. 336.000,-
24	Lemari Es	1 Unit	Rp. 3.000.000,-
25	AC Window	2 Unit	Rp. 50.710.000,-
26	AC Split	17 Unit	Rp. 78.338.000,-
27	Kipas Angin	1 Unit	Rp. 168.000,-
28	Televisi	7 Unit	Rp. 70.498.000,-
29	Sound System	3 Unit	Rp. 20.918.800,-
30	Dispenser	5 Unit	Rp. 8.846.000,-
31	Monitor	1 Unit	Rp. 23.430.000,-
32	Kabel UTP	1 Unit	Rp. 1.650.000,-
33	Rak Besi	1 Unit	Rp. 4.950.000,-
34	Handy Cam	1 Unit	Rp. 5.500.000,-
35	Camera Digital	2 Unit	Rp. 18.865.000,-
36	Conector	1 Unit	Rp. 220.000,-
37	Jet Pump	1 Unit	Rp. 4.840.000,-
38	Audio Cassette Recorder	1 Unit	Rp. 168.000,-
Nilai total			Rp. 866.665.510,-

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.365 m²



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

senilai Rp. 150.208.000,- (Seratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah).

- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 114.226.000,- (Seratus empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Masa Pandemi covid 19 terdapat belanja operasional penanganan Pandemi covid 19 berupa Thermometer Infrared, Masker dan Hand Sanitezer senilai Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya penyemprotan Desinfektan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam Penanganan Pandemi Covid 19 berupa pengadaan Tempat cuci tangan portabel senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat 64 (enam puluh empat) Barang Milik Negara yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, sedang dalam proses pengajuan ke Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk dilakukan penghapusan. Dari 64 Item BMN yang diajukan untuk dapat segera dihapus, sesuai dengan surat permohonan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3- Mil03/30/PL.04/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Usulan penghapusan BMN. Surat Permohonan tersebut mendapat tanggapan dan disetujui oleh Sekretaris Mahkamah Agung, berdasarkan surat dari Sekma Nomor : 690/SEK/SK/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Penghapusan Barang milik Negera/Kekayaan Negara berupa peralatan kantor (Mebelair) pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Data 64 Item BMN yaitu :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

DAFTAR PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN (RP)	HARGA HASIL IP (RP)	ALASAN PENGHAPUSAN	HARGA LIMIT (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mesin Ketik Listrik	3050101004	1	Brother GX	2006	1	1.255.000	1.255.000	Rusak Berat	55.000	
2	Mesin Ketik Listrik	3050101004	2	Brother GX	2006	1	1.255.000	1.255.000	Rusak Berat	55.000	
3	Mesin Ketik Listrik	3050101004	3	Brother GX	2007	1	1.650.000	1.650.000	Rusak Berat	55.000	
4	Dispenser	3050206036	5	Modena	2009	1	2.300.000	2.300.000	Rusak Berat	15.000	
5	Alat Penghancur Kertas.	3050105015	1	HSM 7025	2007	1	1.496.000	1.496.000	Rusak Berat	10.000	
6	Alat Penghancur Kertas.	3050105015	3	HSM 802 S	2008	1	1.700.000	1.700.000	Rusak Berat	10.000	
7	Alat Penghancur Kertas.	3050105015	4	Vitex	2009	1	2.850.000	2.850.000	Rusak Berat	10.000	
8	Meja Kerja Kayu	3050201002	25	Ichiko	2012	1	1.630.000	1.630.000	Rusak Berat	10.000	
9	Meja Kerja Kayu	3050201002	26	Ichiko	2012	1	1.630.000	1.630.000	Rusak Berat	10.000	
10	Scanner	3100203004	1	Canon Lide 700f	2012	1	2.420.000	2.420.000	Rusak Berat	20.000	
11	Scanner	3100203004	2	Brother	2016	1	9.743.750	9.743.750	Rusak Berat	20.000	
12	A.C Split	3050204004	6	LG	2008	1	3.550.000	3.550.000	Rusak Berat	50.000	
13	A.C Split	3050204004	7	Panasonic	2008	1	3.550.000	3.550.000	Rusak Berat	50.000	
14	A.C Split	3050204004	8	Panasonic	2008	1	3.550.000	3.550.000	Rusak Berat	50.000	
15	A.C Split	3050204004	10	Panasonic	2008	1	3.550.000	3.550.000	Rusak Berat	50.000	
16	A.C Split	3050204004	23	Daikin FT25IV14	2013	1	4.246.000	4.246.000	Rusak Berat	50.000	
17	Kipas Angin	3050204006	2	Stan Fan	2008	1	168.000	168.000	Rusak Berat	10.000	
18	Kursi Besi/Metal	3050201003	3	Chitose	2007	1	250.000	250.000	Rusak Berat	10.000	
19	Kursi Besi/Metal	3050201003	5	Chitose	2007	1	250.000	250.000	Rusak Berat	10.000	
20	Kursi Besi/Metal	3050201003	6	Chitose	2007	1	250.000	250.000	Rusak Berat	10.000	
21	Kursi Besi/Metal	3050201003	7	Chitose	2007	1	250.000	250.000	Rusak Berat	10.000	
22	Kursi Besi/Metal	3050201003	10	Chitose	2007	1	250.000	250.000	Rusak Berat	10.000	
23	Kursi Besi/Metal	3050201003	34	Star Line	2009	1	335.000	335.000	Rusak Berat	10.000	
24	Kursi Besi/Metal	3050201003	19	Chitose	2007	1	250.000	250.000	Rusak Berat	10.000	
25	Kursi Besi/Metal	3050201003	47	Ichiko	2011	1	1.155.000	1.155.000	Rusak Berat	10.000	
26	UPS	3060101048	1	Kenika	2007	1	999.900	999.900	Rusak Berat	10.000	
27	UPS	3060101048	2	ERSYS 600	2009	1	660.000	660.000	Rusak Berat	5.000	
28	UPS	3060101048	3	ERSYS 600	2009	1	660.000	660.000	Rusak Berat	5.000	
29	UPS	3060101048	4	ERSYS 600	2009	1	660.000	660.000	Rusak Berat	5.000	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

30	UPS	3060101048	5	Sendon	2009	1	2.205.000	2.205.000	Rusak Berat	5.000	
31	UPS	3060101048	6	UPS	2013	1	825.000	825.000	Rusak Berat	5.000	
32	UPS	3060101048	7	Prolink Pro 1200S (1200VA)	2015	1	1.870.000	1.870.000	Rusak Berat	5.000	
33	P.C Unit	3100102001	1	Intel Celeron D	2006	1	6.355.584	6.355.584	Rusak Berat	10.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	P.C Unit	3100102001	2	Intel Pentium D	2006	1	6.355.584	6.355.584	Rusak Berat	10.000	
35	P.C Unit	3100102001	3	Intel Pentium D	2006	1	5.700.000	5.700.000	Rusak Berat	10.000	
36	P.C Unit	3100102001	4	Acer Power SA90	2007	1	6.900.000	6.900.000	Rusak Berat	10.000	
37	P.C Unit	3100102001	5	Acer Power SA90	2007	1	6.900.000	6.900.000	Rusak Berat	10.000	
38	P.C Unit	3100102001	10	Intel Celeron D	2009	1	8.800.000	8.800.000	Rusak Berat	10.000	
39	P.C Unit	3100102001	9	HP Compaq DX 2310	2009	1	8.800.000	8.800.000	Rusak Berat	10.000	
40	P.C Unit	3100102001	11	Acer Power SA60	2009	1	5.000.000	5.000.000	Rusak Berat	10.000	
41	P.C Unit	3100102001	13	HP Compaq	2011	1	7.180.000	7.180.000	Rusak Berat	10.000	
42	Printer	3100203003	1	Epson LQ-2180	2006	1	7.555.583	7.555.583	Rusak Berat	10.000	
43	Printer	3100203003	2	HP Deskjet 300	2006	1	1.100.000	1.100.000	Rusak Berat	10.000	
44	Printer	3100203003	3	Epson LX 300	2006	1	1.800.000	1.800.000	Rusak Berat	10.000	
45	Printer	3100203003	4	Lazerjet	2008	1	1.965.000	1.965.000	Rusak Berat	10.000	
46	Printer	3100203003	5	Lazerjet	2008	1	1.965.000	1.965.000	Rusak Berat	10.000	
47	Printer	3100203003	6	HP Photosmart C4850	2009	1	2.497.500	2.497.500	Rusak Berat	10.000	
48	Printer	3100203003	7	HP Photosmart C4850	2009	1	2.497.500	2.497.500	Rusak Berat	10.000	
49	Printer	3100203003	9	HP Photosmart 4680	2010	1	2.500.000	2.500.000	Rusak Berat	10.000	
50	Printer	3100203003	10	HP Photosmart 4680	2010	1	2.500.000	2.500.000	Rusak Berat	10.000	
51	Printer	3100203003	11	HP Photosmart 4680	2010	1	2.500.000	2.500.000	Rusak Berat	10.000	
52	Printer	3100203003	12	Canon 3 IN 1	2011	1	1.628.000	1.628.000	Rusak Berat	10.000	
53	Printer	3100203003	13	Canon 3 IN 1	2011	1	1.628.000	1.628.000	Rusak Berat	10.000	
54	Printer	3100203003	14	Canon 3 IN 1	2011	1	1.628.000	1.628.000	Rusak Berat	10.000	
55	Printer	3100203003	15	Epson L-100	2012	1	3.035.000	3.035.000	Rusak Berat	10.000	
56	Printer	3100203003	17	Epson L-100	2013	1	902.000	902.000	Rusak Berat	10.000	
57	Laptop	3100102002	1	Toshiba Satellite	2006	1	10.555.584	10.555.584	Rusak Berat	50.000	
58	Laptop	3100102002	3	Toshiba	2008	1	19.920.000	19.920.000	Rusak Berat	50.000	
59	Laptop	3100102002	4	HP Pavilion	2009	1	17.270.000	17.270.000	Rusak Berat	50.000	
60	Laptop	3100102002	5	Dell Vostro	2009	1	9.350.000	9.350.000	Rusak Berat	50.000	
61	Laptop	3100102002	6	Dell Vostro	2009	1	9.350.000	9.350.000	Rusak Berat	50.000	
62	Laptop	3100102002	9	Sony Vaio	2010	1	17.000.000	17.000.000	Rusak Berat	50.000	
63	Jam Elektronik	3050202003	3	Seiko	2008	1	168.000	168.000	Rusak Berat	1.000	
64	Server	3100204001	1	HP Proliant ML 110	2009	1	21.000.000	21.000.000	Rusak Berat	50.000	
	JUMLAH					64	259.719.985	259.719.985		1.241.000	



E. PENGADILAN MILITER III-14 KUPANG

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melaksanakan pemeliharaan terhadap gedung dan bangunan.

- Nomor SPK : W3.Mil-04/07/PL.04/VII/2020

Tanggal Kontrak : 10 Juli 2020

Nilai Kontrak : Rp.79.000.000,-

Pelaksana : CV. Satria

- Nomor SPK : W3.Mil-04/19/PL.04/X/2020

Tanggal Kontrak : 12 Oktober 2020

Nilai Kontrak : Rp.50.000.000,-

Pelaksana : CV. Gasindo

b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian Satpam, Sopir dan Pramubakti

Nomor SPK : W3.Mil-04/01/KS.00/II/2020

Tanggal Kontrak : 10 Februari 2020

Nilai Kontrak : Rp.21.467.000,-

Pelaksana : Penjahit Serasi Taylor

2. Sarana dan Prasarana (Gedung)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Laptop Hakim)

Nomor SPK : W3.Mil-04/01/PL.04/VI/2020

Tanggal Kontrak : 09 Juni 2020

Nilai Kontrak : Rp.24.889.000,-

Pelaksana : PT. Bhinneka Mentari Dimensi



3. Perangkat Keras

Dalam rangka mendukung penyelesaian tugas pokok, Pengadilan Militer III-15 Kupang memiliki Server 2 unit (PC) sejumlah 19 unit, Printer sejumlah 23 unit, Laptop sejumlah 20 unit Note Book 3 unit. Fasilitas Layanan Publik (Desk Info) Pengadilan Militer III-15 Kupang yang tersedia berupa TV LCD 2 unit yang berada di lobby depan dan lobby belakang.

4. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam sistem operasi komputer pada Pengadilan Militer III-15 Kupang adalah Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan Centos untuk Server.

Dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan di bidang Keuangan menggunakan aplikasi SIMAK, SAIBA, SAS, Komdanas, SIRUP, SPM, GPP, Persediaan, Monev, SILABI, SIMARI dan RKAKL, di bidang Kepegawaian menggunakan aplikasi E-PUPNS, SAPK, SIMARI, SIMPEG, Edoc Simpeg, dan Komdanas, serta di bidang Perkara menggunakan aplikasi SIPP, Siratmil, MISS dan Direktori Putusan. Pengadilan Militer III-15 Kupang telah memiliki website dengan situs www.dilmil-kupang.go.id dan email dengan alamat email admin@dilmil-kupang.go.id dan kupang@dilmil.org.

F. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Makassar secara periodik per semester.



1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-16 Makassar melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi berupa PC Komputer yang diperuntukkan bagi Panitera sejumlah 2 (dua) unit, dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari pagu tersebut, terserap sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga realisasi belanja mencapai 100%.

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

1) Tanah dan Gedung Kantor

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menempati Gedung Kantor baru di Jalan Batara Bira Km. 16 No.5 Baddoka Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2013. Penempatan gedung kantor baru ini berdasarkan peresmian langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur pada tanggal 22 Mei 2013. Sarana dan Prasarana Kantor Dilmil III-16 Makassar sebagian besar merupakan pengadaan sendiri dari Mahkamah Agung.

Untuk tertib pengadministrasian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadilan Militer III-16 Makassar telah dilaksanakan pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara ke dalam aplikasi, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah.

2) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dibedakan menjadi :

- a. Kendaraan dinas
- b. Alat pengolah data dan komunikasi
- c. Inventaris kantor lainnya

Aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-16 Makassar sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran Laporan kegiatan Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2020 ini.



G. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2020 Pengadilan Militer III-17 Manado sudah menempati gedung Kantor sendiri yang merupakan pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, yang terletak di lokasi Peradilan Terpadu Kota Manado.

a. Pengadaan

Dalam Tahun Anggaran 2020 Dilmil III-17 Manado mendapatkan DIPA BUA dan DIPA Dirjen yang diperuntukkan sebagai operasional perkantoran, belanja pegawai dan belanja modal. Sedangkan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung pada Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2020 sudah selesai Pengadaan Perlengkapan sarana gedung. Pengadaan Meubelair diadakan oleh Badan Urusan Administrasi MA-RI.

b. Pemeliharaan.

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-17 Manado mencakup segala barang yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas administrasi peradilan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan bagian dari barang-barang kekayaan milik Negara, termasuk di dalamnya semua sarana prasarana yang dapat dikelola dalam suatu Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Pedoman/penata usahaan barang-barang milik/kekayaan Negara dalam lingkup Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan Peradilan diatur sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173.a/SK/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Tertib administrasi barang.
- 2) Penghematan keuangan negara.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 3) Menghitung kekayaan negara.
- 4) Memudahkan pengawasan barang milik/kekayaan negara.
- 5) Sebagai bahan informasi bagi penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari :
 - a) Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang.
 - b) Pengadaan barang.
 - c) Penyimpanan dan pendistribusian barang.
 - d) Pemeliharaan barang.
 - e) Pengawasan barang.
 - f) Penghapusan barang.

Biaya pemeliharaan, perawatan dan pengecatan bangunan kantor permanen masih digunakan untuk sarana dan prasarana gedung kantor kontrakan, sehingga pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2020 anggaran Dipanya digunakan untuk perbaikan dan perawatan gedung kantor kontrakan tersebut.

c. Mutasi Balik Nama dan Penghapusan

Sampai dengan Tahun 2020 Pengadilan Militer III-17 Manado belum pernah melakukan Mutasi atau Balik Nama Kendaraan Dinas. Penghapusan dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara oleh pejabat yang berwenang, sebab-sebab lain secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, apabila antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*, untuk Dilmil III-17 Manado sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 belum melaksanakan penghapusan Kendaraan Dinas.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam kondisi siap pakai. Barang Milik Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan antara lain :

a. Pengadaan.

Pengadilan Militer III-17 Manado sejak awal bulan Januari 2020 sampai dengan akhir bulan Desember 2020 telah mengadakan pengadaan alat pengolah data yaitu Personal Komputer 2 Unit @ Rp. 12.500.000 dengan total anggaran Rp. 25.000.000,-.

b. Pemeliharaan

Pengadilan Militer III-17 Manado tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan :

- 1) Perawatan Gedung Kantor / Khusus, Kegiatan perawatan Gedung Kantor / Khusus sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari perawatan gedung kantor, sehubungan dengan hal itu Pengadilan Militer III-17 Manado telah memiliki tanah, namun belum terealisasi pembangunan.
- 2) Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Perawatan Randis roda-4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit.
 - b) Perawatan Randis roda-2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit.
 - c) Perawatan sarana gedung kantor.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Militer III-17 Manado sejak bulan Mei 2020 sudah memadai bila dihubungkan dengan standarisasi kebutuhan rencana



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Mahkamah Agung RI untuk semua badan peradilan, apalagi fasilitas yang tersedia sangat cukup menunjang untuk pelaksanaan tugas. Adapun fasilitas yang tersedia sebagai berikut :

- a) Ruang Kepala
- b) Ruang Wakil Kepala
- c) Ruang Pokkimmil
- d) Ruang Panitera
- e) Ruang Sekretaris
- f) Ruang Para Kasubag, Bendahara dan Pelaksana (Kesekretariatan)
- g) Ruang Sidang Utama
- h) Ruang Sidang kecil
- i) Ruang Musyawarah
- i) Ruang Perpustakaan
- j) Ruang Mushola
- k) Ruang Tahanan Pria
- l) Ruang Tahanan Wanita
- m) Ruang Server
- n) Ruang Tunggu
- o) Ruang tamu dan Ruang Piket
- p) Ruang PTSP
- q) Ruang Oditur
- r) Ruang Penasihat Hukum
- s) Ruang Saksi
- s) Ruang Laktasi dan Kesehatan
- t) Ruang Garasi yang difungsikan sebagai tempat olahraga
- u) Ruang Gudang
- v) Ruang Pantry
- w) Ruang Arsip Aktif
- X) Ruang Arsip Pasif



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- y) Ruang Panel Control (Atas /Bawah)
 - z) Ruang Rapat/Komen Senter
 - a.1) Peralatan penunjang lainnya (Telepon, Faksimilie, Komputer, Televisi dan AC).
- 3) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Pengadilan Militer III-17 Manado sudah dilaksanakan dengan Pagu awal Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta rupiah), tambahan Pagu revisi tambah oleh Korwil sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga total pagu Pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2020 Rp. 19.409.000,- (Sembilan belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) Sisa Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 4) Perawatan kendaraan roda 2 (dua) 4 (empat) unit dan roda 4 (empat) 2 (dua) unit, untuk tahun anggaran 2020 Pagu awal sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Sisa Rp. 0,- (nol rupiah). Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) setelah mengalami revisi oleh Kanwil untuk memenuhi kebutuhan anggaran pagu menjadi Rp. 38.900.000 (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 38.885.946 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah), Sisa Rp. 14.054,- (Empat belas ribu lima puluh empat rupiah).
- 5) Perawatan untuk sarana dan prasarana kantor lainnya, Pagu awal anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 14.750.000,-



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

(Empat belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah revisi oleh Kanwil untuk memenuhi kebutuhan anggaran pagu menjadi Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 terealisasi Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Sisa Rp. 0,- (nol rupiah) dana tersebut adalah untuk perawatan/perbaikan Air conditioner (AC), perawatan / perbaikan alat pengolah data (komputer, laptop, printer) serta untuk perawatan/perbaikan mesin foto copy dan Genset.

c. Penghapusan

Bahwa selama tahun 2020 Pengadilan Militer III-17 Manado tidak melaksanakan penghapusan aset yang berupa Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung dan penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor, karena Dilmil III-17 Manado telah melaksanakan penghapusan barang milik Negara / Kakayaan Negara berupa peralatan kantor (Meubelair) sejumlah 393 Item berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 676/SEK/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang penghapusan barang milik Negara / Kakayaan Negara berupa peralatan kantor (Meubelair) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

H. PENADILAN MILITER III-18 AMBON.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Setiap periode Tahun Anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kabutuhan Sarana dan Prasarana untuk Ttahun Anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Di Ttahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai seluruhnya Rp. 24.960.000,- yang diperuntukan pada Bagian Kepaniteraan dengan nilai seluruhnya Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Daftar pengadaan sarana dan prasarana tersebut diuraikan dalam table dibawah ini:

Tabel IV.8 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Merk/Tipe	Jumlah	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PC	Lenovo	2 (dua) unit	Rp. 24.960.000,-	Digunakan oleh bagian Kepaniteraan

2. Sarana Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan

a. Tanah dan Gedung Kantor

1) Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas tanah seluas 2.000 m² . dengan nilai aset sebesar Rp. 15.350.756.700,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.

2) Tanah Eks Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Ambon telah menjadi tanah milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 Januari 2014 dengan luas 870 m² yang terletak di Desa Hative Kecil Ambon.

b. Peralatan dan Mesin

Barang Milik Negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi :

1. Kendaraan dinas
2. Alat pengolah data dan komunikasi
3. Inventaris kantor lainnya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Berdasarkan pengelompokan diatas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2020 yaitu:

1) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 1 (satu) unit.

Tabel dibawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.9 Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Rusak Ringan	Digunakan untuk operasional kantor dan operasional jabatan Kepala.

2) Alat pengolah data dan komunikasi

Tabel IV.10 Daftar alat pengolah data dan komunikasi.

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Pesawat Telephone	37	Buah	Baik	
2	Faximile	1	Buah	Baik	
3	P.C. Unit	11	Buah	Baik	
4	Laptop	11	Buah	Baik	
5	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	Baik	
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	Baik	
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Baik	
8	Server	3	Buah	Baik	
9	Router	1	Buah	Baik	

3) Peralatan dan mesin lainnya

Tabel IV.11. Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa Air	4	Unit	Baik	
2.	Rak-Rak Penyimpanan	2	Buah	Baik	
3.	Lemari Penyimpanan	1	Buah	Baik	
4.	Lemari Besi Metal	19	Buah	Baik	
5.	Lemari Kayu	8	Buah	Baik	
6.	Filing Cabinet Besi	9	Buah	Baik	
7.	Filing Cabinet Kayu	1	Buah	Baik	
8.	Brankas	1	Buah	Baik	
9.	Buffet	1	Buah	Baik	
10.	Tabung Pemadam Api	3	Buah	Baik	
11.	CCTV (Camera Control Televisi System)	10	Buah	Baik	
12.	Papan Visual/Papan Nama	15	Buah	Bak	
13.	White Board	6	Buah	Baik	
14.	Peta	2	Buah	Baik	
15.	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	Baik	
16.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik	
17.	Alat Pemotong Kertas	1	Buah	Rusak Ringan	
18.	Papan Gambar	1	Buah	Baik	
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Buah	Baik	
20.	Meja Kerja Kayu	39	Buah	Baik	
21.	Kursi Besi Metal	117	Buah	Baik	
22.	Kursi Kayu	26	Buah	Baik	
23.	Sice (Sofa)	6	Buah	Baik	
24.	Meja Rapat	2	Buah	Baik	
25.	Meja Komputer	13	Buah	Baik	
26.	Meja Resepsionis	1	Buah	Baik	
27.	Kursi fiber Glass Plastik	14	Buah	Baik	
28.	Partisi	2	Buah	Baik	
29.	Rak Sepatu (Aluminium)	3	Buah	Baik	
30.	Mesin pemotong rumput	1	Buah	Baik	
31.	Lemari Es	2	Buah	Baik	
32.	AC Sentral	2	Buah	Baik	
33.	AC Split	24	Buah	Baik	
34.	Kompor Gas (alat dapur)	1	Buah	Baik	
35.	Rak Piring Aluminium	1	Buah	Baik	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

36.	Mixer	1	Buah	Baik	
37.	Televisi	3	Buah	Baik	
38.	Sound System	1	Buah	Baik	
39.	Microphone	2	Buah	Baik	
40.	Lambang Garuda Pancasila	3	Buah	Baik	
41.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	Baik	
42.	Tiang Bendera	6	Buah	Baik	
43.	Tangga Aluminium	1	Buah	Baik	
44.	Lambang Instansi	1	Buah	Baik	
45.	Asbak Tinggi	6	Buah	Baik	
46.	DVD Player	1	Buah	Baik	
47.	Tangky Air	5	Buah	Baik	
48.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah	Baik	
49.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Buah	Baik	
50.	Power Amplifier	1	Buah	Baik	
51.	Digital LED Rumning text	1	Buah	Baik	
52.	Digital Keyboard Technics	1	Buah	Baik	
53.	Camera Digital	1	Buah	Baik	
54.	LCD Monitor	1	Buah	Baik	
55.	Pesawat Telepon	37	Buah	Baik	
56.	Faximile	1	Buah	Baik	
57.	Finger Print	1	Buah	Baik	
58.	Switching Matix and Server	1	Buah	Baik	
59.	Switcher manual	1	Buah	Baik	
60.	Boster	1	Buah	Baik	
61.	Reciever And Video	8	Buah	Baik	
62.	Internet	1	Buah	Baik	
63.	P.C. Unit	11	Buah	Baik	
64.	Laptop	11	Buah	Baik	
65.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	Baik	
66.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	Baik	
67.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Baik	
68.	Server	3	Buah	Baik	
69.	Router	1	Buah	Baik	
70.	Alat music lainnya (keyboard)	1	Buah	Baik	
71.	Monografi (Buku)	20	Buah	Baik	
72.	Rak Server	1	Buah	Baik	
73.	Verstouch I Kios	1	Buah	Baik	



74.	PC HP All In	3	Buah	Baik	
75.	APC UPS PC	3	Buah	Baik	

Tabel IV.12. Daftar sarana dan parasarana pendukung e-court

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Server Fujitsu	1	Buah	Baik	
2.	Rak Server	1	Buah	Baik	
3.	Vestouch I Kios	1	Buah	Baik	
4.	PC HP All In	3	Buah	Baik	
5.	APC UPS PC	3	Buah	Baik	

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana.

Pada tahun 2020, aset Barang Milik Negara di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak ada barang yang diajukan untuk penghapusan.

I. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dalam Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melaksanakan pengadaan sarana dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.6. Daftar Pengadaan Sarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 25.000.000
Total Nilai		Rp.

1. Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura berlokasi di Jl. Samratulangi No. 17, Dok V Atas, Jayapura, Papua. Gedung kantor ini masih menumpang pada Gedung Kantor Oditurat Militer IV-20 Jayapura, dan berada dalam satu kompleks dengan Kantor Kumdam XVII/Cenderawasih.

Dua bidang tanah untuk pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura seluas 3.000 m², diperoleh melalui APBN tahun 2006 seluas 2.000 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00645 tanggal 16 Mei 2008 an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan yang luasnya 1.000 m² diperoleh melalui APBN tahun 2016 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00018 tanggal 21 Maret 2017 an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang beralamatkan di Kelurahan Vim sekarang Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

2. Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat dibedakan menjadi :

1. Kendaraan dinas
2. Alat pengolah data dan komunikasi
3. Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas,aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam tahun 2020 yaitu :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-19 Jayapura terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 (dua) unit, dimana 2 (dua) unit tersebut dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel IV.7

Daftar Rincian Kendaraan Dinas dan Statusnya saat ini.

No	Uraian	Keterangan	Status
1.	Station Wagon (Toyota Kijang Inova Tahun 2005)	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan
2.	Station Wagon (Daihatsu Terios Tahun 2011)	Peralatan dan Mesin	Baik
4	Sepeda Motor (Honda GL Max Tahun 2005)	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan
5.	Sepeda Motor (Honda NF 125 S Tahun 2005)	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan
6.	Sepeda Motor (Honda NF 125 SC Tahun 2007)	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan
7.	Sepeda Motor (Honda Megapro Tahun 2007)	Peralatan dan Mesin	Sudah dihapuskan, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 509/SEK/SK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
8.	Sepeda Motor (Honda Megapro Tahun 2007)	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan

2)

Tabel IV.8Daftar Inventaris Kantor Lainnya

Nama Inventaris	Jenis	Status
Mesin Fotocopy Folio	Peralatan dan Mesin	Baik
Lemari Besi/Metal (6)	Peralatan dan Mesin	Baik
Lemari Kayu (15)	Peralatan dan Mesin	Baik
Rak Kayu (2)	Peralatan dan Mesin	Baik
Filing Cabinet Besi (11)	Peralatan dan Mesin	Baik
Filing Cabinet Besi (3)	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Brandkas	Peralatan dan Mesin	Baik
Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Peralatan dan Mesin	Baik



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Tabung Pemadam Api (5)	Peralatan dan Mesin	Baik
CCTV - Camera Control Television System (8)	Peralatan dan Mesin	Rusak Berat
Papan Visual/Papan Nama (3)	Peralatan dan Mesin	Baik
Alat Penghancur Kertas (2)	Peralatan dan Mesin	Baik
Alat Pemotong Kertas	Peralatan dan Mesin	Baik
Overhead Projector	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
LCD Projector/Infocus	Peralatan dan Mesin	Baik
Acces Control System	Peralatan dan Mesin	Baik
Meja Kerja Kayu (30)	Peralatan dan Mesin	Baik
Meja Kerja Kayu	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Kursi Besi/Metal (90)	Peralatan dan Mesin	Baik
Kursi Kayu (3)	Peralatan dan Mesin	Baik
Sice (3)	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan
Sice	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Sice (2)	Peralatan dan Mesin	Baik
Meja Komputer (5)	Peralatan dan Mesin	Baik
Kasur/Spring Bed	Peralatan dan Mesin	Baik
Meubelair Lainnya	Peralatan dan Mesin	Baik
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Peralatan dan Mesin	Baik
Mesin Pemotong Rumput	Peralatan dan Mesin	Baik
Lemari Es	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan
A.C. Split (7)	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
A.C. Split (8)	Peralatan dan Mesin	Baik
Televisi	Peralatan dan Mesin	Baik
Televisi	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Televisi	Peralatan dan Mesin	Baik
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Peralatan dan Mesin	Baik
Equalizer (2)	Peralatan dan Mesin	Baik
Loudspeaker (3)	Peralatan dan Mesin	Baik
Sound System	Peralatan dan Mesin	Baik
Microphone (16)	Peralatan dan Mesin	Baik
Stabilisator	Peralatan dan Mesin	Baik
Dispenser	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Lambang Instansi	Peralatan dan Mesin	Baik
Handy Cam	Peralatan dan Mesin	Baik
Karpet	Peralatan dan Mesin	Baik
Kabel Roll	Peralatan dan Mesin	Baik
Kabel Roll	Peralatan dan Mesin	Baik
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (11)	Peralatan dan Mesin	Baik
Audio Command Desk	Peralatan dan Mesin	Baik
Uninterruptible Power Supply (UPS) (4)	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Uninterruptible Power Supply (UPS) (2)	Peralatan dan Mesin	Baik
Camera Digital (2)	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Mesin Perekam Stensil Folio	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Pesawat Telephone	Peralatan dan Mesin	Baik
Facsimile (2)	Peralatan dan Mesin	Baik
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Peralatan dan Mesin	Rusak Ringan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Peralatan dan Mesin	Baik
Switching Matrix and Server	Peralatan dan Mesin	Baik
Switcher Manual	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Switcher Manual	Peralatan dan Mesin	Baik
Conecctor	Peralatan dan Mesin	Baik
Genset	Peralatan dan Mesin	Baik
Mainframe (Komputer Jaringan)	Peralatan dan Mesin	Baik
P.C Unit (12)	Peralatan dan Mesin	Baik
P.C Unit (4)	Peralatan dan Mesin	Rusak Berat
Lap Top (10)	Peralatan dan Mesin	Baik
Lap Top (9)	Peralatan dan Mesin	Rusak Berat
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Peralatan dan Mesin	Baik
CPU (Peralatan Personal Komputer)	Peralatan dan Mesin	Baik
Monitor	Peralatan dan Mesin	Baik
Printer (Peralatan Personal Komputer) (10)	Uraian Akun Tidak Ada	Rusak Berat
Printer (Peralatan Personal Komputer) (4)	Uraian Akun Tidak Ada	Baik
Server	Peralatan dan Mesin	Baik
Server	Peralatan dan Mesin	Baik
Modem (2)	Peralatan dan Mesin	Rusak Berat
Kabel UTP	Peralatan dan Mesin	Baik
Kabel UTP	Peralatan dan Mesin	Baik
Hubbel UTP	Peralatan dan Mesin	Baik
Mixer Settler Type Adsorption Equipment	Peralatan dan Mesin	Baik
Bangunan Lainnya	Gedung dan Bangunan	Baik
Buku Lainnya (17)	Aset Tetap Lainnya	Baik
Software Komputer (2)	Software	Baik
Mesin Forocopy	Peralatan dan Mesin	Baik
Mesin Forocopy	Peralatan dan Mesin	Rusak Berat



3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor senilai Rp.98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp.118.169.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah serta nilainya, dan tahun ini sudah dilaksanakan lelang.

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGADILAN MILITR INGGI III SURABAYA

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan website pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi.melalui pengelolaan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan.

1. DUKUNGAN APLIKASI



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Serta aplikasi yang di bangun oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
 - Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)
- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS.)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT).
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)
 - Elektronik Tamu Militer (E, Tamil)

2. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan Alat Pengolah Data di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan jaringan LAN (*Local Area Connection*) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Untuk mendukung ketersediaan internet, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk Bitsnet sebagai penyedia layanan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Kecepatan akses 25 Mbps



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berjumlah 2 (dua) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2015 yang digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Mahkamah Agung RI tahun 2019 digunakan sebagai server pendukung e-Court. Spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.11 Data Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung SIPP	Merk Intel Xeon 3,4 Ghz	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		

1) Implementasi e-court

e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara



online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara Pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara Perdata.

2) Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), manajemen perkara merupakan salah satu tugas inti Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. dalam kegiatannya, proses administrasi dan penyelesaian perkara dari mulai perkara diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan serta laporannya didukung menggunakan suatu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Teknologi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sejak 2016. Pada tahun 2017 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer yang berada di wilayah hukumnya telah menggunakan/menerapkan aplikasi versi 3.20 sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan, yaitu pada tanggal/hari perkara diputus “petikan putusan” langsung di unggah melalui aplikasi SIPP. sebagai payung hukum, dalam penggunaan/penerapan aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengaduan.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 berupa pedoman reformasi birokrasi serta undang-undang nomor 55 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan memperhatikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor ; 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2018 ini mencanangkan program quick win berupa 5 (lima langkah) dalam peningkatan integritas Pegawai dan peningkatan Layanan Publik

B. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS.)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT).
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL).

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- (a) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).
- (b) Di Bidang Perkara
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
- (c) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).

2. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan Komputer dan Alat Pengolah Data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

client-server. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data. Untuk mendukung ketersediaan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk Bitsnet sebagai penyedia layanan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Kecepatan akses 55 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berjumlah 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court. Spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.11 Data Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant		
	OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		



	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		

3. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi Administrasi Perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

4. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-W3-Mil01/02/PS.01/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2020 adalah versi 4.0.1. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal Validitas, Akurasi dan Ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS



terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3. Sampai dengan akhir tahun 2020 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Rasio penanganan perkara sebesar 91,72 %.

C. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

1. IMPLEMENTASI E-COURT

e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-13 belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara Pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara Perdata. Namun seiring dengan perkembangan Tehnologi Informasi TI kedepan sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara Pidana.

2. IMPLEMENTASI SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis Web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2019 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP Versi **4.0.1**. Dasar dibentuknya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang Standart Pelayanan Pengadilan.

Pada Tahun 2020, versi SIPP di Pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami peningkatan, di awal Tahun 2019, masih menggunakan versi 330-1. Pada bulan Agustus 2020 ditingkatkan ke versi 400. Selang sebulan kemudian diupdate ke versi 401. Peningkatan versi tersebut didasari adanya penyempurnaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus berkembang.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi :

1. Komputer Server dengan spesifikasi :
 - a. Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.
 - b. CPU : Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30 Ghz
 - c. Memory : 8 Gb
 - d. Hard Disk : 300 Gb
 - e. OS : Linux centos 7
2. Router
 - a. Merk : MikrotikRB1100AHX2
 - b. CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
 - c. Main Storage : 64 MB
 - d. RAM : 1,5 Gb
 - e. LAN Port : 13 Port
 - f. OS :RouterOS
3. Bahwa dalam mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan tranparansi Peradilan pada bulan November Pengadilan Militer III-13 mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa :
 - a. Server dengan spesifikasi :
 - 1) Merk : Fujitsu TX1330M4



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- 2) CPU : Intel Xeon E-2134
 - 3) Memory : 32 GB
 - 4) Hard Disk : 2 x 1TB
- b. Komputer PTSP
- 1) Merk : HP AIO ProOne 600 G5
 - 2) CPU : Intel Core i5
 - 3) RAM : 4GB
 - 4) Hard Disk : 1TB
 - 5) OS : Windows 10
- c. UPS
- 1) Merk : APC Back-Up BX1400U-MS
 - 2) DayaKeluar : 1400VA/700W
 - 3) Form factor : Tower
- d. Kiosk Touchscreen
- 1) Merk : Vestouch
 - 2) OS : Android
 - 3) Display : 21,5 inch
- e. Rak Server
- 1) Merk : Indorack
 - 2) Ukuran : 19 Inch
 - 3) Jenis : Close rack Glass Door

4. Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau di atasnya.

Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat www.sipp.dilmil-madiun.go.id juga dilakukan sinkronisasi

3. IMPLEMENTASI E-COURT



e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan

saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-13 belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara pidana.

D. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-denpasar.go.id. Dalam website ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-14 Denpasar baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga Peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Beberapa Aplikasi didapatkan dari pusat, yaitu Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh Pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

- a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi di bidang perkara.
- b) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- c) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi.
- d) Sistem Aplikasi satker (SAS), yaitu aplikasi di bidang keuangan.
- e) Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), yaitu aplikasi di bidang keuangan.
- f) Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT), yaitu administrasi di bidang keuangan
- g) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN), yaitu administrasi di bidang keuangan.

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

- h) Sistem Informasi Online Pengadilan Militer Denpasar (SIMPOSAR), yaitu aplikasi di bidang kepaniteraan.
- i) Aplikasi Virtual Asisten Via Telegram (AVIAGRAM), yaitu aplikasi di bidang pelayanan publik.
- j) Sistem Informasi Gaji Pegawai (SIGAP), yaitu aplikasi di bidang Administrasi Personil.



k) Sistem Informasi Realisasi Anggaran Pengadilan Terkini (SIRAPI), yaitu aplikasi di bidang administrasi keuangan.

2. **BEBERAPA APLIKASI** yang digunakan di atas mengalami pembaruan (*update*) secara berkala, diantaranya yaitu aplikasi SIPP dimana hingga akhir tahun 2020 menggunakan versi terbaru yaitu versi 4.01 dan aplikasi SAS dimana versi terbaru hingga akhir tahun 2020 yaitu versi 20.0.0. **DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER**

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun dalam hal peningkatan Bandwith Internet, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 26 Juni 2019 Pengadilan Militer III-14 Denpasar menunjuk G.Medya sebagai penyedia Bandwith, dengan spesifikasi layanan Bandwith sebagai berikut :

- Kecepatan akses 70 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berjumlah 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court. Adapun spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.



Tabel IV.11 Data Perangkat Sercer

Nama	Spesifikasi	Jumlah	
Server pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5 Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB Memory PC 2-5300 Registered Buffered DIMMs (ddr2-667)15.GBMax Hard Driver up to8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0.1.10) Power Supply One 650W Single Non-RedundantOS Ubuntu	1	Unit
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu Process or ntel Xeon E3-1230v2ac/8T 3.30 GHz 8 Mb Memory 2x 4GB DR3-1600ECC OS Centos DVR-RW Supermulti Slimline Hard Drive Bays 4x2.5” Storage Controller RAID0/1 SAS based on LSI Mega RAID4 Port 2x 10/100/1000 Mbit Ethernet 1x iRMC remote management server 3 Pcle slots, 1x Serial RS-232 125 Watt max power consumption Warranty 3/3/3	1	Unit
Server pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4 Processor IntelXeon W-2134 Hard Driver 2x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5’ BC Memory 2x 16 GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC OS Centos Optical Driver Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA Storage Controller PRAID CP 400i Power Supply Modulat PSU 450W Platinum hp Warranty 3/3/3	1	Unit

3. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjara biaya



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-14 Denpasar. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-13 Denpasar.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-13 Denpasar.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, namun kewenangan Oditurat Militer III-13 Denpasar.



4. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi Teknologi berbasis Web yang ditujukan untuk memberikan Informasi Perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja Hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi Internal Pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan Pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor :W3.Mil03/09c/Skep/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar di tahun 2020 adalah versi 4.0.1. Pembaruan versi ini sehubungan dengan adanya penyesuaian fitur PNBPN dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 4.0.1



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Rasio penanganan Perkara sebesar 96,55 %.

E. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

IMPLEMENTASI SIPP

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Implementasi SIPP sudah sampai pada versi terbaru 4.0.1 dan juga aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang merupakan aplikasi pengawasan SIPP terdiri dari 8 submenu, antara lain:

1. Beranda
2. Data Umum
3. Pidana
4. Penetapan
5. Jadwal Sidang
6. Putus dan Minutasi
7. E-Doc
8. Kinerja.

Implementasi terbaru dari SIPP adalah Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Peadilan Militer) yang merupakan aplikasi yang bisa dapat dimonitoring kegiatan kantor oleh Pimpinan dan Pimpinan Atas mulai dari Persuratan, Kepaniteraan, Kepegawaian, Keuangan dan BMN serta Umum.

F. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

1. IMPLEMENTASI *E-COURT*

e-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat



waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut :

pendaftaran perkara online (e-filing)

pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.

Pembayaran panjar biaya online (e-payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh pimpinan pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik skum atau e-skum. pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-skum akan mendapatkan nomor pembayaran (virtual account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. pemanggilan elektronik (e-summons) sesuai dengan perma no.3 tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Persidangan elektronik (e-litigasi)

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Konsep aplikasi *e-court* yang diterapkan pada lingkungan Peradilan Militer berbeda dengan aplikasi *e-court* yang diterapkan untuk perkara perdata, jika pada aplikasi *e-court* yang saat ini diterapkan untuk perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama memiliki modul *e-payment* yang dapat memudahkan dalam proses transaksi panjar biaya perkara, maka pada aplikasi *e-court* di lingkungan Peradilan Militer modul *e-payment* tersebut ditiadakan, karena biaya perkara dalam Peradilan Militer tidak dibebankan kepada para pihak. hal ini berarti konsep penggunaan aplikasi *e-court* hanya sebatas pada *e-registration* dan *e-summon*. lain hal nya dengan aplikasi *e-court* yang saat ini diterapkan untuk perkara perdata, aplikasi *e-court* yang diterapkan pada Peradilan Militer tidak memerlukan verifikasi advokat, artinya dari sisi pengguna (*user*) pun terdapat perbedaan antara aplikasi *e-court* Peradilan Militer dengan aplikasi *e-court* yang saat ini diterapkan untuk perkara perdata. sudah jelas, aplikasi *e-court* Peradilan Militer memang berfokus pada pendaftaran perkara secara *online* oleh oditur dan pemberkasan *file* perkara secara *online* (untuk versi saat ini). untuk versi selanjutnya aplikasi *e-court* akan dikembangkan untuk pemanggilan sidang secara *online* maupun pemberitahuan putusan secara *online*.

2. IMPLEMENTASI SIPP

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-16 Makassar saat ini menggunakan versi 3.3.0-1 yang mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1375/SEK/HM.02.3/9/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama. per Desember 2019 data perkara yang telah terekam dalam SIPP adalah sebanyak 104 (seratus empat) perkara yang terdiri dari perkara Pidana Militer sebanyak 91 (sembilan puluh satu) perkara dan Pelanggaran Lalu Lintas sebanyak 13 (tiga belas) perkara. sinkronisasi data perkara SIPP lokal baik dengan SIPP web maupun dengan



SIPP Mahkamah Agung telah rutin dilaksanakan setiap hari kerja. pengguna SIPP lokal Pengadilan Militer III-16 Makassar saat ini adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang.

G. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

IMPLEMENTASI SIPP

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan sebuah Aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di pengadilan yaitu SIPP yang pada versi 3.1.1 sudah dipergunakan di 4 (empat) Badan Peradilan. SIPP merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Aplikasi SIPP manual pengguna (user manual) Aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 di Pengadilan Militer Utama merupakan web-based Application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai web browser melalui suatu jaringan Internet atau Intranet. contoh umum web-based aplikasi adalah Facebook, Google, dan Twitter. Dalam perkembangannya SIPP dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberapa Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai percontohan. Kemudian pada versi 2 SIPP diluncurkan dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan Perkara Perdata, Auto Generate Template Penetapan Hakim, Berita Acara Persidangan dan pembaharuan fasilitas dan fungsi yang lainnya. kemudian pada versi 3 dimana Pengadilan Tinggi turut berperan serta dalam pencatatan perkara dengan diluncurkannya SIPP-PT pada versi 3 ini juga mencakup perbaikan-perbaikan pada versi SIPP untuk Pengadilan Negeri. versi berikutnya dari SIPP adalah versi 3.1.1 dimana Aplikasi SIPP untuk



Pengadilan Negeri dibangun ulang menjadi SIPP untuk Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat mencakup 4 (empat) lingkungan Peradilan. Versi selanjutnya 3.1.1 dari SIPP adalah versi 3.1.2. versi paling akhir dari SIPP yang digunakan di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah versi 3.3.0.1. Implementasi SIPP di Pengadilan Militer III17 Manado sampai dengan akhir bulan Desember 2019 sudah mencapai 100%.

H. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan Teknologi linformasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.Dilmil-Ambon.go.id.sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Implementasi SIPP

Sebagai sebuah Aplikasi yang membantu mempermudah pelaksanaan business process dan penyediaan Informasi Publik atas penanganan perkara di Pengadilan, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan saat ini pada Penghadilan Militer III-18 Ambon telah menggunakan versi 3.3.0-1 untuk updatan yang terakhir. dan dapat diakses oleh umum serta digunakan sebagai data penyusunan laporan keadan perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. dalam perkembangan penerapan Implementasi SIPP pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2019 mendapat dukungan perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi pendukung ecourt tahun anggaran 2019, berupa Standing Close Rack Glass Door, Kiosk, PC Unit, dan telah digunakan untuk mempermudah akses pelayanan Public khususnya untuk pelayanan yang berlangsung di tempat satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon serta mendukung Sistem Aplikasi SIPP .

tabel data perangkat teknologi informasi dan komunikasi

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK)		
PC	12	unit
Laptop	11	unit



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Server	3	unit
Router	1	unit
Vesdtouch i kios	1	unit
PC dan Laptop yang terhubung ke Internet melalui kabel LAN	23	unit

tabel data infrastruktur jaringan

infrastruktur jaringan		
Jaringan Internet	total bandwith	20 mbps
	nama provider internet	indihome telkom
	wifi dengan layanan internet	tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	koneksi lan	jaringan local antar ruang

I. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

A) DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-19 Jayapura bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah memanfaatkan keberadaan Teknologi Informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-jayapura.go.id. Dalam website ini Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyajikan Informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura baik informasi yang bersifat Teknis , Non Teknis maupun Informasi umum lainnya. Adapun perkembangan dan dukungan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Peradilan selanjutnya adalah adanya Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan yang terbaru adalah Aplikasi e-court, namun pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Aplikasi e-court itu sendiri belum dapat dilaksanakan secara penuh, dikarenakan adanya keterbatasan Undang-Undang yang mengatur, dan dalam hal ini masih berlaku pada Hukum Perdata, dimana belum adanya Implementasi Hukum Perdata dalam Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga Peradilan yang di yakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Aplikasi SIPP ini secara kontinu terus disempurnakan, dimana Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 4.0.1. Perangkat Teknologi Informasi dan Alat Pengolah Data untuk mendukung pengoperasian Aplikasi SIPP di Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu:

Tabel IV.9 Data Perangkat Pendukung Aplikasi SIPP

Perangkat Pendukung SIPP			
Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server	Fujitsu (OS-Linux)	2	Unit
Aplikasi SIPP	Versi 3.2.0	1	Aplikasi

Tabel IV.10 Data Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)			
Jumlah Periperal	PC	12	Unit
	Laptop	10	Unit
	PC dan Laptop yang terhubung ke internet melalui kabel LAN atau wifi	22	Unit
	Server	2	Unit
	e-Kios	1	Unit
Jumlah periperal dengan operating system (OS)	Windows XP atau di bawahnya	6	Unit
	Lebih baru dari windows XP	16	Unit
	Linux	2	Unit

Tabel IV.11 Data Infrastruktur Jaringan

INFRASTRUKTUR JARINGAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Jaringan internet	Total bandwidth internet	20 Mbps
	Nama provider internet	Telkom
	Performa jaringan internet	Baik, lancar
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan lokal antar ruang
	Performa jaringan LAN	Baik, lancar

B) IMPLEMENTASI SIPP

Pengadilan Militer III-19 Jayapura melaksanakan penerapan Aplikasi SIPP, dimana proses Aplikasi SIPP dilakukan mulai dari proses pendaftaran perkara secara sistem, hingga alur proses perkara berakhir atau dengan kata lain minutasasi. Semua pihak mempunyai fungsi masing-masing secara sistem, dan tentunya jika satu pihak terhambat akan mempengaruhi proses selanjutnya, sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid dari semua pihak (end user), juga dengan Admin di bidang IT dalam rangka mengsinkronisasikan data yang sudah di input, sehingga data ini juga dapat diketahui oleh Instansi Pusat maupun kepada Pihak Publik yang membutuhkan informasi sejauh mana proses perkara yang bersangkutan ataupun, informasi lain yang terkait.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura, juga menerapkan Aplikasi MIS atau dengan kata lain Monitoring Implementasi SIPP, dimana Aplikasi ini memonitor sejauh mana Aplikasi SIPP ini telah digunakan, jika ada proses-proses yang masih belum dilaksanakan, akan dengan mudah diketahui melalui Aplikasi ini.

Berikut beberapa contoh penggunaan aplikasi SIPP dan MIS :

Gambar IV.1 Penggunaan Aplikasi SIPP

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	284-K/PM.III-19/AD/XII/2020	08 Des. 2020	Pencurian pada Suatu Tempat Dibawah Penjagaan atau Pengamanannya	Odifur: Zulkarnain, SH, Terdakwa: Guruh Amba Sadewa, S.T.Han	Persidangan	Persidangan	8 Hari	[detail]
2	283-K/PM.III-19/AD/XII/2020	07 Des. 2020	Desersi	Odifur: Zulkarnain, SH, Terdakwa: I Gladis Wira Aditya Putra	Persidangan	Persidangan	9 Hari	[detail]
3	282-K/PM.III-19/AD/XII/2020	07 Des. 2020	Desersi	Odifur: Zulkarnain, SH, Terdakwa: Kelle Wenda	Persidangan	Persidangan	9 Hari	[detail]
4	281-K/PM.III-19/AD/XII/2020	04 Des. 2020	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	Odifur: Jem CH Manibuy, S.H, Terdakwa: Ferinanda Mambieuw	Persidangan	Persidangan	12 Hari	[detail]
5	280-K/PM.III-19/AD/XII/2020	04 Des. 2020	Penganiayaan	Odifur: Jem CH Manibuy, S.H, Terdakwa: Lion Willems Kalikatu	Putusan	Pemberitahuan Putusan	8 Hari	[detail]



Gambar IV.2 Statistik pada Aplikasi SIPP

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara										
Penambahan Perkara			Status Perkara			Status Penahanan				
Desember 2020										
No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Bandi ng	Kasasi	Peninjau an Kembali	Grasi
1	Pidana Kejahatan	21	11	29	263,64 %	3	-	-	-	-
2	Pidana Pelanggaran	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-

Gambar IV.3 Jadwal Sidang pada Aplikasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

Selamat Datang Super Admin!
 Anda Login Sebagai Super Admin

Keluar

Home
Pidana Militer
Laporan
Jadwal Sidang
Asip Perkara
e-Court
e-Payment
Pesan
Referensi
System

JADWAL SIDANG PERKARA PIDANA KEJAHATAN.

Total : 2

Search
Excel
Cetak Jadwal Sidang

No	Tanggal	Ruangan	Nomor Perkara	Agenda	Para Pihak	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Link
1	15 Dec 2020	Ruang Sidang Utama Dilmil	243-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Pembacaan Putusan	Oditur: Sumaryo, SH Terdakwa: Otto Theophilus Ilsen	Muhamad Khazim Dendy Sutyoso SS Mokhammad Zainal Abidin	Panitera Pengganti: Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	[detail]
2	15 Dec 2020	Ruang Sidang Utama Dilmil	235-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Pembacaan Replik	Oditur: Zuikarnain, SH. Terdakwa: Zulfadil	Muhamad Khazim Dendy Sutyoso SS Mokhammad Zainal Abidin	Panitera Pengganti: Budi Santosa, SH., MH.	[detail]

Gambar IV.4

Jadwal Sidang pada aplikasi SIPP untuk tampilan di layar vestouch/kios k



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

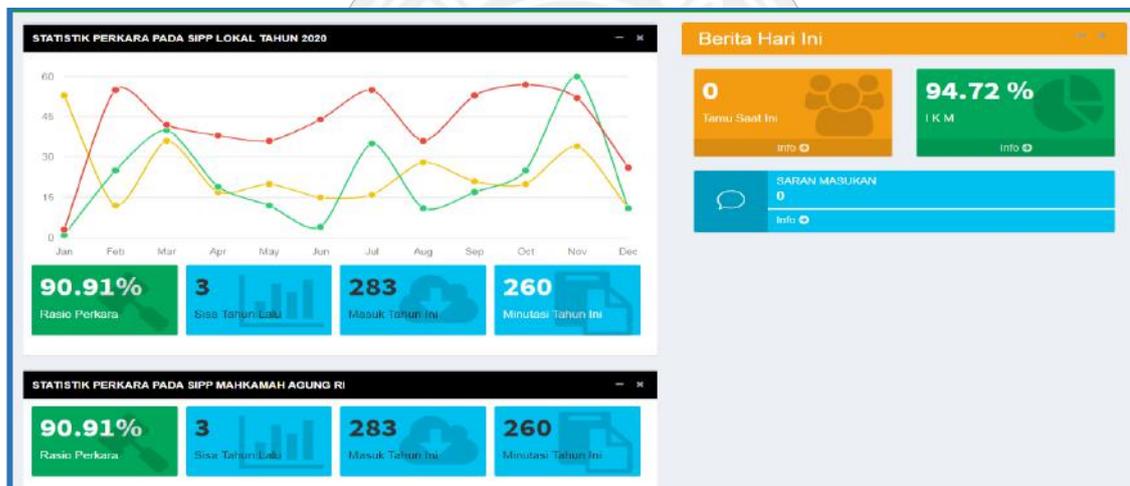
PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

JADWAL SIDANG SELASA, 15 DES. 2020

NO PERKARA	235-K/PM.III-19/AD/XI/2020	<div style="color: white; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SELAMAT DATANG DI PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA</div> <div style="color: white; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">PELAYANAN PRIMA</div>
JAM SIDANG	09:30:00 WIT	
MAJELIS HAKIM	Hakim Ketua: Letnan Kolonel Muhamad Khazim, SH. Hakim Anggota: Mayor Chk Dendy Sullyoso SS., SH. Hakim Anggota: Mayor Laul (KH) Mokhammad Zainal Abidin, SH	
PANITERA	Letfu Sus Budi Santosa, SH., MH.	
ODITUR	Letkol Chk Zulkarnain, SH.	
TERDAKWA	Praka Zulfadli	
AGENDA SIDANG	Pembacaan Replik	
RUANG SIDANG	Ruang Sidang Utama Dilmil	
NO PERKARA	243-K/PM.III-19/AD/XI/2020	
JAM SIDANG	10:00:00 WIT	

Berita Sahingga | Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan TUN TA 2020 — Peman:
16:13:29
Ke

Gambar IV.5
Monitoring Implementasi SIPP



MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

🏠 Beranda 📄 Data Umum 📁 Pidana 📅 Penetapan 📅 Jadwal Sidang 📄 Putus & Minutasi 📄 E-Doc & Arsip 👤 Kinerja

INFORMASI PERKARA

Status Perkara Penyelesaian Perkara

INFO	DATA
Penahanan	- Perkara
Penundaan Jadwal Sidang	3 Perkara
Pengisian Data Saksi	- Perkara
Pengisian Putusan Akhir	- Perkara
Putusan Belum Minutasi	7 Perkara

DAFTAR MINUTASI TERBAIK BULAN INI

Hakim	Panitera Pengganti	Skor
1. Dendy Sullyoso SS., SH.	DENDY SUTIYOSO SS., SH. Minutasi bulan ini : 26 perkara. Minutasi tercepat bulan ini : 7 hari 15 jam 21 menit 16 detik.	Skor : 351
2. MOKHAMAD ZAINAL ABIDIN, SH	Minutasi bulan ini : 26 perkara. Minutasi tercepat bulan ini : 7 hari 15 jam 21 menit 16 detik.	Skor : 351
3. MUHAMAD KHAZIM, SH.	Minutasi bulan ini : 23 perkara. Minutasi tercepat bulan ini : 7 hari 15 jam 21 menit 16 detik.	Skor : 318

Gambar IV.6
Monitoring Penundaan Jadwal Sidang pada SIPP



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

[Beranda](#)
[Data Umum](#)
[Pidana](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Putus & Minutasi](#)
[E-Doc & Arsip](#)
[Kinerja](#)

DAFTAR PERKARA YANG BELUM DIINPUT PENUNDAAN JADWAL SIDANG

Menu ini menyajikan informasi status penundaan perkara (Khusus SIDANG KELILING, notifikasi ini akan ditampilkan apabila penginputan data lebih dari 3 hari setelah jadwal sidang keliling).

Tampilkan 10 entri

#	Id	Nomor Perkara	Para Pihak	Panitera Pengganti	Tgl. Sidang	Agenda Terakhir	Lama Penundaan
1		241-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Jem CH Manibay, S.H. Terdakwa: Husain Warmay	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	Jumat, 04 Desember 2020	SIDANG PERTAMA	17 Hari
2		242-K/PM.III-19/AL/XI/2020	Oditur: Sumaryo, SH Terdakwa: Arik Anwarudin	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	Jumat, 04 Desember 2020	SIDANG PERTAMA	17 Hari
3		248-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Jem CH Manibay, S.H. Terdakwa: Nurhanik Avrik	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	Kamis, 10 Desember 2020	SIDANG PERTAMA	11 Hari

Gambar IV.7

Monitoring Yang Belum Menginput Data Minutasi pada SIPP

MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

[Beranda](#)
[Data Umum](#)
[Pidana](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Putus & Minutasi](#)
[E-Doc & Arsip](#)
[Kinerja](#)

DAFTAR PERKARA YANG SUDAH PUTUSAN TETAPI BELUM MENGINPUT DATA MINUTASI

Menu ini menyajikan daftar perkara yang sudah putus tetapi belum di minutasi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014.

Tampilkan 10 entri

#	Id	Nomor Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Tgl. Putusan	Lama Minutasi
1		209-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Ferry Irawan, SH. Terdakwa: Yusak Keniya	Muhamad Khazim, SH. Dendy Sutiyoso SS., SH. Mokhamad Zainal Abidin, SH	Budi Santosa, SH., MH.	15 Desember 2020	6 Hari
2		235-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Zulkarnain, SH. Terdakwa: Zulfadi	Muhamad Khazim, SH. Dendy Sutiyoso SS., SH. Mokhamad Zainal Abidin, SH	Budi Santosa, SH., MH.	15 Desember 2020	6 Hari
3		229-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Ridho Sihombing, SH., MH Terdakwa: Baruk Pramono	Muhamad Khazim, SH. Dendy Sutiyoso SS., SH. Mokhamad Zainal Abidin, SH	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	15 Desember 2020	5 Hari

Gambar IV.8

Monitoring Yang Belum Mengupload E-Doc Putusan pada SIPP

MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

[Beranda](#)
[Data Umum](#)
[Pidana](#)
[Penetapan](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Putus & Minutasi](#)
[E-Doc & Arsip](#)
[Kinerja](#)

DAFTAR PERKARA PIDANA YANG BELUM UPLOAD E-DOC PUTUSAN

Menu ini menyajikan daftar perkara yang belum unggah / upload dokumen elektronik Putusan.

Tampilkan 10 entri

#	Id	Nomor Perkara	Para Pihak	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Tgl. Putusan	Status Perkara
1		245-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Sumaryo, SH Terdakwa: Otto Theophilus Mtsen	Muhamad Khazim, SH. Dendy Sutiyoso SS., SH. Mokhamad Zainal Abidin, SH	wahyu jatmiko	15 Desember 2020	Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)
2		240-K/PM.III-19/AD/XI/2020	Oditur: Ridho Sihombing, SH., MH Terdakwa: Diki Husnardi	Muhamad Khazim, SH. Dendy Sutiyoso SS., SH. Mokhamad Zainal Abidin, SH	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	11 Desember 2020	Minutasi



Gambar IV.9

Monitoring Yang Belum Mengupload E-Doc Dakwaan pada SIPP

MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

Beranda Data Umum Pidana Penetapan Jadwal Sidang Putus & Minutasi E-Doc & Arsip Kinerja

DAFTAR PERKARA PIDANA YANG BELUM UPLOAD E-DOC DAKWAAN

Menu ini menyajikan daftar perkara yang belum unggah / upload dokumen elektronik dakwaan.

Tampilkan 10 entri Cari:

#	Nomor Perkara	Tgl. Pendaftaran	Para Pihak	Status Perkara
Tidak ditemukan data yang sesuai				

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Gambar IV.10

Monitoring Yang Belum Mengupload E-Doc Tuntutan

MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

Beranda Data Umum Pidana Penetapan Jadwal Sidang Putus & Minutasi E-Doc & Arsip Kinerja

DAFTAR PERKARA PIDANA YANG BELUM UPLOAD E-DOC TUNTUTAN

Menu ini menyajikan daftar perkara yang belum unggah / upload dokumen elektronik tuntutan.

Tampilkan 10 entri Cari:

#	Nomor Perkara	Tgl. Tuntutan	Terdakwa	Panitera Pengganti	Status Perkara
1	229-K/PM.III-19/AD/IX/2020	16 Desember 2020	Bagus Pramono	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	Pembertahanan Putusan
2	232-K/PM.III-19/AD/IX/2020	16 Desember 2020	Agus Noak Baibaba	Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.	Pembertahanan Putusan

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar IV.11

Monitoring Yang Belum Mengupload Arsip Perkara secara Elektronik



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

MONITORING IMPLEMENTASI DATA SIPP TAHUN 2020

Halaman ini menyajikan data informasi implementasi penginputan data pada SIPP sesuai dengan tahun yang dipilih.

Beranda Data Umum Pribadi Penetapan Jadwal Sidang Putus & Minutasi E-Doc & Arsip Kinerja

DAFTAR PERKARA YANG BELUM DIARSIPKAN

Menu ini menyajikan daftar perkara yang belum dilakukan penginputan data arsip.

Tampilkan 10 entri

#	Nomor Perkara	Tanggal Minutasi	Terdakwa	Panitera Pengganti
1	120-KPM.III-19/AD/M/2020	09 Oktober 2020	Kiswanto Dg Ambo Upo	Panitera Pengganti: Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.

Menampilkan 1 sampai 1 dan 1 entri





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

I. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen Pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*). Dalam Akreditasi Penjaminan Mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan Pelayanan Publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam Akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) Area, yaitu :

area 1 : Kepemimpinan

area 2 : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara

area 3 : Sarana dan Prasarana

area 4 : *E-Judiciary*

area 5 : Layanan Pengadilan

area 6 : Kepegawaian dan Tata Laksana

area 7 : Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pada tanggal tanggal 6 juni 2015 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI melaksanakan *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu ini merupakan proses sistematis dan terdokumentasi untuk bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk kriteria penilaian dipenuhi. Dari hasil audit *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Militer tinggi III Surabaya memperoleh nilai “A” (*Excellent*). Pengadilan Militer tinggi III Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.



gambar sertifikat akreditasi penjaminan mutu



Zona Integritas

Sesuai peraturan Menpan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 2017. Adapun pencanangan ZI di Pengadilan Militer tinggi III Surabaya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2018. Pencanangan pembangunan ZI adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Pengadilan Militer tinggi III Surabaya beserta seluruh Pegawai Pengadilan Militer tinggi III Surabaya menandatangani dokumen Pakta Integritas yang berisi 7 (tujuh) butir komitmen/janji Pegawai. Pencanangan ZI di Pengadilan Militer Tinggi III dilakukan secara terbuka dengan mengundang beberapa Satker lain, diutamakan yang sering berhubungan dengan Pengadilan Militer Tinggi III. Pencanangan ZI ini kemudian dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan Reformasi Birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.



gambar piagam pencanangan zona integritas



setelah melalui serangkaian audit, evaluasi dan survei dari tim Bawas MA, Tim BPS dan Tim Menpan dan RB, maka Pengadilan Militer tinggi III dinyatakan layak dan berhak memperoleh penghargaan ZI dengan predikat WBK. Piagam penghargaan WBK diserahkan oleh Menteri Pan-RB kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM 2019 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019.

gambar penganugerahan piagam penghargaan WBK





Tahun 2020 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diusulkan sebagai salah satu Pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima Anugerah tersebut.

Sertifikasi ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang Adminisasi Umum, Perkara, Kepegawaian dan Keuangan serta meningkatkan Pelayanan Publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa Pelayanan Publik di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memenuhi Standar Manajemen Mutu yang berlaku secara Internasional.

gambar sertifikat ISO





Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 460/DjMT/Kep/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi, PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kapaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Melalui Meja PTSP ini, pencari Keadilan cukup datang kemeja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan bekerja dan melayaninya.



gambar sarana pelayanan terpadu satu pintu



Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2018.

Di tahun 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun dan menjalankan dua aplikasi baru yaitu Siratmil (e-tamil) dan Siskomsid sebagai pedoman penggunaan kedua aplikasi tersebut,

a) Aplikasi Siskomsid

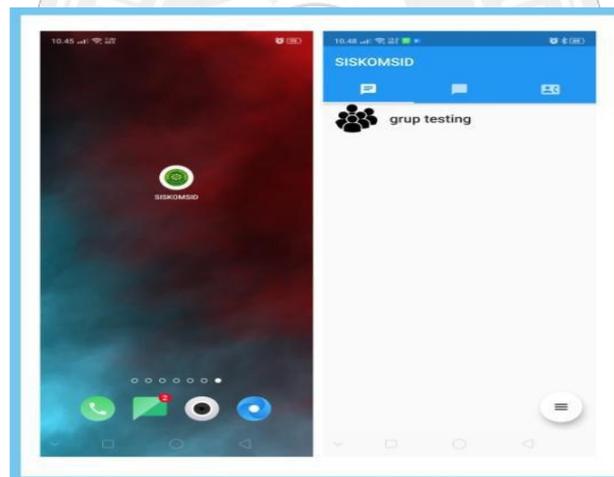
Aplikasi Siskomsid (Sistem Komunikasi Persidangan) merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tingkat pertama bagi prajurit berpangkat Mayor keatas dan memutus perkara Tingkat Banding bagi Prajurit berpangkat Prajurit Dua sampai dengan berpangkat Kapten. Untuk terlaksananya tugas pokok Pengadilan secara efektif dan efisien Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah memiliki Sistem Komunikasi Persidangan atau Siskomsid yang terintegrasi dengan SIPP atau Sistem Informasi Penyelesaian Perkara. Sistem komunikasi persidangan atau Siskomsid berfungsi sebagai pengendali waktu pelaksanaan persidangan sesuai agenda persidangan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

agar tepat waktu. Siskomsid merupakan sarana komunikasi untuk para Hakim Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum dan Panitera Pengganti sehingga apabila terdapat perubahan waktu yang dikarenakan adanya kegiatan kedinasan dapat dikoordinasikan. Siskomsid dijalankan oleh Admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada oditur militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara. Adapun komunikasi satu arah ini dimaksudkan agar Admin hanya fokus untuk mengirim info atau *reminder* saja. Apabila ada pertanyaan, maka penerima pesan akan diarahkan untuk menghubungi nomor Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang lebih berwenang untuk menjawab pertanyaan seputar pelaksanaan persidangan atau masalah perkara lainnya.

gambar aplikasi Siskomsid



b) Aplikasi Siratmil (e-tamil)

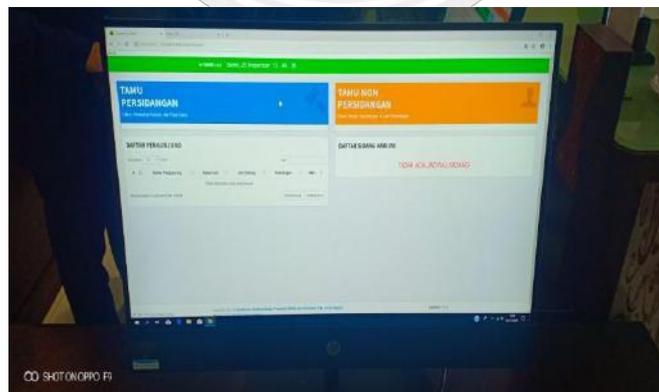
e-tamil . (Aplikasi Buku Tamu) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mempunyai misi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan dengan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan sebagaimana di amanatkan dalam UU RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik, maka



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menyediakan e-tamil sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Pengadilan dalam rangka pencegahan KKN di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. e-tamil adalah salah satu sarana pendukung kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, karena dari data tamu yang terinput pada e-tamil dapat diketahui tingkat kepuasan pelayanan Pengadilan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pengadilan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Melalui e-tamil kita dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Pelayanan Pengadilan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Adapun alur pelayanan melalui e-tamil adalah tamu yang berkunjung di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di sambut, disapa dan ditanyakan tentang keperluannya oleh petugas, selanjutnya diarahkan ke meja e-tamil dan meminta tamu tersebut mengisi data serta keperluannya dan apabila tamu atau pengunjung tersebut mengalami kesulitan maka petugas akan membantu mengisi data serta keperluannya, kemudian tamu atau pengunjung tersebut oleh petugas diarahkan ke ruang tunggu terbuka atau meja PTSP sesuai dengan keperluannya. setelah tamu atau pengunjung mendapatkan pelayanan sesuai keperluannya petugas kembali mengarahkan untuk kembali ke meja e-tamil agar kembali mengisi kuisioner kepuasan pelayanan masyarakat.

gambar aplikasi e-tamil





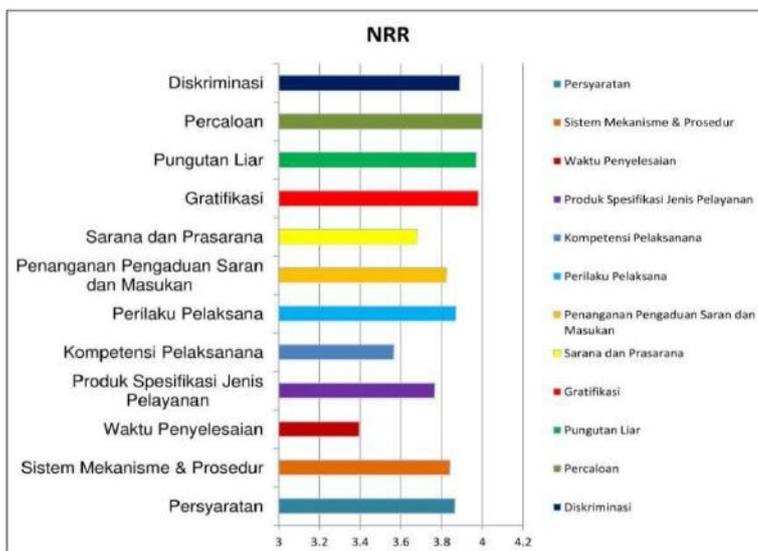
c. Hasil Survei Pelayanan Publik

Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan 2 (jenis) Survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survei dilaksanakan terhadap 100 (seratus) orang responden variabel pada pengukuran Survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei IKM tahun 2020 mencapai nilai 91,85 yaitu berada di kategori sangat baik.

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**



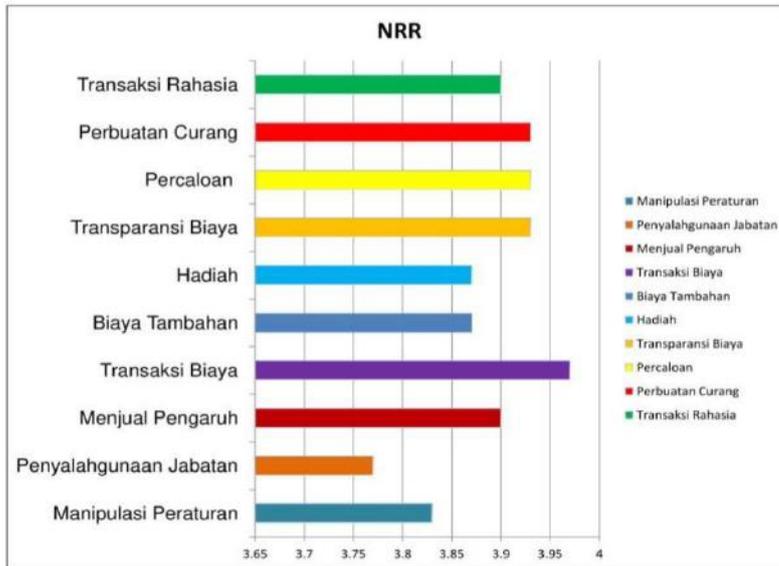
91,85

2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Survei IPK tahun 2019 mencapai nilai 97,17 yaitu berada di kategori sangat baik.



INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



97,25

B. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi Penjamin Mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen Pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas. Dalam Akreditasi Penjaminan Mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau Standar Pelaksanaan Pelayanan Publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung melalui *Assesment Surveillance* terakhir kali pada tahun 2019. Hasil Audit Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut memberikan nilai "A" (*Excellent*). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas.



Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



2. ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu Pengadilan dengan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK



Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu Pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.



3. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar V.3 Sertifikat ISO 9001:2015



4. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang Prima, Akuntabel dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/03/PS.00/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Salinan Putusan	2	Kepaniteraan
2	Petikan Putusan	4	Kepaniteraan
3	Akta BHT	6	Kepaniteraan
4	Akta Putus	2	Kepaniteraan
5	Memori Banding	1	Kepaniteraan
6	Legalisir	1	Kepaniteraan

5. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan Teknologi Informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas dan Transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.



Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun Inovasi berupa Aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis Teknologi Informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1) Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan Aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

2. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses



pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

3. Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara Elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

4. Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang Kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

6. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2020 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang Pelayanan Publik, yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan Pengadilan terhadap Pelayanan Publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2020 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.

Survei dilaksanakan terhadap 50 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/07/PL.09/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.



1) SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.2 Survei IKM Tahun 2020

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2020 s.d. 3 April 2020	90,96	Sangat Baik
2	Triwulan II	4 April 2020 s.d. 3 Juli 2020	91,85	Sangat Baik
3	Triwulan III	6 Juli 2020 s.d. 2 Oktober 2020	94,35	Sangat Baik
4	Triwulan IV	5 Oktober 2020 s.d. 30 Desember 2020	94,63	Sangat Baik

2) SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.3 Survei IPK Tahun 2020

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2020 s.d. 3 April 2020	91,56	Sangat Baik
2	Triwulan II	4 April 2020 s.d. 3 Juli 2020	92,25	Sangat Baik
3	Triwulan III	6 Juli 2020 s.d. 2 Oktober 2020	93,81	Sangat Baik
4	Triwulan IV	5 Oktober 2020 s.d. 30 Desember 2020	94,25	Sangat Baik



C. PENGADILAN MILITER III13 MADIUN

Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (*Excellent*) Nomor TAPM.03-MIL/QMR/SERTIFIKAT/10/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen Badilmiltun MARI. Kemudian pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 telah dilakukan *surveillance* Akreditasi oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat “A” (*Excellent*) dengan Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelum ini kondisi pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun masih terpecah berada di 2 (Dua) lantai, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien. Selain itu, kritik masyarakat



terhadap Pengadilan yang menganggap selama ini tidak transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta masih terjadinya interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari keadilan dengan aparat Pengadilan yang berpotensi munculnya KKN, sehingga mengundang kritik dari pihak luar misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti keberadaan tamu. Merespon masalah tersebut, di mana secara ideal sebuah badan Peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran Visi Badan Peradilan yakni terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, dan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi peningkatan pelayanan publik, maka tercetus pemikiran untuk melakukan terobosan atau inovasi dengan mengambil langkah strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang Transparan dan Akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan Administrasi baik bidang Teknis maupun Non Teknis. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Militer III-13 Madiun, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni Peradilan Sederhana, Murah, Akuntabel, Responsibility, Transparan, Efektif, Efisien dan Ekonomis atau SMART E3 sebagaimana menjadi motto Pengadilan Militer III-13 Madiun "Cintai Profesi Jaga Institusi". Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan



sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

1) Jenis-jenis layanan Peradilan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu.

Jenis layanan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu meliputi :

a. KEPANITERAAN

1. Kepaniteraan Muda Pidana
 - a) Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Oditur Militer.
 - b) Menerima permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
 - c) Menerima permohonan Pencabutan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - d) Menyerahkan penetapan Penahanan Hakim Ketua dan atau Perpanjangan Penahanan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan.
 - e) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan Informasi penyelesaian perkara Pidana.
2. Kepaniteraan Muda Hukum
 1. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Pidana.
 2. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 3. Permohonan keterangan data perkara dan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 4. Permohonan legalisasi surat.



5. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
6. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan Informasi yang diminta pemohon.
7. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
8. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.

b. KESEKRETARIATAN

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun, serta memberikan Informasi berkaitan dengan Kesekretariatan.

c. PENGADUAN

Petugas Pengaduan menerima Pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan pengadilan dan mengenai perilaku Aparat Pengadilan.

2) Prinsip tata kerja penyelenggaraan layanan terpadu.

Pelaksanaan Layanan terpadu, dilaksanakan melalui system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*). Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya di bagi menjadi 3 (Tiga) meja Pelayanan, antara lain :

- a. Meja 1 Pelayanan dibidang Kesekretariatan, melayani persuratan dan para tamu yang membutuhkan Informasi terkait Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Meja 2 Pelayanan Pengaduan, melayani pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pengadilan dan mengenai perilaku aparat Pengadilan.



- c. Meja 3 Pelayanan di bidang kepaniteraan, melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Kepaniteraan Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di pengadilan dalam waktu dan tempat yang bersamaan (*front office*), dengan menunjuk petugas khusus untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian.

Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kebijakan Pengadilan.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan tempat yang cukup representatif yakni pada salah satu ruangan yang berada di lantai 1 (satu) gedung Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Tata kerja Pengaduan

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), sesuai Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun telah ditetapkan Persyaratan-persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaian permohonan layanan.

Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan jangka waktu penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi.

Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon, petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu penyelesaian kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas tugas lain dan datang kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan (*directservice*).

Selain itu, demi memudahkan para pencari keadilan dalam memberikan aduan, saran dan kritik, Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan sarana berupa survey Indeks Kepuasan Masyarakat yg bisa diakses secara elektronik, dan juga untuk pihak-pihak yang berperkara, ada sebuah aplikasi bernama e-SIDANGKU, yakni Aplikasi Informasi Persidangan Berbasis Android, yang mana didalamnya terdapat berbagai jenis informasi terkait persidangan yang dijalani oleh Terdakwa, berikut form pengaduan bilamana disinyalir ada penyimpangan yang terjadi. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian (para Panitera Muda) telah menetapkan pekerjaan yang terukur waktu penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer III-13 Madiun. Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian dengan menggunakan nomor antrian sesuai dengan kepentingan atau layanan yang diperlukan pemohon yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis



layanan yang telah disediakan di pintu masuk tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan brosur persyaratan dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti Difabel, Disabilitas atau keterbatasan diri, ibu hamil dan lansia, telah disediakan pula tempat khusus (*priority seats*).

4) **Tata Kerja Pemrosesan**

- a. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan
- b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
- c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan

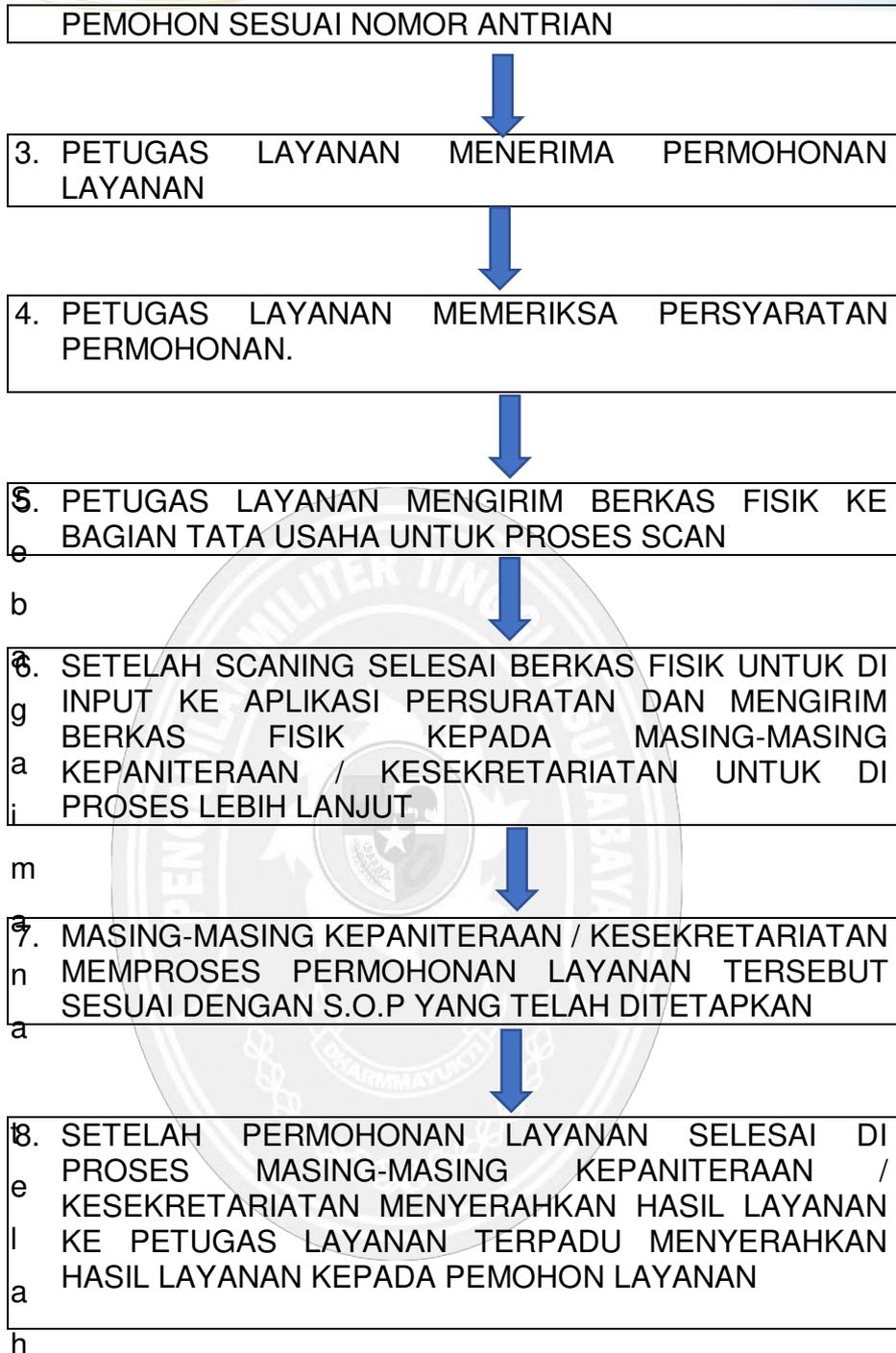
5) **Alur Penyelesaian Layanan terpadu**

Untuk lebih memudahkan masyarakat pencari keadilan mengetahui dan memahami penyelesaian layanan terpadu Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut :

1. PEMOHON LAYANAN MENGISI BUKU TAMU ELEKTRONIK DAN MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN



2. PETUGAS LAYANAN TERPADU MEMANGGIL PARA



diuraikan di atas, penyelesaian jenis-jenis pelayanan terpadu harus terukur agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan kepastian penyelesaiannya. Untuk memastikan hal itu, maka dalam SOP tentang PTSP telah ditentukan jangka waktu penyelesaian jenis-jenis layanan terpadu sebagai berikut :



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

1. KEPANITERAAN

a. Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Muda Pidana

No	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Oditur Militer	15 Menit	
2.	Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi	15 Menit	
3.	Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi dan peninjauan kembali	15 Menit	
4.	Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan	15 Menit	
5.	Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana / kekhususan	30 Menit	

b. Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Muda Hukum

No	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana	30 Menit	
2.	Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset	1 Jam	
3.	Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	30 Menit	
4.	Permohonan legalisasi surat	15 Menit	
5.	Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144	30 Menit	
	Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang	30 Menit	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

	diminta pemohon		
	Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan	30 Menit	

2. KESEKRETARIATAN

No	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Surat / Berkas diterima oleh Subbag Umum dan Keuangan, diberikan nomor agenda surat masuk dan dilakukan proses scan pada surat tersebut. Selanjutnya dilakukan penginputan kedalam aplikasi SIRATMIL, sehingga menghasilkan bukti tanda terima yang telah ditandatangani oleh Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan kemudian dilakukan proses pencetakan lembar disposisi secara otomatis pada aplikasi SIRATMIL	15 Menit	
2.	Surat / Berkas dalam kategori perkara atau Umum, Undangan, Kepegawaian, secara otomatis dalam aplikasi SIRATMIL ditujukan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan dilanjutkan ke Sekretaris kemudian terakhir Kadilmil.	15 Menit	
3.	Semua surat/berkas yang telah ditujukan kepada Kepala melalui aplikasi SIRATMIL selanjutnya Kepala melakukan disposisi surat kepada Panitera atau Sekretaris dan semua surat/berkas yang telah ditujukan kepada Waka melalui aplikasi SIRATMIL ditujukan kepada Panitera untuk didisposisi kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera Muda kemudian Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan menyerahkan fisik dari surat / berkas tersebut sesuai disposisi Panitera atau Sekretaris kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera Muda untuk didisposisi kepada staf pada bagian masing-masing untuk ditindak lanjuti sesuai disposisinya.	15 Menit	
4.	Surat yang memerlukan jawaban/	15 Menit	



	tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ ditanggapi dan diselesaikan serta wajib mengupload hasil pekerjaan/tindak lanjut surat melalui aplikasi SIRATMIL. Sehingga Kadilmil, Waka, Panitera, Sekretaris, Panmud, Ka. Sub. Bag dapat memeriksa hasil pekerjaan / tindak lanjut setiap surat yang sudah dilaksanakan oleh staf		
5.	Dalam Kategori Surat Delegasi pada aplikasi SIRATMIL yang ditujukan secara otomatis kepada Panitera, oleh Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan pada hari itu juga menyerahkan Fisik dari Surat Delegasi kepada Panitera kemudian Panitera akan mendisposisikan surat delegasi kepada Staf Panitera wajib mengupload hasil pekerjaannya pada aplikasi SIRATMIL;	15 Menit	

3. PELAYANAN PENGADUAN

No	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Penanganan Pengaduan / SIWAS MARI	30 Menit	

Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali mendapat prestasi yang membanggakan, yaitu memperoleh Juara III dalam perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, di Denpasar, Bali.



3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku Badan Peradilan dibawahnya juga tak lelah untuk berinovasi. Berikut adalah inovasi yang telah dilahirkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun demi menunjang Pelayanan Publik agar semakin prima.

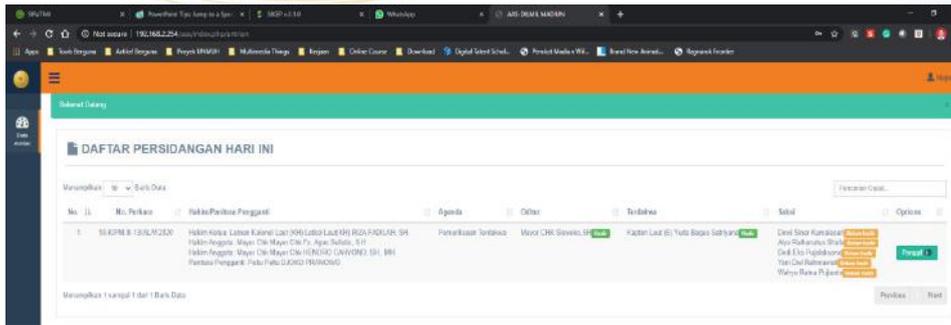
- **Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Announcement Persidangan)**

Aplikasi SIAP dirancang oleh Tim IT Dilmil III-13 Madiun sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Sebelumnya, Provost kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan Panitera terkait agenda persidangan mana yang lebih didahulukan, karena tidak ada media untuk melakukan monitoring tamu persidangan yang telah hadir. Untuk itu, tim IT berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi, yang data-datanya bersumber dari SIPP dan e-tamil, yang kemudian akan memunculkan data tamu persidangan secara komplit dan real-time. Selain itu, didalam aplikasi juga terdapat tombol 'Panggil' untuk tamu persidangan yang sudah lengkap. Tombol ini begitu di klik akan terkoneksi dengan sound system yang ada di area kantor, jadi para tamu persidangan bisa mempersiapkan diri di ruang sidang. Aplikasi SIAP bisa dilihat secara transparan baik oleh masyarakat pencari keadilan dan tamu persidangan yang hadir di Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga para pencari keadilan mengetahui atas kesiapan pelaksanaan persidangan.



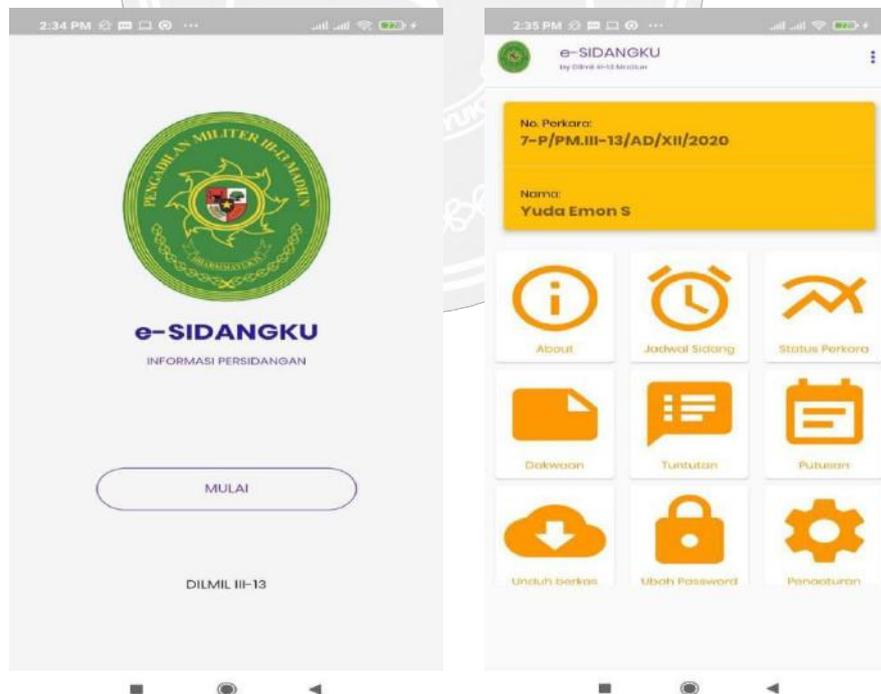


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020



- **Aplikasi e-SIDANGKU**

e-SIDANGKU adalah sebuah inovasi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berupa aplikasi untuk para pihak berperkara dalam memperoleh informasi terkait persidangan yang tengah mereka jalani secara mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pemilik Ponsel berbasis Android di Google Play Store. Didalamnya terdapat menu Jadwal Persidangan, Status Perkara, Dakwaan, Pengaduan, dan Unduh Salinan Putusan. Terdapat pula fitur pengingat untuk memastikan agar para pihak berperkara tidak lupa akan jadwal persidangan yang akan mereka jalani.





- **Public Service**

Area ini disediakan untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan para tamu persidangan untuk melepas penat dan dahaga ketika menunggu jalannya proses persidangan yang sedang berlangsung. Tersedia air mineral, kopi, teh dan snack yang dapat dinikmati oleh para tamu persidangan yang disediakan gratis oleh kantor, yang dananya berasal dari sumbangan sukarela para anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. Hal ini merupakan wujud nyata Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mempertahankan Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



- **Ruang Tunggu Terbuka**

Ruang tunggu terbuka ini disediakan agar para tamu persidangan dan masyarakat pencari keadilan tidak bosan menunggu didalam ruang tunggu yang tersedia didalam kantor.





- **Ladies Park**

Ladies park ini disediakan guna memwadhahi masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun khususnya wanita, untuk dapat memarkir kendaraannya dengan mudah, dengan spot parkir yang dinilai paling mudah untuk diakses.



- **Parkir Difabel**

Parkir Difabel ini disediakan untuk memwadhahi Para Disabilitas agar dapat dengan mudah turun dari kendaraan dan mengakses sarana Disabilitas kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun.



- **Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik**

Selain dari survey manual yang telah disediakan (dengan mengisi form/angket survey yang telah disediakan), masyarakat pencari keadilan juga dapat mengisi survey indeks kepuasan masyarakat secara online langsung dari gadget/gawai nya masing-masing. Survey ini berbentuk QR-Code yang tersebar di berbagai area kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Survey Elektronik ini disediakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tolak ukur dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan juga wujud nyata dalam mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).





- **Pojok Baca**

Pojok baca disediakan untuk masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun agar dapat mengisi waktu ketika menunggu dengan bacaan yang menambah ilmu dan keimanan. Buku/bacaan ini disediakan di berbagai sudut kantor seperti ruang tunggu, didalam ruang tahanan, dan juga di ruang ramah anak.



- **ATR (Audio to Text Recorder)**

ATR adalah perangkat yang berfungsi untuk merubah audio menjadi Text yang dapat mempercepat proses persidangan. Dengan demikian proses persidangan menjadi lebih akurat dan cepat untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan.



- **Go Green**

Go green adalah kawasan atau area yang berada di sekitar kantor maupun di dalam kantor yang berfungsi untuk keindahan dan kenyamanan para pencari keadilan. Kawasan atau area Go Green ini bertujuan untuk menyegarkan udara.





- **Charger HP**

Perangkat ini merupakan piranti yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka keberadaan charger HP sangat diperlukan sebagai sarana pelayanan bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang mengisi daya baterai HP





- **Kotak P3K**

Sarana ini perlukan sebagai sarana pelayanan untuk Pertolongan Pertama pada kecelakaan baik terhadap pengunjung sidang, pencari keadilan dan anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun



- **Smoking Area**

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga di dalam ruangan dan di sekitar ruangan aman atau terbebas dari asap rokok





- **Televisi untuk Menampilkan DIPA dan Jadwal Persidangan**

Sarana televisi besar sebagai sarana transparansi peradilan berkaitan dengan informasi persidangan, jadwal sidang dan sosialisasi pelayanan prima yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun



- **Alat Pemadam Api Ringan**

Sarana ini dibutuhkan sebagai sarana pengamanan tingkat pertama apabila terjadi kebakaran di dalam kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun





- **Alur Evakuasi Bencana**

Alur ini digunakan untuk mempermudah evakuasi apabila terjadi kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya



- **Jalur Evakuasi Titik Kumpul**

Sarana digunakan sebagai titik kumpul evakuasi apabila terjadi bencana alam





- **Jalur Khusus Disabilitas**

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan yang berkebutuhan khusus bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang, sehingga dapat mempermudah akses bagi yang berkebutuhan khusus.



- **Pos Penjagaan dan Ruang Tunggu Tamu**

Sarana ini digunakan sebagai Screening pertama apabila ada tamu keluar masuk kantor sehingga keamanan dapat terkendali



- **Papan Pengumuman**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Sarana ini digunakan untuk mempermudah sebagai sarana pelayanan informasi pencari keadilan dalam rangka mempublikasikan hasil persidangan



- **Tempat Bermain Anak**

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di tempat tersebut sehingga tidak mengganggu proses persidangan ketika dalam proses pemeriksaan berlangsung





D. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

A) Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO 9001:2015)

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2015 pada tanggal 18 September 2017 dari NQA Indonesia.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Tugas Tim Assesmen Nomor : 3/TAPM.DJMT.F.07/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang pelaksanaan Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dengan demikian berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/TAPM.DJMT.F.07/3/2019, Satuan Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terakreditasi : "A" (Excelent).

Sertifikat Penjaminan Mutu Terakreditasi "A" (Excelent) tersebut telah diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu





1. ZONA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 2017. Selanjutnya di bulan Mei 2018 dan Juni 2018 Tim Bawas MA datang dalam rangka melaksanakan audit ZI di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Adapun pencanangan ZI di Pengadilan Militer III-14 Denpasar sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 9 November 2019.

Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah siap membangun Zona Integritas. Bersamaan dengan pencanangan ZI, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar beserta seluruh pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang berisi 7 (tujuh) butir komitmen/janji pegawai.

Pencanangan ZI di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilakukan secara terbuka dengan mengundang beberapa Satker lain, diutamakan yang sering berhubungan dengan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pencanangan ZI ini kemudian dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Gambar V.2 Piagam Pencanangan Zona Integritas



2. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang Adminisasi Umum, Perkara, Kepegawaian dan Keuangan serta meningkatkan Pelayanan Publik, maka di bulan September tahun 2018 Pengadilan Militer III-14 Denpasar berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memenuhi Standar Manajemen Mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar V.5 Sertifikat ISO 9001:2015





3. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-14 Denpasar membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, Transparan, Terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan pelayanan yang Prima, Akuntabel dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi,

PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3-Mil03/60/Skep/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Kepaniteraan melayani kebutuhan yang bersifat teknis dan



Kesekretariatan melayani kebutuhan yang bersifat Non Tehnis. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar V.6 Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu



4. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 diantaranya yaitu pembaruan Teknologi Tnformasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki Manajemen Informasi yang menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas dan Transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2019. Pengadilan Militer III-



14 Denpasar berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis Teknologi Informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

5. INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020

Di tahun 2020 Pengadilan Militer III-14 Denpasar membangun dan menjalankan dua aplikasi baru yaitu aplikasi Simposar dan aplikasi Aviagram. Sebagai pedoman penggunaan kedua aplikasi tersebut, disusun pula SOP penggunaan aplikasi Simposar dan aplikasi Aviagram.

a) **Aplikasi Simposar** (Sistem Pelayanan Online Pengadilan Militer III-14 Denpasar)

Aplikasi Simposar adalah Aplikasi berbasis WEB yang bertujuan sebagai media pelayanan agar syarat-syarat formil dalam berkas untuk menjalankan sidang suatu perkara dapat dilakukan secara Real Time.

b) **Aplikasi Aviagram**

Aplikasi Aviagram (Aplikasi Virtual Assistant Via Telegram) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh kreatifitas dari seorang personil IT Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang filosofinya aplikasi ini diciptakan untuk memberikan kemudahan yang seluas-luasnya bagi para Papera dan Ankum di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengetahui sampai sejauh mana penanganan perkara yang melibatkan anggota di kesatuannya, aplikasi ini sangat bermanfaat karena dengan hanya mengetik nomor perkara di Media Sosial Telegram para Papera dan Ankum di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat dengan mudah mendapatkan pesan berupa informasi jadwal sidang, tahapan persidangan hingga amar putusan dan kapan perkara anggotanya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

6. INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAINNYA

Selain aplikasi Simposar dan aplikasi Aviagram, Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebelumnya juga telah membangun dan menjalankan beberapa aplikasi pendukung kinerja lainnya. Aplikasi- aplikasi ini yaitu Aplikasi SIGAP dan Aplikasi SIRAPI. Bersamaan dengan digunakannya



aplikasi ini, disusun pula SOP sebagai pedoman penggunaan aplikasi dan diterbitkan surat penunjukan admin atau tim pelaksana aplikasi.

- a) **Aplikasi SIRAPI** (Sistem Informasi Realisasi Anggaran Pengadilan Terkini) Aplikasi yang menyajikan penyerapan Realisasi Anggaran DIPA BUA dan Dirjan secara Rea Time (terkini)
- b). **Aplikasi SIGAP** (Sitem Informasi Gaji Pegawai) Aplikasi yang menyajikan informasi gaji Pegawai baik ASN, Militer dan PPNPN.

B) Hasil Survei Pelayanan Publik

Sepanjang tahun 2020, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan setiap bulan dalam tahun 2020.

Survei dilaksanakan terhadap 100 (seratus) orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3.Mil03/16/Skep/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-14 Denpasar.

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Survei IKM semester II dilaksanakan mulai tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei IKM semester II tahun 2020 mencapai nilai 97,85 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.



Adapun survei IKM di bulan Desember 2020 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IKM pada bulan Desember 2020 mencapai nilai 97,85 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Survei IPK semester dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei IPK semester I tahun 2020 mencapai nilai 93,38 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

Adapun survei IPK semester II dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IPK semester II tahun 2020 mencapai nilai 95,38 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

C) Pengelolaan Teknologi Informasi

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memanfaatkan keberadaan Teknologi Informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-denpasar.go.id. Dalam website ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-14 Denpasar baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan



beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Beberapa Aplikasi didapatkan dari pusat, yaitu Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

- a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi di bidang Perkara.
- b. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang Kepegawaian.
- c. Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi Sistem Aplikasi satker (SAS), yaitu aplikasi di bidang keuangan.
- d. Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI), yaitu Aplikasi di bidang Keuangan.
- e. Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT), yaitu Administrasi di bidang Keuangan
- f. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN), yaitu administrasi di bidang keuangan.



Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

4. Sistem Informasi Online Pengadilan Militer Denpasar (SIMPOSAR), yaitu aplikasi di bidang kepaniteraan.
5. Aplikasi Virtual Asisten Via Telegram (AVIAGRAM), yaitu aplikasi di bidang pelayanan publik.
6. Sistem Informasi Gaji Pegawai (SIGAP), yaitu aplikasi di bidang Administrasi Personil.
7. Sistem Informasi Realisasi Anggaran Pengadilan Terkini (SIRAPI), yaitu aplikasi di bidang administrasi keuangan.

Beberapa Aplikasi yang digunakan di atas mengalami pembaruan (*update*) secara berkala, diantaranya yaitu aplikasi SIPP dimana hingga akhir tahun 2020 menggunakan versi terbaru yaitu versi 4.01 dan aplikasi SAS dimana versi terbaru hingga akhir tahun 2020 yaitu versi 20.0.0.

2. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun dalam hal peningkatan Bandwith Internet, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 26 Juni 2019 Pengadilan Militer III-14 Denpasar menunjuk G.Medya sebagai penyedia bandwith, dengan spesifikasi layanan bandwith sebagai berikut :

- Kecepatan akses 70 Mbps



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berjumlah 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan Internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court. Adapun spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.11 Data Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	2	3
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5 Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10) Power Supply One 650W Single Non-Redundant OS Ubuntu	1 Unit



1	2	3
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC OS Centos DVR-RW Supermulti Slimline Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug HDD Drive Bays: 4x2.5" Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port 2x 10/100/1000 Mbit Ethernet 1x iRMC remote management server 3 Pcle slots, 1x Serial RS-232 125 Watt max power consumption Warranty 3/3/3	1 Unit
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4 Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC OS Centos Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA Storage Controller PRAID CP400i Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp Warranty 3/3/3	1 Unit

E. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG

Akreditasi Penjamin Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Militer II -15 Kupang. Pada Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Militer III-15 Kupang, terdapat peran Ditjen Badilmiltun MARI sebagai Pembina Pengadilan Militer III-15 Kupang, peran Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagai penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai Regulator.

Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Militer III-15 Kupang yang dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun MARI tersebut meliputi



tahapan Assesmen dan tahapan penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

1. Assesmen Kepemimpinan (Leader Ship) di Peradilan Militer.
2. Assesmen Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara (Management Procees) Peradilan Militer.
3. Assesmen Sarana dan Prasarana (Performance Result) di Peradilan Militer.
4. Assesmen E-Judiciary di Peradilan Militer.
5. Assesmen Layanan Pengadilan di Peradilan Militer.
6. Assesmen Kepegawaian dan Tata Laksana (Resources Management) di Peradilan Militer.
7. Assesmen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (Strategic Planning) di Peradilan Militer.

Dari penyelenggaraan Penjamin Mutu Pengadilan Militer III-15 Kupang mendapat nilai 89,98 atau A-Excellent.

A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan; bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi Pengadilan terdapat di Keputusan Ditjen Badilmiltun



Mahkamah Agung RI Nomor: 462/ DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan.

B. Inovasi Pelayanan Publik

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang tahun 2020 terdapat 1 (satu) inovasi yaitu melalui aplikasi AKUT (Aplikasi Kontrol Pembagi Kuota Internet) yang berfungsi untuk membagi kuota agar para pengunjung pengadilan bisa mengakses Internet yang sudah ditentukan kuotanya.

F. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi penjaminan mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE). Akreditasi pada lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara didasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI 506/DjMT/KEP/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu pada tanggal 28 sampai dengan 30 juni 2018, sesuai dengan surat tugas dirjen badimiltun mari nomor :627.a/djmt.2/ratgas/6/2018 tentang pelaksanaan assesment akreditasi penjamin mutu di Pengadilan Militer III-16 Makassar. adapun area yang diperiksa sebagai berikut :

- area I assesmen kepemimpinan di Peradilan Militer
- area II assesmen pola bindalmin dan standard operasional prosedur (SOP) penyelesaian perkara Peradilan Militer
- area III assesmen sarana dan prasarana Peradilan Militer
- area IV assesmen pengelolaan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan aplikasi berbasis IT lainnya di Peradilan Militer



area V assesmen pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan di Peradilan Militer.

Sesuai dengan berita acara pelaksanaan akreditasi penjamin mutu di lingkungan Pengadilan Militer pada hari senin tanggal 9 juli 2018 rapat pleno tim akreditasi penjamin mutu dirjen badilmiltun mahkamah agung republik indonesia menetapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar lulus dengan nilai 90,83 dengan predikat a (sangat baik). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof DR. Hatta Ali, S.H.,M.H. menyampaikan Program Akreditasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan upaya Mahkamah Agung dalam Implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP. Kebijakan PTSP ini kemudian ditindaklanjuti pada tingkat Direktorat Jenderal masing-masing Badan Peradilan.

Untuk lingkungan Peradilan Militer didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 460/DjMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W3.Mil05/01/Kep/I/2019 tentang penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Inovasi pelayanan publik

1. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

2. Adanya ruang tunggu bagi pencari keadilan, ruang menyusui, mushallah, dan tempat bermain anak-anak yang representatif.
3. Adanya Aplikasi Siratmil untuk mempermudah pelayanan terhadap pencari keadilan.
4. Sebagai respon terhadap pandemi virus COVID-19 dibuatkan sarana tambahan protokol Kesehatan sebagai berikut:

Tablel V.1 Sarana tambahan protokol kesehatan COVID-19

No.	Inovasi	Foto
1.	Adanya Akrilik pembatas antara tamu dan petugas PTSP	
2.	Adanya wastafel umum di luar gedung kantor dan informasi cetak Protokol Kesehatan	
3.	Adanya alat pengukur suhu tubuh infrared.	



G. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Militer III-17 Manado dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MA-RI Nomor 506/ Djmt/ Kep/ 9/ 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ada 5 Area yang menjadi tolak ukur penilaian, yaitu :

1. Kepemimpinan di Peradilan Militer (Leadership)
2. Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer
3. Sarana dan Prasarana Peradilan Militer
4. Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Berbasis IT lainnya di Peradilan Militer
5. Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan di Peradilan Militer.

Pengadilan Militer III-17 Manado pada bulan Desember Tahun 2018 telah melaksanakan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dan Sertifikasi ISO 9001: 2015. Akreditasi Penjaminan Mutu dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018 oleh Tim Assesor dari Ditbin Ganisminmil Assesmen Lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari :

1. Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C.A. sebagai Ketua Tim (Area-1)
2. Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H. sebagai Anggota Tim (Area-2) dan (Area-3)



3. Arianie Amanda, S.E. sebagai Anggota Tim (Area-4) dan (Area-5).

Dari Implementasi 5 (lima) Area Assesmen yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditbin Ganisminmil, Pengadilan Militer III-17 Manado memperoleh skor total sebagai berikut :

Tabel.5.1. Skor Total Penilaian Akreditasi.

AREA	IMPLEMENTASI AREA ASSESMEN	SKOR TOTAL		
		Bobot	Index Nilai Strategis	Nilai Akreditasi
I	Assesmen Kepemimpinan di Peradilan Militer	84	0,98	97,62
II	Assesmen Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer	428	11,81	90,88
III	Assesmen Sarana dan Prasarana Peradilan Militer	312	5,74	71,77
IV	Assesmen Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Berbasis IT lainnya di Peradilan Militer	332	12,77	98,22
V	Assesmen Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan di Peradilan Militer	288	10,11	91,93
JUMLAH TOTAL		1.444	41,41	450,42
AVERAGE			8,28	90,08

Dengan demikian Pengadilan Militer III-17 Manado telah dinyatakan terakreditasi oleh Tim Assesor Ditbin Ganisminmil sejak bulan Desember Tahun 2018 dan telah menerima sertifikat Akreditasi dengan nilai "A" (Excellent).

NILAI AKREDITASI	90,08	A	A / SANGAT BAIK
------------------	-------	---	-----------------

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi



Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada tanggal 28 Mei 2018 Pengadilan Militer telah mencanangkan “Zona Integritas” dan telah mengikuti penilaian oleh Kemenpan RB sejak diusulkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juli 2020, berdasarkan surat Sekma Nomor 1081/SEK/OT.01.1/2020 sampai dengan tahap penilaian terakhir tanggal 19 Desember 2020. Pada tanggal 21 Desember 2020 Pengadilan Militer III-17 Manado oleh Kemenpan RB dinyatakan sebagai salah satu Satuan Kerja yang memperoleh Wilayah “Zone Integritas” Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan diberikan Piagam Penghargaan oleh Kemenpan RB.

Gbr. 5.1. Piagam Penghargaan



1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2019 telah berusaha terus menerus melakukan inovasi pelayanan seiring dukungan dari Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang semakin gencar diserukan. Salah satu inovasi tersebut adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan ini dilakukan agar para pencari keadilan dapat dilayani dengan lebih baik lagi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat bermanfaat bagi Para Pencari Keadilan, Pers/ Jurnalis, maupun Masyarakat pada umumnya. Adapun penerapan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado secara langsung dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado, Letnan Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, efektif, tepat, transparan dan akuntabel. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer III-17 Manado, diharapkan para personil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan. Selama tahun 2020 penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah terlaksana dengan baik dimana personil yang bertugas dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam SOP PTSP.

1) Inovasi Pelayanan Publik

a. PENGGUNAAN APLIKASI e-TaMil

Pengadilan Militer III-17 Manado terus menerus melakukan inovasi terkait pelayanan publik, pada tahun 2019 inovasi yang dilakukan yaitu Aplikasi e-Tamil yang di resmikan penggunaannya oleh Kadilmil III-17 Manado, Letnan Kolonel Chk Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., pada tanggal 12 Desember 2018.



Gbr. 5.2. Penggunaan Aplikasi e-Tamil



Pada tanggal 13 Desember 2018, Penggunaan Aplikasi elektronik Buku Tamu Pengadilan Militer (e-TaMil) pada Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ke-2 sangat menginspirasi beberapa pihak dalam model pelayanan masa depan, Aplikasi ini disambut antusias oleh para pencari keadilan, hal ini terbukti dengan banyaknya penilaian positif dari hasil polling Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. PENGGUNAAN APLIKASI e-Viper

Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan Militer III-17 Manado terus berinovasi, tahun 2020 Inovasi yang dilakukan yaitu Aplikasi e-Viper yang di resmikan penggunaannya oleh Kadilmil III-17 Manado, Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., pada tanggal 27 Oktober 2020. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan PTSP sehingga tidak membutuhkan waktu yang



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

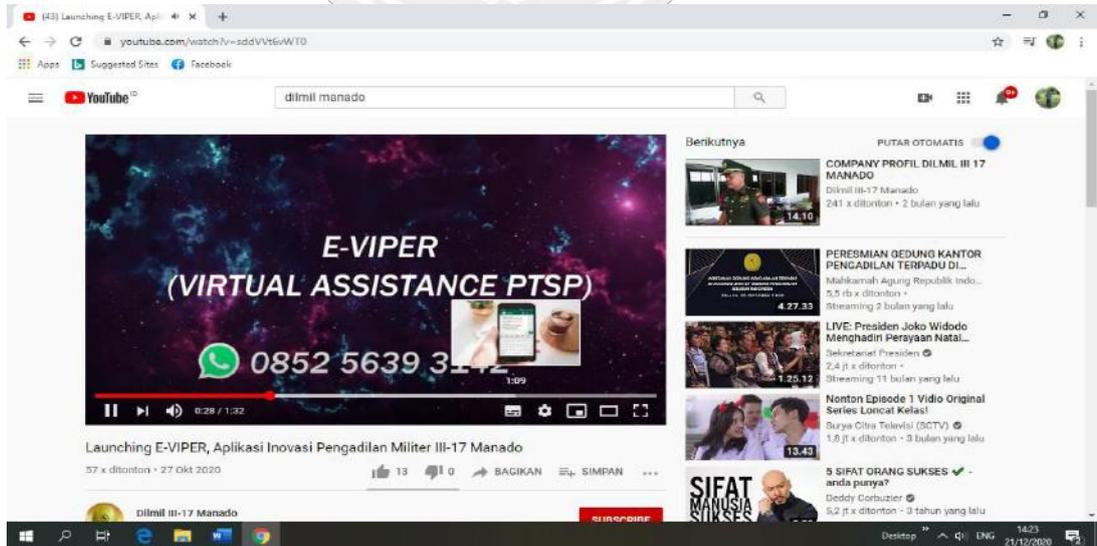
lama untuk mengantri di PTSP Dilmil III-17 Manado. Dengan demikian maka tidak akan terjadi penumpukan pengunjung di Fron

Office Dilmil III-17 Manado pada jam pelayanan kerja yang bertujuan meminimalisir terjadinya penularan Virus Corona (Novel Corona Virus 2019).

Gbr.5.3. Penggunaan Aplikasi e-Viper



Gbr.5.4. Penggunaan Aplikasi e-Viper





Pada tanggal 13 Desember 2018, penggunaan Aplikasi Elektronik Buku Tamu Pengadilan Militer (e-tamil) pada Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ke-2 sangat menginspirasi beberapa pihak dalam model pelayanan masa depan, aplikasi ini disambut antusias oleh para pencari keadilan, hal ini terbukti dengan banyaknya penilaian positif dari hasil polling indeks kepuasan masyarakat (IKM).

H. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Akreditasi penjaminan mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

- 1) Kepemimpinan (leadership).
- 2) Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer.
- 3) Sarana dan Prasarana.
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi berbasis IT lainnya.
- 5) Pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan.
- 6) Kepegawaian dan Tata Laksana.
- 7) Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.



Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik, maka Pengadilan Militer telah dilakukan proses assesmen yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 21 Maret 2019, dan Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil meraih nilai "A" (Excellent) atau "sangat baik". Adapun Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu telah diterima oleh Kadilmil III-18 Ambon pada tanggal 6 November 2019. Pencapaian Akreditasi Penjaminan mutu ini merupakan pemenuhan Pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Peradilan yang prima dan berkualitas.

Gambar V.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.



1. SERTIFIKAT ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka pada tanggal 13 Juli tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan LULUS dan berhasil mendapat sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.



Gambar V.2. Sertifikat ISO 9001:2015



2. ZONA INTEGRITAS (ZI)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakekatnya adalah merupakan miniature Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 13 Maret 2019 telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas (ZI).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon telah siap membangun Zona Integritas (ZI). Bersama dengan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang berisi 7 (tujuh) butir komitmen/janji pegawai.

Pencanangan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh : Ketua



Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Ketua Pengadilan Agama Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Oditurat Militer IV-19 Ambon, Kakumdam XVI/Pattimura, Danpomdam XVI/Pattimura, Kadiskum Lantamal IX Ambon, dan Kakum Lanud Pattimura. Penandatanganan zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personel sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

Gambar V.3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas (ZI)



Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan pada awal tahun 2020 dengan mengisi LKE Zona Integritas dan melengkapi semua evidence dari enam area yang telah dilaksanakan oleh masing-masing area di bawah kendali koordinator masing-masing area, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi tiap bulan untuk mengetahui progress/ kemajuan dari pembangunan ZI tersebut. Pada tahap penilaian internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dalam hal ini dilaksanakan oleh Bawas Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan lengkap dan memadai evidence-evidence yang disiapkan oleh masing-masing area dengan menggunakan sarana aplikasi PMPZI. Sehingga atas rekomendasi dari TPI, pimpinan Mahkamah Agung



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pelayanan yang Prima, Akuntabel dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam perannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan agar pencari keadilan merasa kebutuhannya terpenuhi.

Adapun sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas PTSP dengan penetapan SK oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas meja PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan bekerja dan melayaninya.



Gambar V.4. Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



4. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaharuan teknologi informasi (TI). Pembaharuan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern



berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Inovasi Pengadilan Militer III-18 Ambon ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih Efektif, Efisien, Tepat Guna dan Tepat Manfaat. Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membuat inovasi aplikasi PAPERDA (Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data). Aplikasi PAPERDA ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk memperoleh informasi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan mudah khususnya untuk satuan Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku utara.

Adapun PAPERDA tersebut adalah aplikasi virtual untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomor Whatsapp (082198798318) yang melayani informasi antara lain :

1. Kesekretariatan melayani informasi tentang Organisasi
2. Kepaniteraan melayani informasi tentang Perkara
3. Pengaduan melayani informasi tentang Pengaduan
4. Pelayanan melayani informasi tentang Profil Dan Layanan lainnya.

5. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan. Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 melaksanakan dua jenis survei dalam bidang pelayanan public, yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).



Survei ini dilaksanakan setiap triwulan, pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hasil Survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan.

- a. Hasil Survei IKM triwulan I mencapai nilai 93,36 yang berada pada kategori BAIK.
- b. Hasil Survei IKM triwulan II mencapai nilai 91,58 Yang berada pada kategori BAIK
- c. Hasil Survei IKM triwulan III mencapai nilai 90,57 yang berada pada kategori BAIK.
- d. Hasil Survei IKM triwulan IV mencapai nilai 91,3 yang berada pada kategori BAIK.

2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut di mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan.



- a. Hasil Survei IPK triwulan I mencapai nilai 95,83 yang berada pada kategori BAIK.
- b. Hasil Survei IPK triwulan II mencapai nilai 97,92 Yang berada pada kategori BAIK
- c. Hasil Survei IPK triwulan III mencapai nilai 96,25 yang berada pada kategori BAIK.
- d. Hasil Survei IPK triwulan IV mencapai nilai 96,25 yang berada pada kategori BAIK

I. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi penjaminan mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

- a. Kepemimpinan (Leadership)
- b. Manajemen Proses (Process Management)
- c. Hasil Kinerja (Performance Result)
- d. Sistem Dokumentasi (E-Judiciary)
- e. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
- f. Management Sumber Daya (Resorce Management)
- g. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik, maka pada bulan April tahun 2019 Pengadilan Militer III-19 Jayapura berhasil mendapatkan nilai Akreditasi "B" berdasarkan Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang kemudian diperbaiki melalui Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu pada tanggal 25 Agustus Tahun 2020 dengan Predikat "A".

Akreditasi Penjaminan Mutu ini dimaksudkan untuk memberikan standar atau pedoman atas pelayanan publik di Pengadilan Militer III-19 Jayapura agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Berikut gambar penyerahan Sertifikat secara simbolis melalui Daring yang diwakilkan oleh Kadilmilti III Surabaya

Gambar V.1

Proses Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 Secara Simbolis melalui Daring yang diwakilkan oleh Kadilmilti III Surabaya.



2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).

Pada tahun 2020 ini, bersama dengan pengadilan lain di 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer III-19 Jayapura terus menjalankan dan meningkatkan pelaksanaan sarana PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dibangun pada awal tahun 2018 dan terus ditingkatkan hingga tahun 2020. Program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi,



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan melalui satu saluran saja, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Kepaniteraan kebutuhan yang bersifat Non Teknis. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh Pegawai Pengadilan Militer III-19 Jayapura lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar V.3

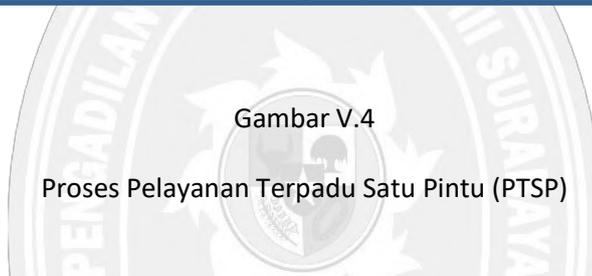
Display Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



After-
Tahun 2020



Before-
Tahun
2019



Gambar V.4
Proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Before-
Tahun 2019



After-Tahun 2020

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke meja PTSP Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan mengisi formulir yang telah disediakan, atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email ataupun melalui link Website pada fitur Layanan Pengaduan. Dan di tahun 2020 ini tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Gambar V.5

Link Website – Layanan Pengaduan



Before-Tahun 2019



The screenshot displays a website interface with several sections:

- STATISTIK PERKARA**: A bar chart showing case statistics.
- APLIKASI LAIN**: A section for other applications.
- Link Cepat**: A section for quick links.
- Jadwal Sidang**: A calendar icon for court sessions.
- DIREKTORI PUTUSAN**: A section for case decisions.
- BIAYA PERKARA**: A section for court fees.
- PERMOHONAN INFORMASI**: A section for information requests.
- LAYANAN PENGADUAN**: A section for complaint services.
- PERNYAIPAN KEPUTUSAN MENKOPOLHUKAM NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG KELOMPOK KERJA INSTRUMEN UTAMA dan MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**: A news item with a "Read More" link.
- PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020**: A news item with a "Read More" link.
- Penilaian Kinerja JF PRANATA KOMPUTER**: A news item with a "Read More" link.
- PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK USUL PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN**: A news item with a "Read More" link.
- Anggota Pengadilan Militer III-19 Jayapura**: A photo of a military officer.

After-Tahun 2020

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah pemenuhan permintaan data dan informasi. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/ KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, diuraikan tentang kategori informasi, pelaksana pelayanan informasi, prosedur pelayanan permintaan informasi dan prosedur pengaburan informasi.

Melalui meja PTSP, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melayani permintaan data dan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung di atas. Adapun biaya yang timbul dari proses permintaan data dan informasi tersebut telah diatur dalam Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: W3.Mil.08/004/SKEP/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi Publik di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Di tahun 2020 Pengadilan Militer III-19 Jayapura menerima 124 (Seratus Dua Puluh Empat) permintaan data dan informasi melalui meja PTSP. Semua permintaan tersebut masing-masing berisi tentang permintaan Petikan Putusan, Salinan Putusan, Informasi Sidang dan Pengajuan Upaya Hukum. Semua permohonan tersebut semuanya telah ditindaklanjuti dan telah dipenuhi.



3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-19 Jayapura rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan. Survei ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, maksimal tiga kali dalam setahun atau per triwulan. Hasil survei ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
- b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini, dengan awal Survei dilakukan secara manual, seiring dengan perbaikan sistem dilakukan juga secara elektronik dengan menggunakan aplikasi **GOOGLE FORM** pada bulan November 2019 dan juga dengan aplikasi **SIRATMIL-ETAMIL** yang merupakan satu kesatuan sistem dengan Badan Peradilan Militer lainnya di seluruh Indonesia dan juga telah ditambahkan dengan survey persepsi korupsi yang dilaksanakan via **GOOGLE FORM** juga.

Untuk masyarakat yang tidak dapat langsung datang ke Kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura, namun mendapat layanan dari Pengadilan, dapat juga mengisi Survei melalui **GOOGLE FORM** yang telah di-link-an dengan website Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan alamat url : **dilmil-jayapura.go.id** seperti tertera pada gambar berikut :



Gambar V.6

Link Website - Survei Kepuasan Publik



Before-
Tahun 2019



After-
Tahun 2020

Sedangkan masyarakat yang datang langsung ke Kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dapat mengisi survei langsung pada Mesin Layanan Vestouch yang diletakkan pada lobby depan Kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan bantuan arahan dari Petugas PTSP, dengan terlebih dahulu mengisi Buku Tamu Online.



Gambar V.7

Pengisian Buku Tamu Online dan Survei Kepuasan Publik
dengan bantuan arahan Petugas PTSP



Gambar V.8

Buku Tamu Online yang terhubung langsung dengan Survey IKM

e-TaMil v.1.0 Selasa, 15 Desember 16 : 59 : 22

TAMU PERSIDANGAN

Oditur, Penasihat Hukum, dan Para Saksi

TAMU NON PERSIDANGAN

Tamu Dengan Kebutuhan di Luar Persidangan

DAFTAR PENGUNJUNG

Tampilkan 10 entri

#	Nama Pengunjung	Keperluan	Jam Datang	Keterangan	Aksi
Tidak ditemukan data yang sesuai					

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

DAFTAR SIDANG HARI INI

Nomor Perkara	Hakim/Panitera Pengganti	Oditur	Terdakwa	Agenda dan Ruang Sidang
---------------	--------------------------	--------	----------	-------------------------



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri atas (sembilan) ruang lingkup.

Survei yang masuk baik secara manual (jika mati listrik) maupun secara aplikasi baik yang melalui google form ataupun aplikasi siratmil yaitu sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa jumlah total survey atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **96,30** dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebesar **93,75** dan kedua indeks tersebut berada pada interval 88,00 s/d 100,00 sehingga masuk dalam kategori "**SANGAT BAIK**".

Tabel V.1

Data Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,86	Sangat Baik	8
2	Prosedur	3,80	Sangat Baik	9
3	Waktu Pelayanan	3,87	Sangat Baik	6
4	Biaya/Tarif	3,96	Sangat Baik	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,89	Sangat Baik	5
6	Kompetensi Pelaksana	3,92	Sangat Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	3,96	Sangat Baik	3
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,96	Sangat Baik	2
9	Sarana dan Prasarana	3,87	Sangat Baik	7



Data Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

1	Gratifikasi	3,70	Sangat Baik	4
2	Pungutan Liar	3,73	Sangat Baik	3
3	Percaloan	3,75	Sangat Baik	2
4	Diskriminasi	3,81	Sangat Baik	1





BAB VI PENGAWASAN

Dalam sebuah Instansi atau Organisasi, perlu adanya Pengawasan, baik Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. kegiatan dari Pengawasan itu sendiri berfungsi untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya melaksanakan Pengawasan, Pembinaan baik Internal dan Eksternal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengawasan Internal adalah Pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri serta Pengadilan di jajaran Wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Rutin/Reguler adalah Pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara rutin terhadap penyelenggaraan Peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing



Maksud Pengawasan :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis Peradilan, pengelolaan administrasi Peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja seluruh personel Pengadilan.

Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan, tingkah laku aparat Pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya.

Fungsi Pengawasan :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga Peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.



Pengawasan Bidang Teknis Yustisial

- a. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka eksaminasi terhadap putusan, petikan putusan, BAS dan kelengkapan berkas perkara untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan petunjuk teknis di jajaran wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
- c. Mengadakan kunjungan kerja ke Wilayah/Daerah hukum di jajaran wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam rangka pengawasan dan pembinaan yustisial serta Pengawasan Personel.

Pengawasan Bidang Non Teknis Yustisial

- a. Melakukan pengawasan keuangan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
- b. Mengawasi dan memonitor dari kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan.
- c. Memonitor setiap saat pada pelaksanaan apel pagi dan apel sore secara langsung.
- d. Memberi masukan kepada Kepala setiap personel yang akan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat).
- e. Memberi teguran kepada setiap personel yang melakukan kesalahan/pelanggaran

A. Internal dan Eksternal

1. Internal Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan



rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Melekat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan apel pagi dan apel siang/sore yang mana pengambil apel dilakukan oleh Kepala, Wakil Kepala, Hakim Militer Tinggi dan Pejabat Struktural secara bergilir untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota;
- 2) Kegiatan Jam Komandan setiap awal bulan;
- 3) Survei atau pengawasan yang dilakukan oleh Kepala terhadap kegiatan Pegawai dan kebersihan ruangan.

b. Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah Pengawasan yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang perkara maupun kesekretariatan dengan

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk Hakim-Hakim untuk mengawasi bagian-bagian guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/11/PS.00/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu:

- a. Kolonel Chk. (K) Faridah Faisal, S.H.,M.H. sebagai Koordinator Hakim Militer Tinggi Bidang
- b. Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara.
- c. Kolonel Chk FX. Raga Sejati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
- d. Kolonel Chk Warsono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik, Pelayanan Informasi dan Pengaduan.



- e. Kolonel Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengawas Bidang Keuangan.
- f. Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengawas Bidang Disiplin Kinerja Kepegawaian
- g. Kolonel Chk .Marwan Suliandi, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengawas Bidang Perpustakaan dan Arsip.
- h. Kolonel Chk Khairul Rizal, S.H.,M.H sebagai Hkim Pengawas Umum dan Persuratan
- i. Kolonel Chk Bambang Indrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengawas Kebersihan, Kerapian dan Ketertiban.

2. Eksternal Pada tahun 2020 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku voorpost/kawal depan Mahkamah Agung melakukan tugas pengawasan eksternal di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu pengawasan daerah pada Pengadilan Militer Se-Wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tingkat Pertama di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilakukan dengan membentuk Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang. Pelaksanaan Pengawasan Pengadilan Militer Tingkat Pertama di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan membentuk Tim Pengawas dengan obyek pengawasan meliputi :

- Administrasi perkara
- Administrasi persidangan
- Administrasi umum
- Manajemen peradilan
- Pelayanan publik

Selama tahun anggaran 2020, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan pengawasan ke wilayah jajaran hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 s.d. 17 Januari 2020, Kadilmilti III Surabaya dan 2 (dua) orang Hakim Tinggi, Sekretaris serta Kasubbag TU & RT



melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

b. Pada tanggal 28 s.d 31 Januari 2020 2020, Kadilmilti III Surabaya, 2 (dua) orang Hakim Tinggi, Panitera Muda Pidana dan Kabag Pencanaan & Kepegawaian Dilmilti III Surabaya, melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Bali.

c. Pada tanggal 4 s.d 6 Pebruari 2020 , Waka, 2 (dua) orang Hakim Tinggi, Panitera Muda Hukum dan Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Dilmilti III Surabaya, melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

d. Pada tanggal 4 s.d 6 Pebruari 2020 , Waka, 2 (dua) orang Hakim Tinggi, Sekretaris dan Kasubbag Rencana dan Program Dilmilti III Surabaya, melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Militer III-8 Ambon.

e. Pada tanggal 10 s.d 11 Maret Pebruari 2020 , Kadilmilti III Surabaya, 1 (satu) orang Hakim Tinggi, dan Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Dilmilti III Surabaya, melaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Militer III-9 Jayapura.

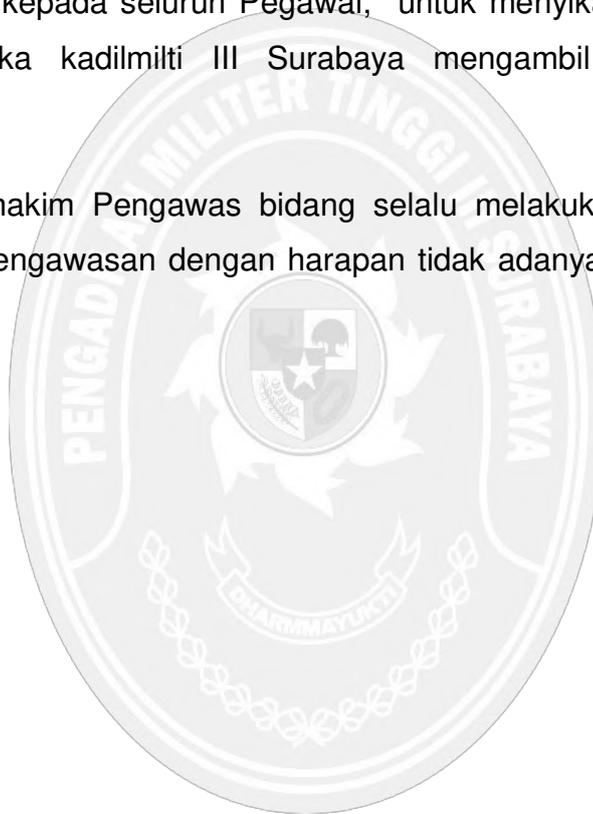
Evaluasi

Secara prinsip bahwa terhadap hasil Pengawasan dari seluruh pejabat struktural dan para Hakim Pengawas bidang tersebut ditindak lanjuti melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan dari para Pejabat Struktural dalam melaksanakan pengawasan melekat secara umum hasilnya langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing unsur terkait terkecuali untuk masalah-masalah tertentu dibawa terlebih dahulu dalam forum rapat bulanan yang diselenggarakan minimal satu bulan satu kali.



2. Pada saat para Hakim Pengawas Bidang menemukan temuan-temuan atau masalah-masalah sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, maka hakim Pengawas bidang tersebut pada saat itu langsung memberikan arahan/bimbingan kepada pelaksana dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Seluruh hasil temuan dari masing-masing hakim Pengawas bidang dilakukan eksphose yang dipimpin Kepala Pengadilan Militer III Surabaya pengawasan kepada seluruh Pegawai, untuk menyikapi masalah-masalah tertentu, maka kadilmilti III Surabaya mengambil kebijakan-kebijakan khusus.
4. Para hakim Pengawas bidang selalu melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan harapan tidak adanya pengulangan dalam kekeliruan;



BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Jajarannya telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan juga sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai dan sarana prasarana; Untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya telah membuat Program Kerja Tahunan dan rincian tugas setiap pegawai dengan membagi habis semua pekerjaan; Hambatan yang masih dirasakan adalah secara Kualitatif dan Kuantitatif Sumber Daya Manusia yang masih perlu terus ditingkatkan kemandirian maupun tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Hendaknya peningkatan Skill (kemampuan tugas) para Pegawai/Pejabat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya dapat terus diupayakan kualitas dan Kuantitasnya melalui kegiatan Diklat, Sosialisasi dan Bintek.

Untuk lebih memantapkan Fungsi-fungsi pelayanan kepada pencari keadilan kita tingkatkan Profesionalisme dan mengembangkan keteladanan;

Agar ditambah pegawai/TNI tertentu terutama bidang teknis kepaniteraan (pengolah data dan panitera pengganti) dan administrasi umum (pengolah data bidang umum dan kepegawaian serta tenaga IT).

Sidoarjo, Januari 2021
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III



Hulwani, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

